

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4. RUANG LINGKUP.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	5
2.2. SUSUNAN DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH.....	23
2.3. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	24
BAB III KEADAAN UMUM	29
3.1. NON KEPENDIDIKAN.....	29
3.2. KEPENDIDIKAN	30
3.2.1. Gambaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	30
3.2.2. Gambaran Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD).....	72
3.2.3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	81
3.2.4. Sekolah Menengah Atas (SMA).....	90
BAB IV PENETAPAN KINERJA PENDIDIKAN.....	99
4.1. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH	99
BAB V TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, INDIKATOR, DAN KEBIJAKAN	107
5.1 Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung adalah	107
5.2 Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:	108
5.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung adalah	109

5.4. Pola kebijakan yang diambil Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung untuk mendukung pembangunan	110
BAB VI PENCAPAIAN KINERJA PENDIDIKAN	112
6.1. PENINGKATAN PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PADA JENJANG PENDIDIKAN.....	112
6.2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing.....	113
6.3. PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	118
6.4. Prioritas Program Berdasarkan Jenjang Pendidikan	121
6.4. PELAKSANAAN SEKOLAH TERPADU UNGGULAN.....	125
BAB V PENUTUP	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu tujuan negara yang mempunyai arti sangat luas dan membutuhkan kesungguhan dalam mencapainya. Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas tentu harus didukung dengan sistem yang jelas.

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan satu aturan yang sangat jelas tentang Pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilaksanakan untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang cerdas. Melalui Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan bahwa keberadaan perpustakaan menjadi satu pilar penting bagi pendidikan.

Perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun regional/daerah mengharuskan birokrasi (pemerintah pusat dan daerah) untuk mengkaji ulang dasar pendekatan (paradigma) dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang demokratis, desentralistik, partisipatif, transparan, profesional, berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, maka antara lain dibentuklah satu kelembagaan Dinas Pendidikan yang mengemban tugas membantu Kepala Daerah / Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas dibidang Pendidikan dengan orientasi turut serta mensukseskan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021, yang pada tahun 2017 telah memasuki pelaksanaan tahun ke-2. Visi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung yaitu "Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung melalui Harmonisasi dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Ekonomi Prorakyat, Budaya Lokal dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menuju Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan".

Untuk mencapai visi Kabupaten Tana Tidung tersebut, maka dirumuskan 9 misi pembangunan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan Perekonomian Daerah yang berorientasi kepada kepentingan Rakyat
4. Menjadikan budaya lokal sebagai pondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal
5. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek
6. Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreatifitas
7. Mengembangkan kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di provinsi Kalimantan Utara
8. Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan
9. Mengembangkan agroindustri pertanian

Peranan Dinas Pendidikan untuk mendukung mewujudkan Visi dan Misi Tana Tidung perlu didukung dengan penjelasan Fungsi Dinas Pendidikan sehingga dapat disusun program kerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya kemudian secara mandiri Dinas Pendidikan menentukan Visi dan Misi yang sinergis dengan Visi dan Misi Kabupaten Tana Tidung.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Profil Pendidikan Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Standar Pelayanan Minimal;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Penyusunan Profil Pendidikan secara umum adalah sebagai upaya memenuhi kebutuhan data pokok pendidikan berkaitan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan sektor terkait lainnya. Secara khusus tujuan profil pendidikan ini adalah untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah di suatu daerah, permasalahan yang dihadapi, sebagai bahan perencanaan yang menyangkut pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan manajemen pendidikan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan seperti penyusunan perencanaan pembangunan wilayah.

1.4. RUANG LINGKUP

Profil ini menyajikan keadaan umum pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. yang disajikan meliputi informasi tentang administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta transportasi dan komunikasi. Informasi itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang mendukung perkembangan pendidikan di daerah. Keadaan umum pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang pendidikan serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-indikator pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Sesuai dengan bahan yang tersedia disajikan kinerja dan analisis profil pendidikan yang mencerminkan kaitan antara indikator-indikator internal dan eksternal dengan permasalahannya sehingga diharapkan dapat memberikan informasi untuk keperluan perencanaan pendidikan. Data yang tersedia disajikan dalam bentuk tabel dan memuat data dasar, (baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan maupun dari instansi lain) mengenai pendidikan dan data olahan pendidikan yang menghasilkan indikator seperti angka, rasio, dan perbandingan pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidik.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mendukung pembangunan Daerah di Kabupaten Tana Tidung yang berfungsi dalam mengurus dan membantu urusan di bidang pendidikan maka perlu dibentuk unit satuan kerja yang mengelola bidang pendidikan. Susunan organisasi Dinas Pendidikan yang ada saat ini terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan Dasar
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar
 - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan Dasar
4. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan Menengah
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah
 - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan Menengah
5. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Olahraga, terdiri dari:
 - a. Seksi Kepemudaan dan Kewirausahaan
 - b. Seksi Olahraga dan Industri Olahraga
 - c. Seksi Pendidikan Formal dan Non Formal
6. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Seksi Seni dan Budaya
 - b. Seksi Objek dan Sarana Wisata
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Satuan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Tana Tidung; tugas pokok dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung adalah membantu pemerintah dalam hal urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka diperlukan sumberdaya yang dapat bertanggung jawab dalam bidang pendidikan sehingga diperlukan organisasi pelaksana dari Dinas Pendidikan beserta tugas dan fungsinya masing-masing yaitu:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b) Pembinaan dan pengendalian program pendidikan;
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sementara itu, tugas dari Kepala Dinas meliputi:

- a) Merumuskan program kerja dan anggaran bidang pendidikan;
- b) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- c) Membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya;
- d) Menyelenggarakan pendidikan ;
- e) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan;
- f) Menyelenggarakan kesekretariatan dinas;
- g) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional dinas;
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
- i) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas;
- j) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran tugas, dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan sebagian tugas kepala dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan. Dalam menjalankan fungsi pokoknya tersebut fungsi dari Sekretariat adalah:

- a) Penyiapan perumusan, kebijaksanaan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan serta pelaksanaan kegiatan dinas;
- b) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan penyelenggaraan tugas kesekretariatan;
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, tugas dari Sekretariat meliputi:

- a) Menyusun program kerja dan anggaran sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kegiatan subbagian-subbagian;
- b) Membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dengan seluruh bidang di lingkungan dinas;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis operasional penyelenggaraan pelayanan administrasi yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- e) Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dinas sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- f) Menyusun laporan akuntabilitas kinerja berdasarkan laporan dan masukan dari masing-masing unit kerja di lingkungan dinas;
- g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan

- h) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dinas;
- i) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat dibantu oleh:

1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Sekretaris Dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi penyusunan program dan pengelolaan keuangan. Sementara itu, Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan program dan keuangan.
- b) Melaksanakan bimbingan, perencanaan, evaluasi program dan keuangan.
- c) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, tugas dari Sub Bagian Perencanaan dan Program meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan Pengumpulan bahan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis dibidang keuangan;
- d) Melaksanakan, verifikasi, pembendaharaan dan pembukuan;
- e) Melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja;
- f) Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
- g) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dinas;
- h) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- i) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas sekretaris dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian. Sementara itu, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis administrasi umum dan kepegawaian.
- b) Melaksanakan bimbingan, perencanaan, evaluasi administrasi umum dan kepegawaian.
- c) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, tugas dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan Pengumpulan bahan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
- d) Melaksanakan pembinaan terhadap urusan umum yang meliputi bidang ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, humas, protokol dan perpustakaan;
- e) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan dan ekspedisi;
- f) Melakukan koordinasi pengelolaan kepegawaian dan non tenaga kependidikan;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan

- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar yang meliputi TK, SD dan SLB. Sementara untuk fungsi yang diemban Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:

- a) Penyiapan perumusan, kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pendidikan dasar
- b). Melaksanakan bimbingan, perencanaan, evaluasi pendidikan dasar.
- c). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas Bidang Pendidikan Dasar meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan Pengumpulan bahan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang pendidikan dasar;
- d) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan dasar;
- e) Melaksanakan urusan kurikulum dan kesiswaan pendidikan dasar;
- f) Melaksanakan urusan kelembagaan dan sarana pendidikan dasar;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pendidikan Dasar dibantu oleh:

1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, yang mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis tentang kurikulum dan kesiswaan TK, SD dan SLB.

Uraian tugas Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar dan SLB meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis tentang kurikulum dan kesiswaan TK, SD, dan SLB;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengembangan kurikulum dan kesiswaan TK, SD, dan SLB;
- e) Melaksanakan kegiatan kesiswaan TK, SD, dan SLB;
- f) Melakukan pengelolaan kurikulum TK, SD, dan SLB;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan, yang mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis tentang peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan TK, SD, dan SLB.

Uraian tugas Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar dan SLB meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis tentang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan TK, SD dan SLB;

- d) Melaksanakan pembinaan, pengembangan serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan TK, SD dan SLB;
- e) Mengangkat dan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan TK, SD dan SLB;
- f) Melakukan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan TK, SD, dan SLB;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan, yang mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis tentang kelembagaan dan sarana pendidikan TK, SD, dan SLB.

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan umum dan teknis tentang kelembagaan dan sarana pendidikan TK, SD, dan SLB;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengembangan kelembagaan dan sarana pendidikan TK, SD, dan SLB;
- e) Melaksanakan kegiatan evaluasi belajar tahap akhir nasional tingkat TK, SD, dan SLB;
- f) Penyelenggarakan koordinasi administrasi sekolah TK, SD, dan SLB;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, dan

- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Bidang Pendidikan Menengah

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah yang meliputi SMP, SMU dan SMK. Sementara untuk fungsi yang diemban Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:

- a) Penyiapan perumusan, kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pendidikan menengah
- b) Melaksanakan bimbingan, perencanaan, evaluasi pendidikan menengah.
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pendidikan Menengah meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang pendidikan menengah;
- d) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan menengah;
- e) Melaksanakan urusan kurikulum dan kesiswaan pendidikan menengah;
- f) Melaksanakan urusan kelembagaan dan sarana pendidikan menengah;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pendidikan Dasar dibantu oleh:

1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan,

yang mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis tentang peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan SMP, SMU, dan SMK.

Uraian tugas Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan umum dan teknis tentang peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan SMP, SMU, dan SMK;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengembangan serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan SMP, SMU, dan SMK;
- e) Mengangkat dan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan SMP, SMU, dan SMK ;
- f) Melakukan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMP, SMU, dan SMK;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, yang mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis tentang kurikulum dan kesiswaan SMP, SMU dan SMK. Uraian tugas Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;

- c) Melaksanakan kebijakan umum dan teknis tentang kurikulum dan kesiswaan SMP, SMU dan SMK;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengembangan kurikulum dan kesiswaan SMP, SMU dan SMK;
- e) Melaksanakan kegiatan kesiswaan SMP, SMU dan SMK;
- f) Melakukan pengelolaan kurikulum SMP, SMU dan SMK;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan, yang mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis tentang kelembagaan dan sarana pendidikan SMP, SMU, dan SMK. Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan Menengah meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan umum dan teknis tentang kelembagaan dan sarana pendidikan SMP, SMU dan SMK;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengembangan kelembagaan dan sarana pendidikan SMP, SMU, dan SMK;
- e) Melaksanakan kegiatan evaluasi belajar tahap akhir nasional tingkat SMP, SMU, dan SMK;
- f) Menyelenggarakan koordinasi administrasi sekolah SMP, SMU dan SMK;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan

- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Olahraga

Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, mensosialisasikan dan melaksanakan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten serta memfasilitasi pemerintah daerah dalam akreditasi pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal . Sementara untuk fungsi yang diemban Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:

- a) Penyiapan perumusan, kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pendidikan luar sekolah dan pengembangan olahraga.
- b) Melaksanakan bimbingan, perencanaan, evaluasi pendidikan luar sekolah dan pengembangan olahraga.
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang PLS dan PO dibantu oleh:

1) Seksi Kepemudaan dan Kewirausahaan, yang tugas melakukan sebagian tugas dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis tentang kepemudaan dan kewirausahaan. Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan Menengah meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan umum dan teknis tentang kepemudaan dan kewirausahaan;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengembangan kepemudaan dan kewirausahaan;

- e) Melaksanakan kegiatan kepemudaan dan kewirausahaan;
- f) Melakukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pada seksi kepemudaan dan kewirausahaan;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Seksi Olahraga dan Industri Olahraga, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dinas dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis tentang keolahragaan dan industri olah raga.

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan Menengah meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan kebijakan umum dan teknis tentang keolahragaan dan industri olah raga;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengembangan keolahragaan dan industri olah raga;
- e) Melaksanakan kegiatan keolahragaan dan industri olah raga;
- f) Melakukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pada seksi keolahragaan dan industri olah raga;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan PLS & PO dalam hal merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan

Pendidikan Non Formal dan Informalsehingga tersedia tenaga kerja/lulusan yang berkualitas dengan meningkatkan relevansi dengan kebutuhan tenaga kerja.

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan Menengah meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan umum dan teknis tentang pendidikan non formal dan informal;
- d) Membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas seksi pendidikan anak usia dini dan taman anak-anak;
- e) Menginventarisasi permasalahan bidang pendidikan anak usia dini dan taman anak-anak;
- f) Membina dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pemberdayaan pendidikan anak usia dini dan taman anak-anak; Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- g) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, mengembangkan potensi budaya dan pariwisata.

Sementara untuk fungsi yang diemban Bidang Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a) Penyiapan perumusan, kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pariwisata dan budaya.
- b) Melaksanakan bimbingan, perencanaan, evaluasi di bidang pariwisata dan budaya.

- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dibantu oleh:

1) Seksi Seni Budaya, yang mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Uraian tugas Seksi Seni Budaya meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan umum dan teknis tentang pengembangan seni dan budaya;
- d) Membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan seni dan budaya
- e) Menginventarisasi permasalahan bidang seni budaya;
- f) Membina dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pemberdayaan seni budaya;
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seni budaya;
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Seksi Objek dan Sarana Wisata, yang mempunyai tugas mengembangkan dan membangun objek dan sarana wisata yang ada di Kabupaten sehingga dapat menjadi daya tarik dan ciri khas dan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Uraian tugas Seksi Objek dan Sarana Wisata meliputi:

- a) Menyusun rencana dan program kerja;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan umum dan teknis tentang pengembangan Objek dan Sarana Wisata;

- d) Membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan Objek dan Sarana Wisata
- e) Menginventarisasi permasalahan bidang Objek dan Sarana Wisata;
- f) Membina dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pemberdayaan Objek dan Sarana Wisata
- g) Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Objek dan Sarana Wisata
- h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu :

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1) *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah*

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 5 disebutkan Tugas Pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantuan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru,

evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Berdasarkan Permen PAN & RB tersebut di atas, lingkup tugas pengawas sekolah meliputi :

1. Pengawasan akademik, mencakup antara lain :
 - a. Pembinaan guru.
 - b. Pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah terdiri atas : Standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian pendidikan
 - c. Penilaian kinerja guru
 - d. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru
 - e. Penilaian Kinerja Guru Pemula dalam program Induksi Guru Pemula (berkaitan dengan pemberlakuan Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
 - f. Pengawasan pelaksanaan Program Induksi Guru Pemula
2. Pengawasan manajerial, mencakup antara lain ;
 - a. Pembinaan Kepala sekolah
 - b. Pemantauan pelaksanaan standard nasional pendidikan yang terdiri atas : standard pendidik dan tenaga kependidikan, standard pengelolaan, standard sarana dan prasana, serta standard pembiayaan
 - c. Penilaian kinerja kepala sekolah

2.2. SUSUNAN DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

2.3.SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Semenjak pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Dalam undang-undang tersebut sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang proposional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan, serta bersih KKN. Dengan kata lain kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara khususnya Pegawai negeri.

Oleh karena itu masalah sumber daya manusia mulai dulu hingga kini menjadi topik yang penting dan terus menerus menjadi bahan pembicaraan hangat di berbagai kalangan dan dalam berbagai kesempatan, karena sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan

mampu menjawab segala tantangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pendidikan Kebudayaan terdiri dari Tenaga Administrasi/non teknis pendidikan dan Tenaga Fungsional/teknis pendidikan.

A. Tenaga Administrasi/Non Teknis Pendidikan

Tenaga Administrasi atau Non Teknis Pendidikan secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

No	Uraian	Golongan/PNS								Total PNS	Non PNS / PTT		Jumlah		Total
		I		II		III		IV			L	P	L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P						
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	3	2	5	2	1	-	13	1	2	10	6	16
3	Bidang Pendidikan Dasar	-	-	-	1	5	-	1	-	7	-	-	6	1	7
4	Bidang Pendidikan Menengah	-	-	-	-	3	1	2	-	6	-	-	5	1	6
5	Bidang PLS dan Pemuda Olahraga	-	-	-	1	5	1	1	-	8	-	1	6	3	9
6	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	3	-	3	2	-	-	8	1	-	7	2	9
7	Fungsional / Pengawas Sekolah	-	-	-	-	-	1	5	1	7	-	-	5	2	7
8	Tenaga/Honorar Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	1	18	19
Total		-	-	6	4	21	7	11	1	50	3	21	41	33	74

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Menurut Ijazah Tertinggi
Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

No	Uraian	Ijazah Tertinggi										Jumlah		Total
		SMP		SMA		Diploma		S1		S2				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	1	1	1	1	7	2	-	-	9	4	13
3	Bidang Pendidikan Dasar	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	6	1	7
4	Bidang Pendidikan Menengah	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	5	1	6
5	Bidang PLS dan Pemuda Olahraga	-	-	-	-	4	-	2	1	1	-	7	1	8
6	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	2	-	2	-	2	2	-	-	6	2	8
7	Fungsional / Pengawas Sekolah	-	-	-	-	3	-	3	1	-	-	6	1	7
Total		-	-	3	1	11	2	24	7	2	-	40	10	50

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1.	ADUM/PIM IV	11
2.	SPAMA/PIM III	1
3.	SPAMEN/PIM II	1

Jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung sampai dengan 31 Desember 2015 berjumlah 711 Orang yang bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung terdiri atas Guru PNS sebanyak 542, TU PNS sebanyak 43 orang, Guru Honorer sebanyak 83 orang dan Guru Swasta sebanyak 43 orang.

Tabel 2.4
Jumlah Tenaga Fungsional Guru
Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

No	Uraian	Guru PNS	TU PNS	Guru Honor	Guru Swasta	Jumlah
1	PAUD	0	0	0	210	210
2	TK	6	0	0	29	35
3	S D	343	22	50	14	429
4	S M P	111	16	23	0	150
5	S M A	82	5	10	0	97
JUMLAH		542	43	83	43	711

Tabel 2.5
Jumlah Tenaga Fungsional Guru Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

NO	URAIAN	JENJANG PENDIDIKAN TERAKHIR								JUMLAH
		SMP	SMA/SMK	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	PAUD	15	166	1	1	3	24	0	0	210
2	TK	2	27	0	1	2	3	0	0	35
3	S D	13	143	0	53	4	183	19	0	415
4	S M P	3	13	1	4	9	109	11	0	150
5	S M A	0	5	0	0	1	91	0	0	97
JUMLAH		18	188	1	58	16	386	30	0	697

Tabel 2.6
Jumlah Tenaga Fungsional Guru Sertifikasi
Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

NO	URAIAN	TAHUN SERTIFIKASI							JUMLAH
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	TK	-	-	-	-	-	-	-	0
2	SD	2	14	-	2	31	-	1	50
3	SMP	2	7	-	-	1	-	-	10
4	SMA	2	3	-	3	3	-	-	11

Dari data diatas dapat diketahui dari segi jumlah guru yang mengajar sudah cukup memadai, hanya saja dari segi kualitas, masih banyak terdapat guru yang belum atau bahkan tidak layak mengajar dikarenakan tingkat pendidikan, sertifikasi maupun pendukung lainnya yang belum dimiliki oleh guru yang bersangkutan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sementara itu, untuk mendukung kinerja, kegiatan dan aktivitas yang dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung telah memiliki perlengkapan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

No.	Rincian	Jumlah
1	Motor Pintar	2
2	Mobil Pintar	1
3	Motor Dinas	12
4	Mobil Dinas	3
5	Laptop	40
6	Printer	20
7	Mesin Fotocopy	0
8	Mesin tik	5
9	PC/Komputer	9
10	AC	10
11	Dan seterusnya	-

BAB III KEADAAN UMUM

3.1. NON KEPENDIDIKAN

3.1.1. Administrasi Pemerintahan Daerah, Geografis, Ekonomi dan Sosial Budaya

Demografi Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten termuda di wilayah Propinsi Kalimantan Utara, yang terletak tengah Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya pada posisi 3° 12" 02" - 3° 46" 41" LU dan 116° 42" 50" 117° 49" 50" Bujur Timur. Kabupaten Tana Tidung terletak pada ketinggian yang berkisar antara 0 - 1500 m di atas permukaan laut. Di sebelah utara, Kabupaten Tana Tidung berbatasan dengan Kabupaten Nunukan, di sebelah Timur berbatasan dengan laut Sulawesi ,(Kabupaten Bulungan), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan,, serta di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau semuanya dalam Provinsi Kalimantan Utara. Luas Wilayah Kabupaten Tana Tidung saat ini adalah 11.603,94 km², terdiri dari 5 Kecamatan dengan 29 buah Desa/Kelurahan dan empat buah UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi), serta dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 24, 375 jiwa, atau memiliki kepadatan penduduk 4.22 jiwa/Km². Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Tana Tidung adalah Kecamatan Sesayap Iir, dengan luas wilayah 1 317.53 km², dan kecamatan terkecil adalah kecamatan Tana Lia dengan luas 426, 80 KM² dengan 3 (tiga) desa. Total secara keseluruhan Kabupaten Tana Tidung secara keseluruhan, dari (5) lima kecamatan mempunyai luas 4 848,58 KM².

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya modal pembangunan . jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi yang disebut angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja. Selama kurun

waktu 2013-2014 persentase pencari kerja di Kabupaten Tana Tidung meningkat 1,91% dari 1,30% di tahun 2013 menjadi 3,21% pada tahun 2014. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2014 sebesar 58,74% atau mengalami peningkatan sebesar 0,4 persen dibanding 2013.

3.2. KEPENDIDIKAN

3.2.1. Gambaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

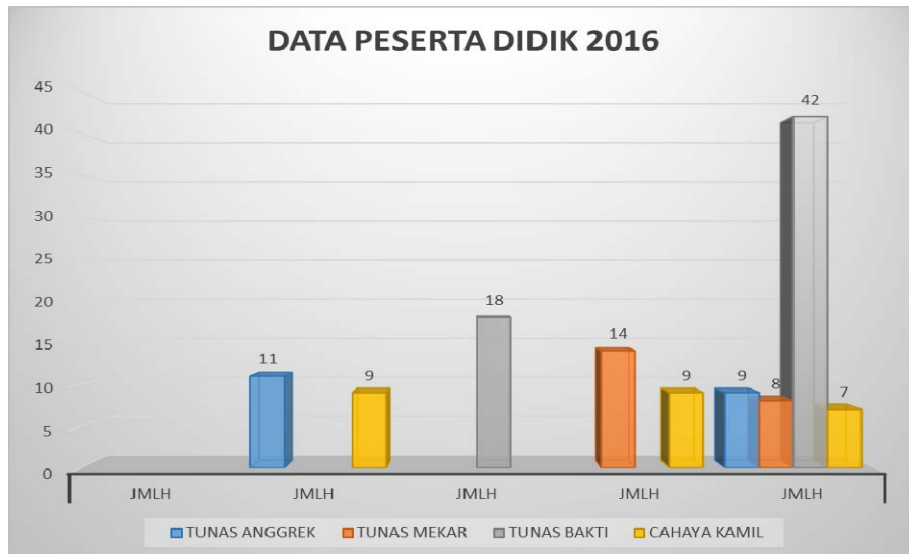
Berdasarkan hasil survey diperoleh sebanyak 42 PAUD di Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari 19 atau 45 % PAUD di Kecamatan Sesayap, 9 atau 21 % PAUD di Kecamatan Sesayap Hilir, 4 atau 10 % PAUD di Kecamatan Betayau, 5 atau 12 % PAUD di Kecamatan Muruk Rian, dan 5 atau 12 % PAUD di Kecamatan Tana Lia.

Gambar 3.1. Data Jumlah PAUD di Kabupaten Tana Tidung



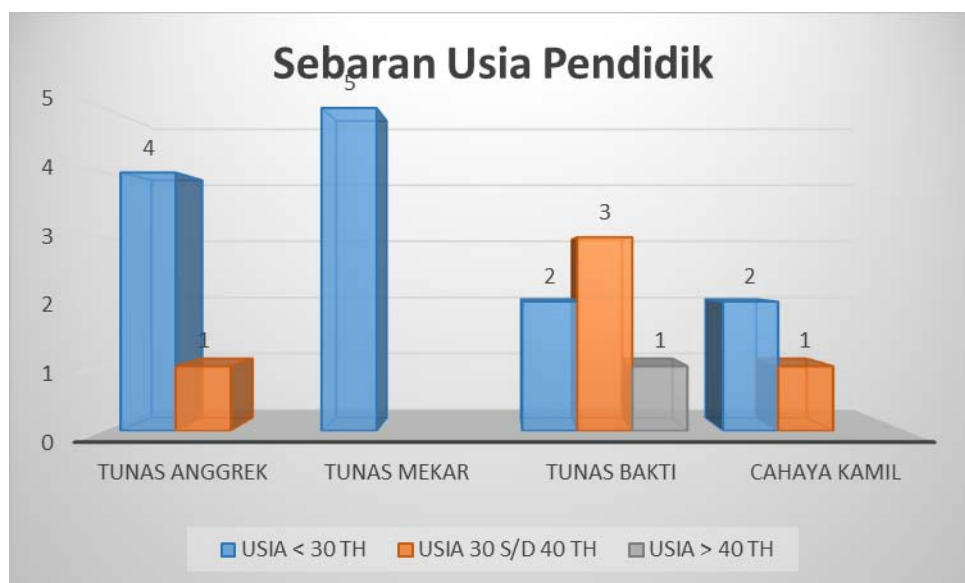
Di Kecamatan Betayau terdapat 4 PAUD dengan kondisi umum sebagai berikut:

Gambar 3.2. Data Peserta Didik PAUD Tahun 2016 di Kecamatan Betayau

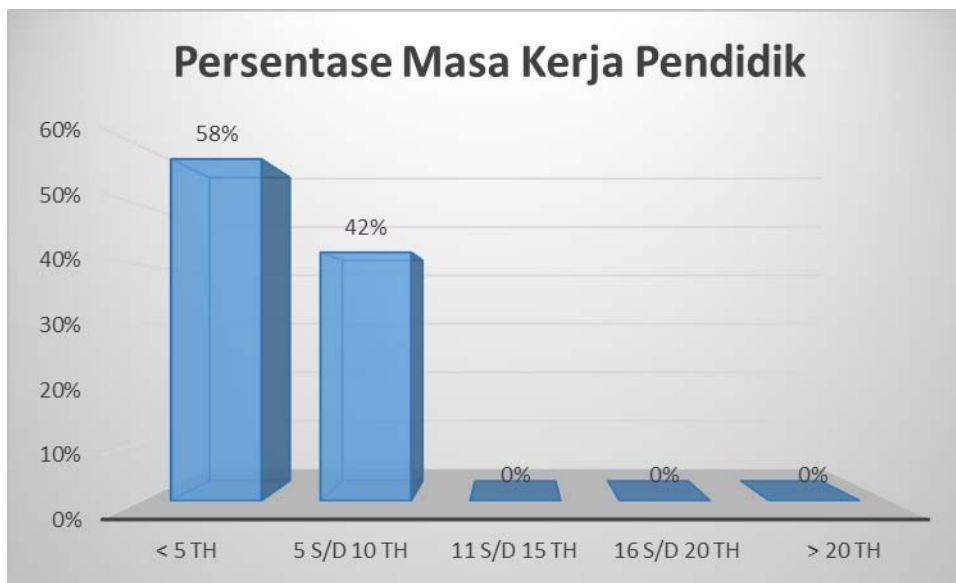


Pada tahun 2016 semua PAUD di Kecamatan Betayau mempunyai peserta didik dengan kelompok usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. KB Tunas Bakti mempunyai peserta didik terbanyak pada kelompok usia 5-6 tahun yaitu 42 peserta didik. Selain itu, KB tunas Bakti mempunyai peserta didik berumur 7 tahun.

Gambar 3.3. Sebaran Usia Pendidik PAUD di Kecamatan Betayau



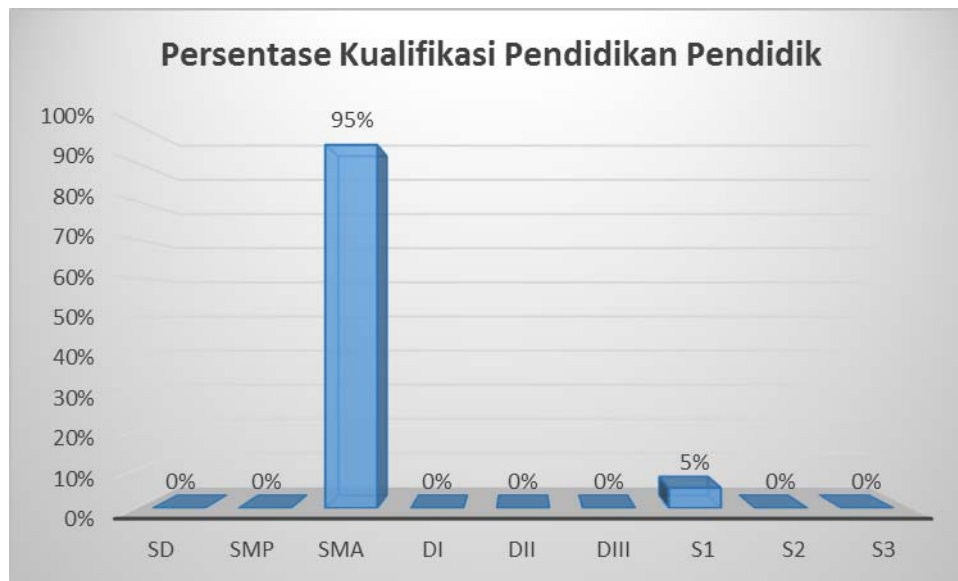
Gambar 3.4. Persentase Masa Kerja Pendidik PAUD di Kecamatan Betayau



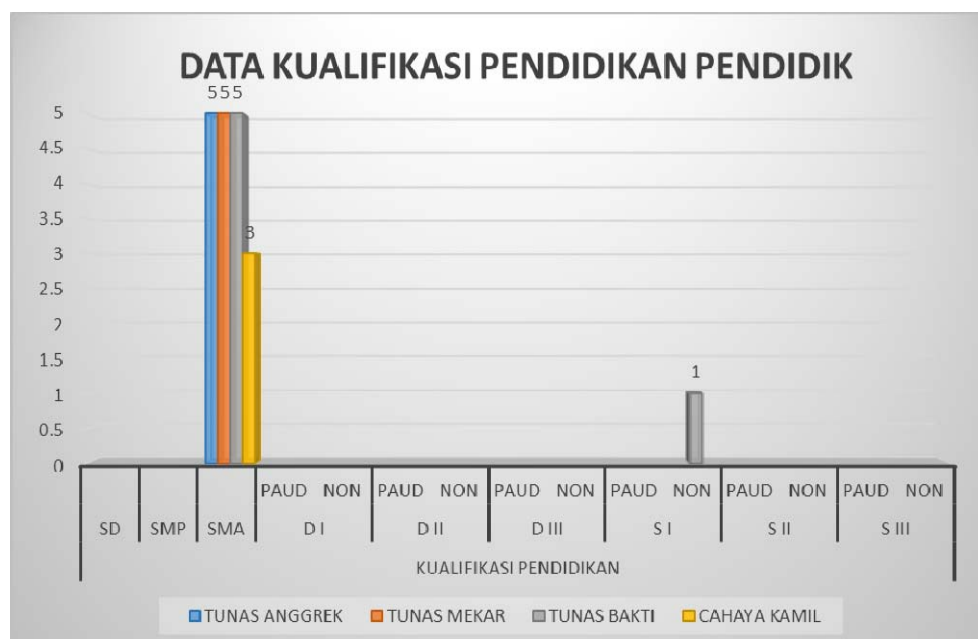
Gambar 3.5. Sebaran Masa Kerja Pendidik PAUD di Kecamatan Betayau



Gambar 3.6. Persentase Kualifikasi Pendidikan Pendidik PAUD di Kecamatan Betayau



Gambar 3.7. Sebaran Kualifikasi Pendidikan Pendidik PAUD di Kecamatan Betayau

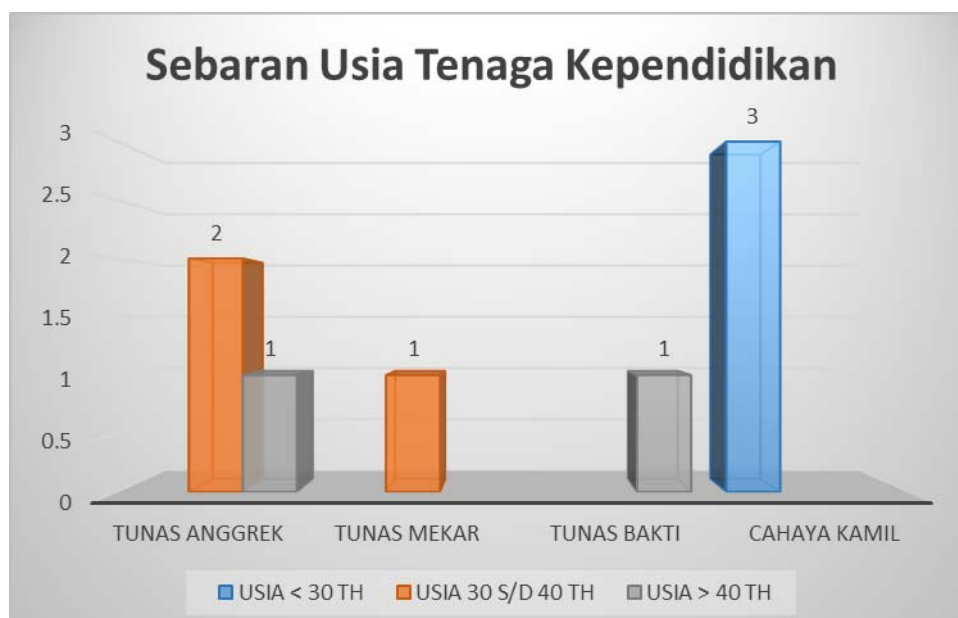


Gambar 3.8. Data Jumlah Ikut Pelatihan Pendidik PAUD di Kecamatan Betayau

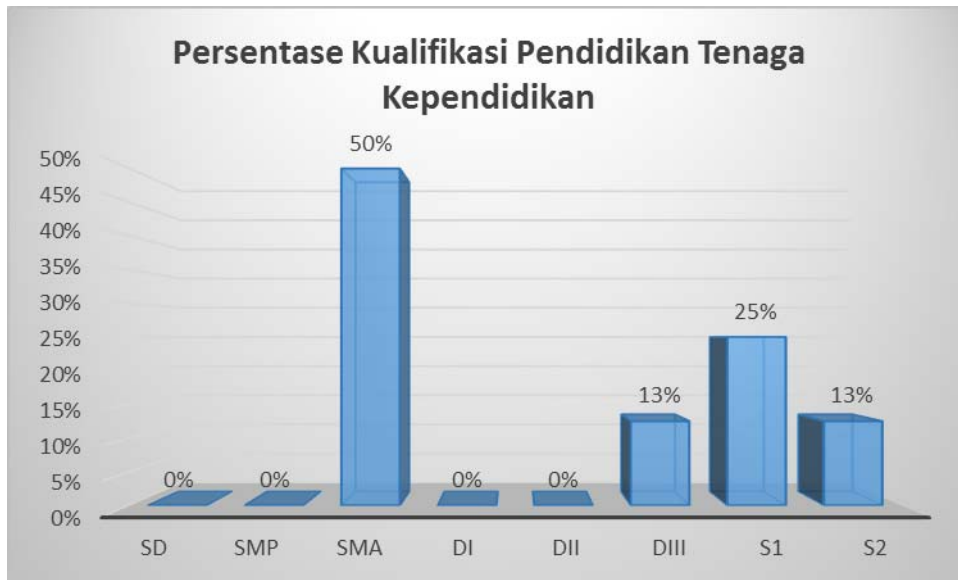


Rata-rata 70,83% pendidik PAUD di Kecamatan Betayau pernah ikut pelatihan dasar PAUD.

Gambar 3.9. Sebaran Usia Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Betayau

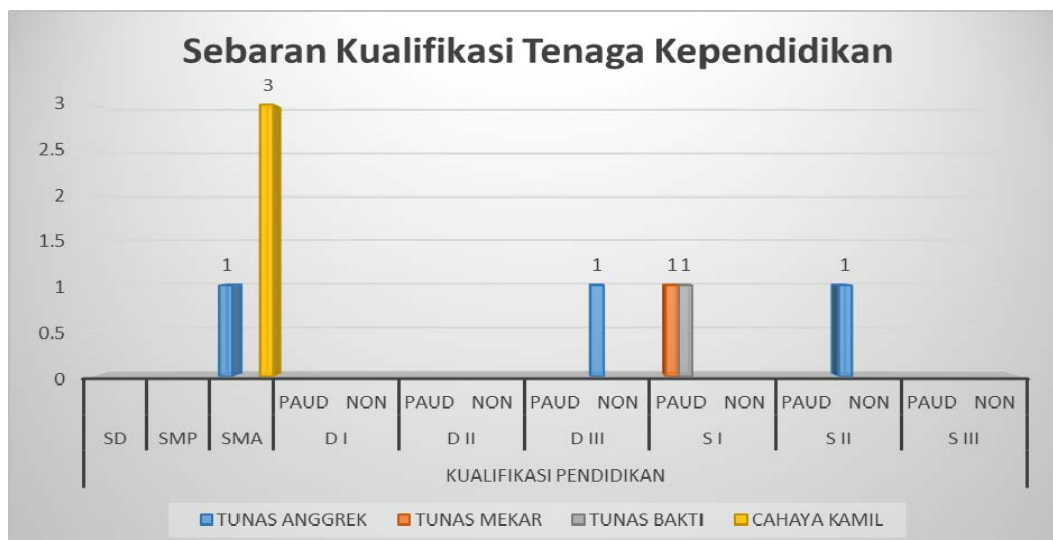


Gambar 3.10. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Betayau

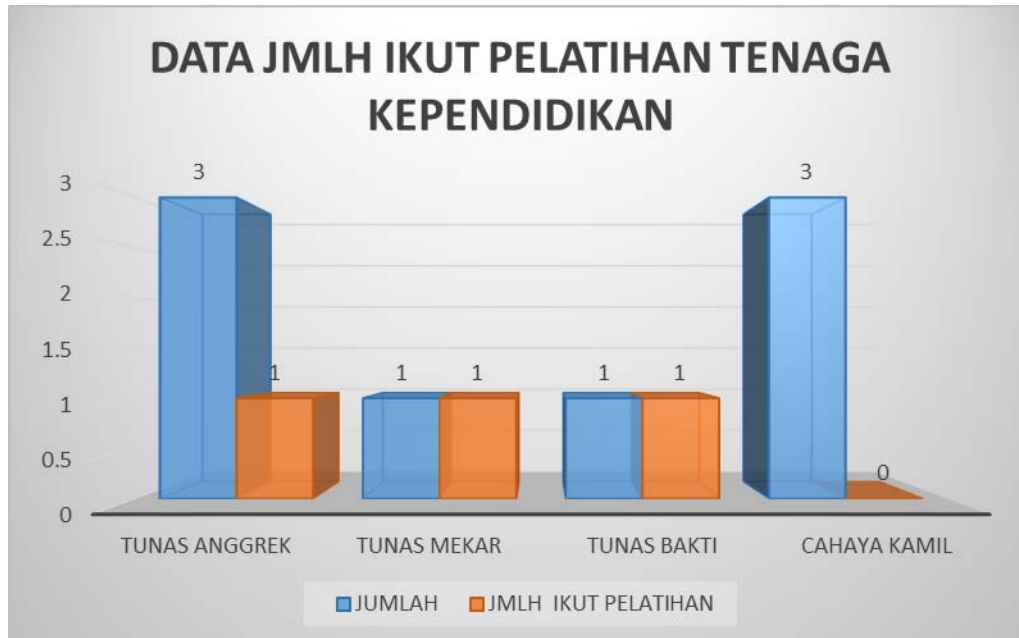


Pengelola KB Tunas Anggrek Berijasah S2. KB Tunas Mekar dan Tunas Bakti mempunyai tenaga kependidikan yang berijasah S1 PAUD.

Gambar 3.11. Sebaran Kualifikasi Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Betayau



Gambar 3.12. Data Jumlah Ikut Pelatihan Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Betayau

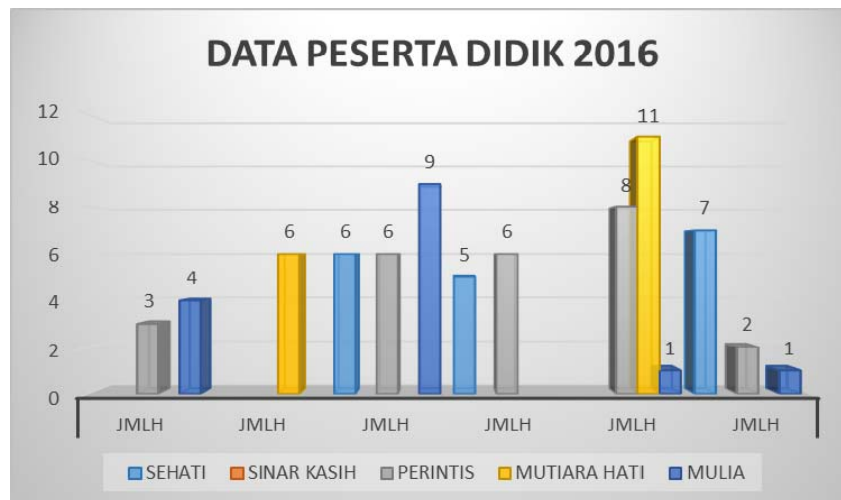


Rata-rata 58,33% tenaga kependidikan PAUD di Kecamatan Betayau pernah ikut pelatihan dasar PAUD. Tenaga Kependidikan di KB Cahaya Kamil tidak satu pun yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD.

Tenaga Kependidikan di KB Cahaya Kamil tidak layak mengelola PAUD karena tidak satu pun yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD dan hanya berijazah SMA.

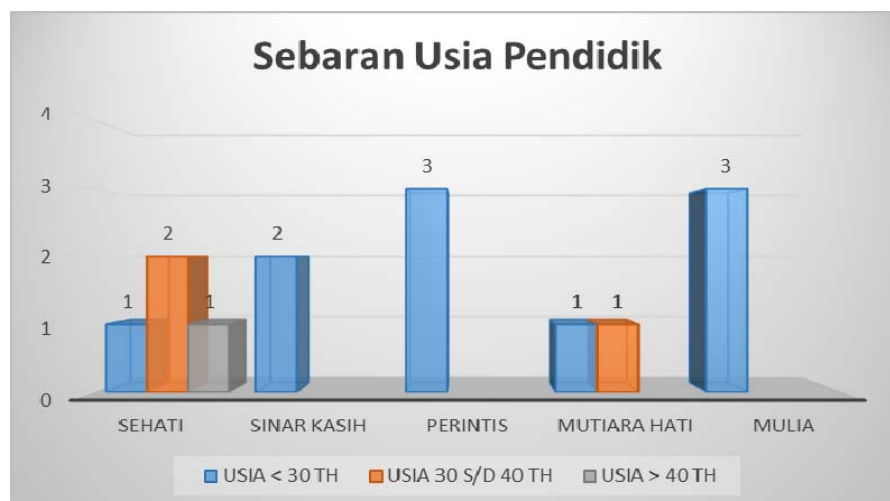
Di Kecamatan Muruk Rian terdapat 5 PAUD dengan kondisi umum sebagai berikut :

**Gambar 3.13. Data Peserta Didik PAUD di Kecamatan Muruk Rian
Tahun 2016**

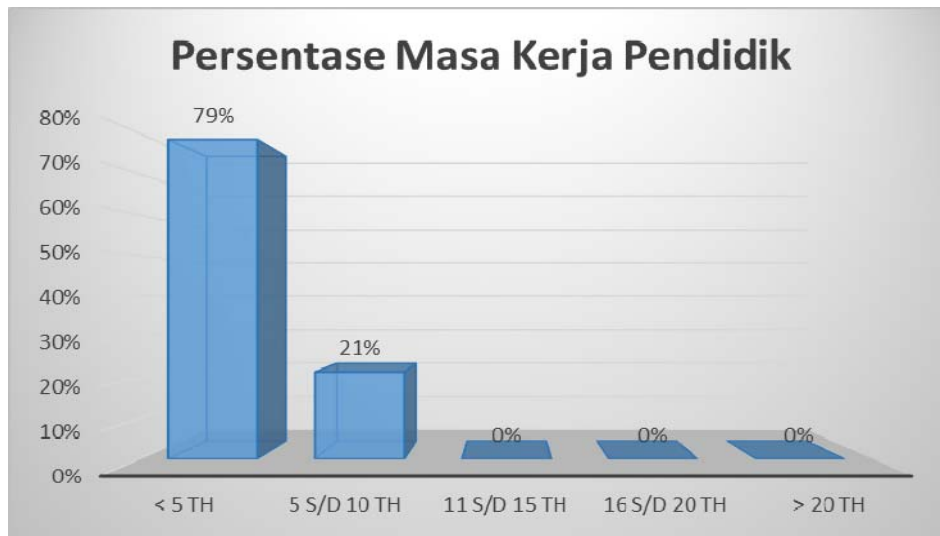


Pada tahun 2016, 80% PAUD di Kecamatan Muruk Rian memiliki peserta didik dari berbagai kelompok usia. Tetapi terlihat pada gambar di atas KB Sinar Kasih tidak memiliki peserta didik pada tahun 2016.

Gambar 3.14. Sebaran Data Usia Pendidik PAUD di Kecamatan Muruk Rian



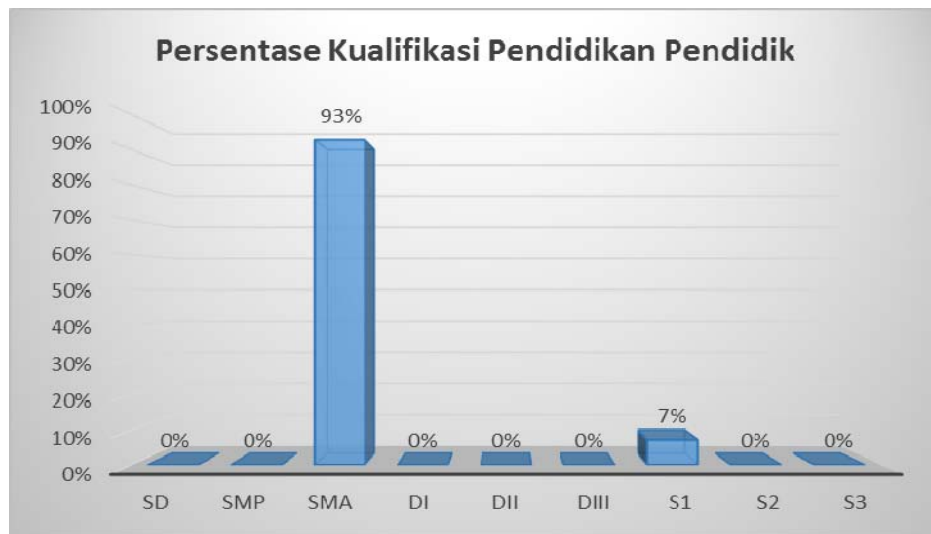
Gambar 3.15. Persentase Masa Kerja Pendidik PAUD di Kecamatan Muruk Rian



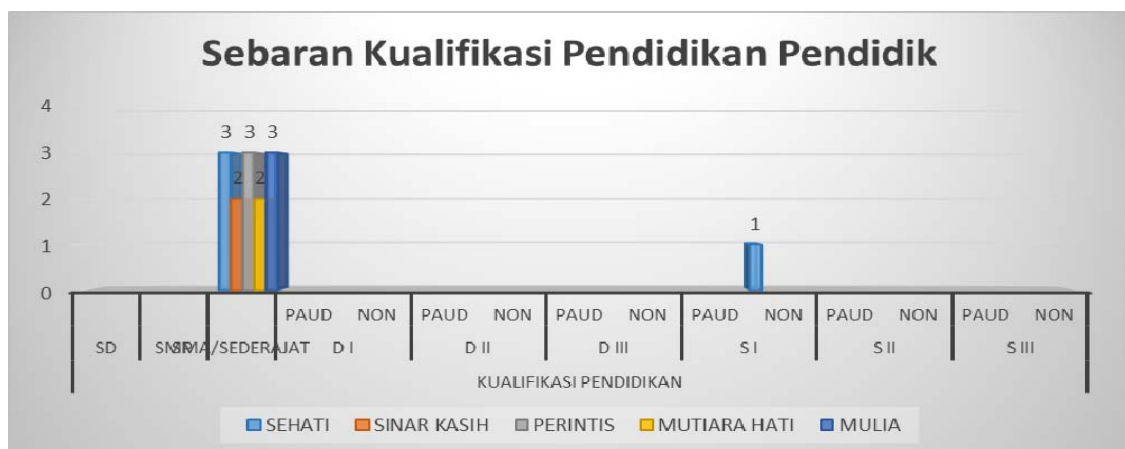
Gambar 3.16. Sebaran Data Masa Kerja Pendidik PAUD di Kecamatan Muruk Rian

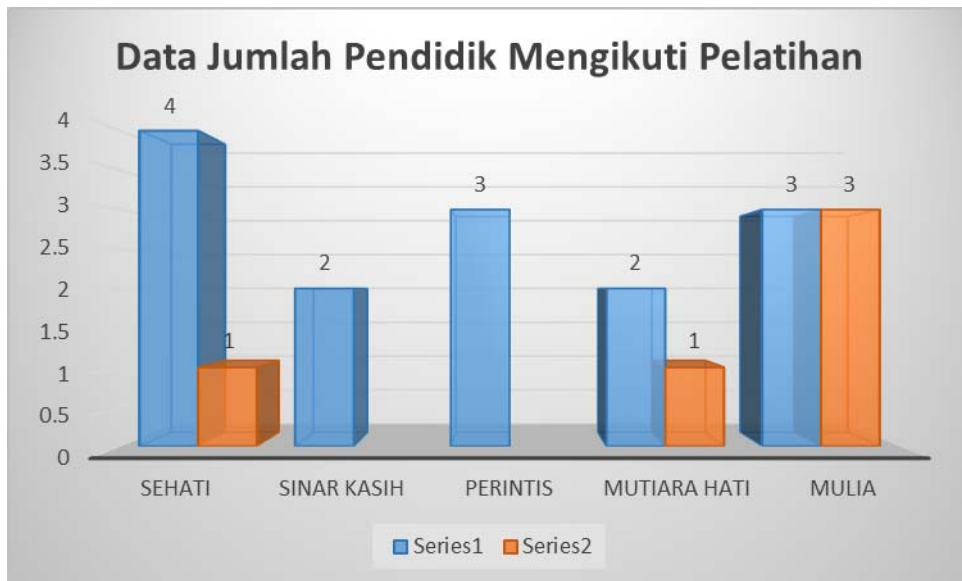


Gambar 3.17. Persentase Kualifikasi Pendidikan Pendidik PAUD di Kecamatan Muruk Rian



Gambar 3.18. Kualifikasi Pendidik PAUD di Kecamatan Muruk Rian

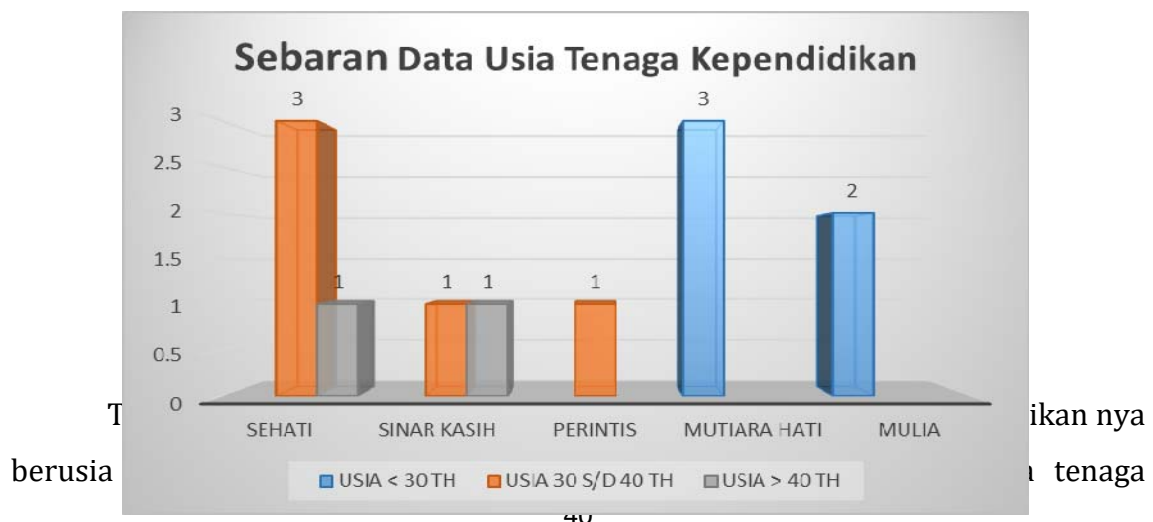




Rata-rata 35% pendidik PAUD di Kecamatan Muruk Rian yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD yaitu pendidik di KB Sehati, KB Mutiara Hati, dan KB Mulia pernah ikut pelatihan dasar PAUD. Sedangkan KB Sinar Kasih dan KB Perintis tidak satupun pendidiknya yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD.

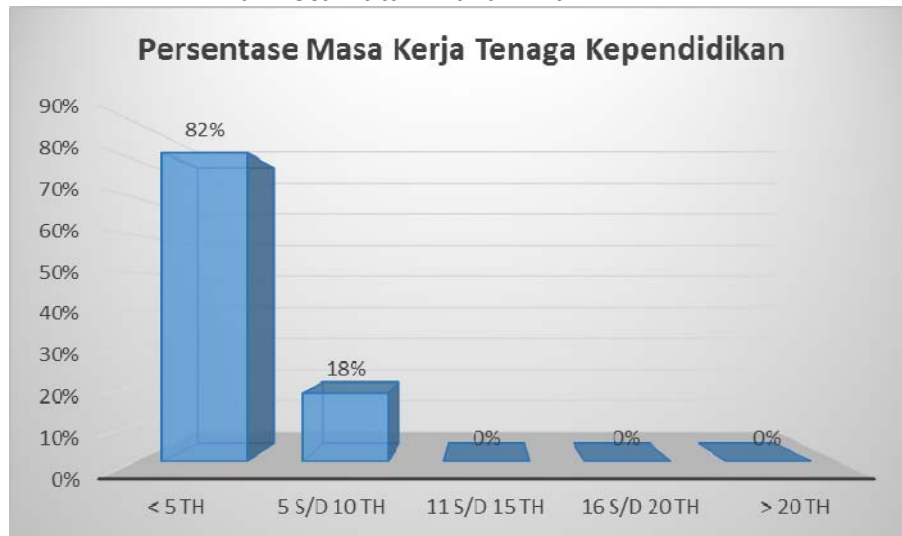
Berdasarkan data tenaga pendidik di atas diperoleh bahwa pendidik KB Sinar Kasih dan KB Perintis tidak layak untuk mendidik peserta didik pada PAUD, karena pendidik pada PAUD tersebut berijazah SMA dan tidak satu pun pendidiknya berijazah S1 PAUD atau kependidikan. Selain itu, tidak satupun pendidiknya yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD.

Gambar 3.20. Sebaran Usia Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Muruk Rian

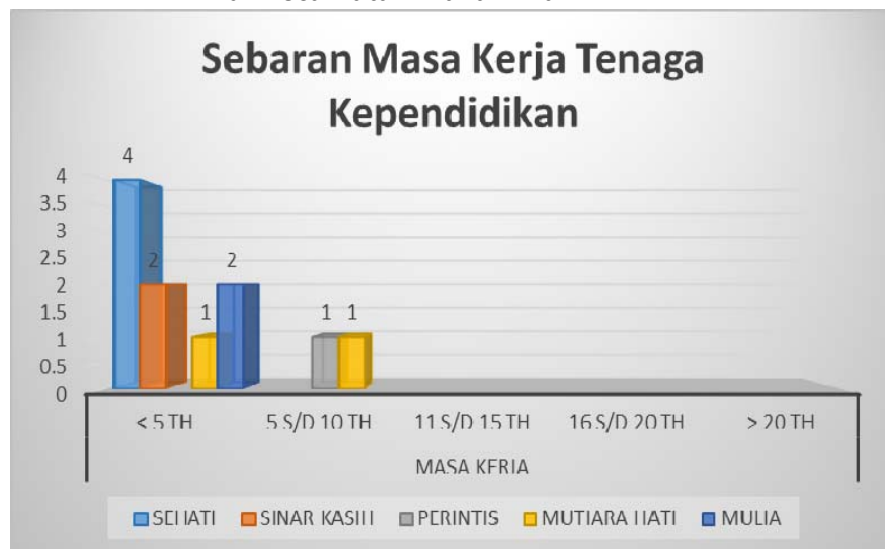


kependidikannya berusia di atas 40 tahun. Sedangkan pada KB Sehati, KB sinar Kasih tenaga kependidikannya berusia di atas 30 tahun.

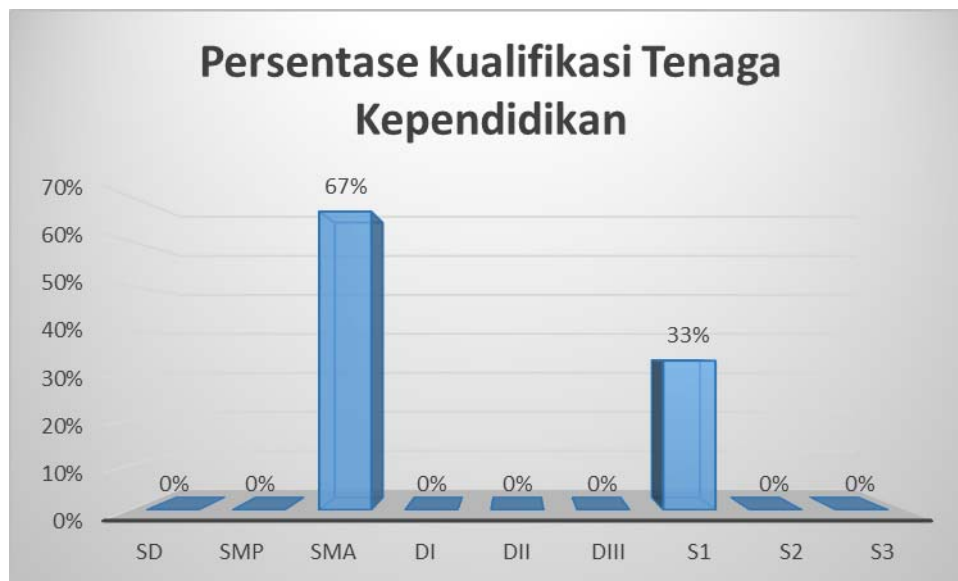
Gambar 3.21. Persentase Masa Kerja Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Muruk Rian



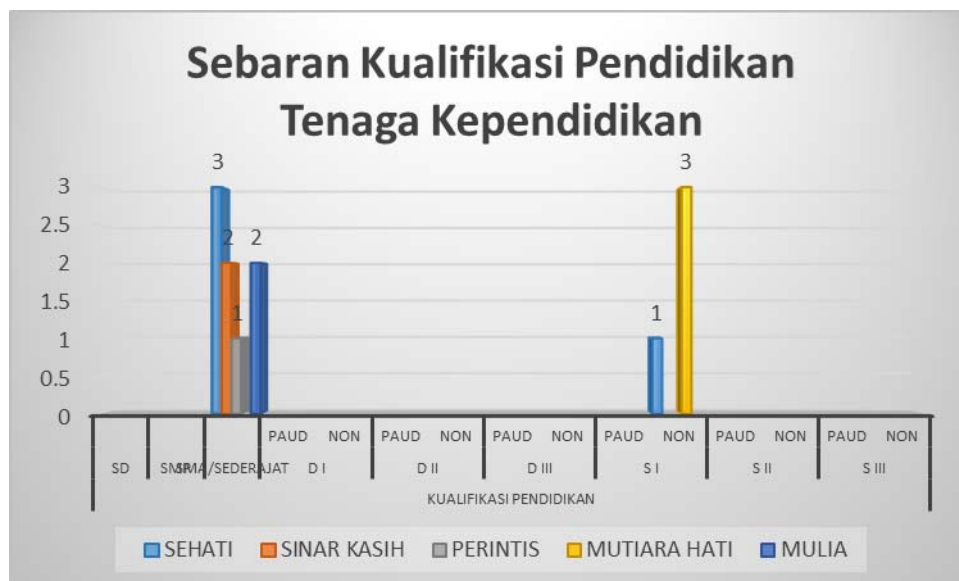
Gambar 3.22. Sebaran Masa Kerja Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Muruk Rian



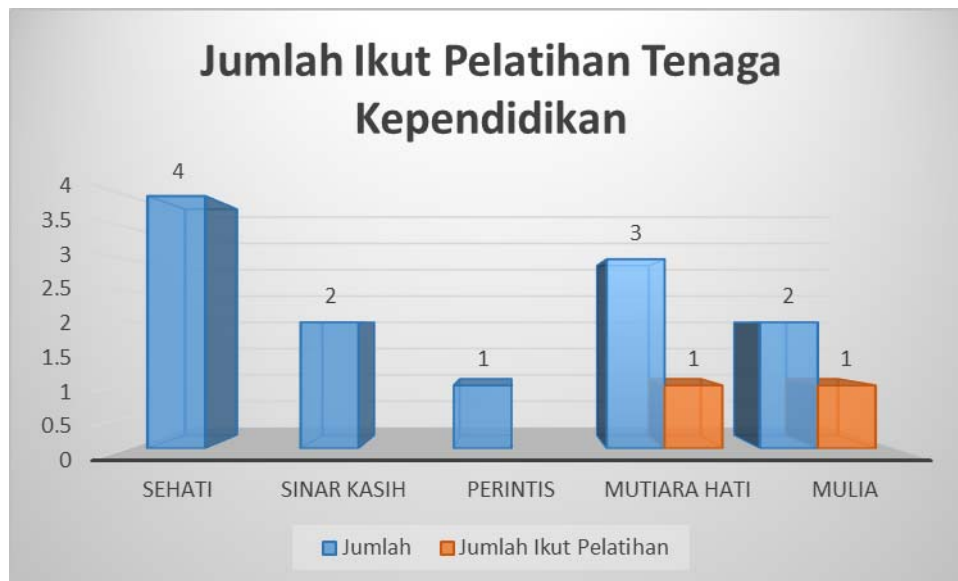
Gambar 3.23. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Muruk Rian



Gambar 3.24. Kualifikasi Pendidik PAUD di Kecamatan Muruk Rian



Gambar 3.25. Data Jumlah Pelatihan yang Diikuti Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Muruk Rian

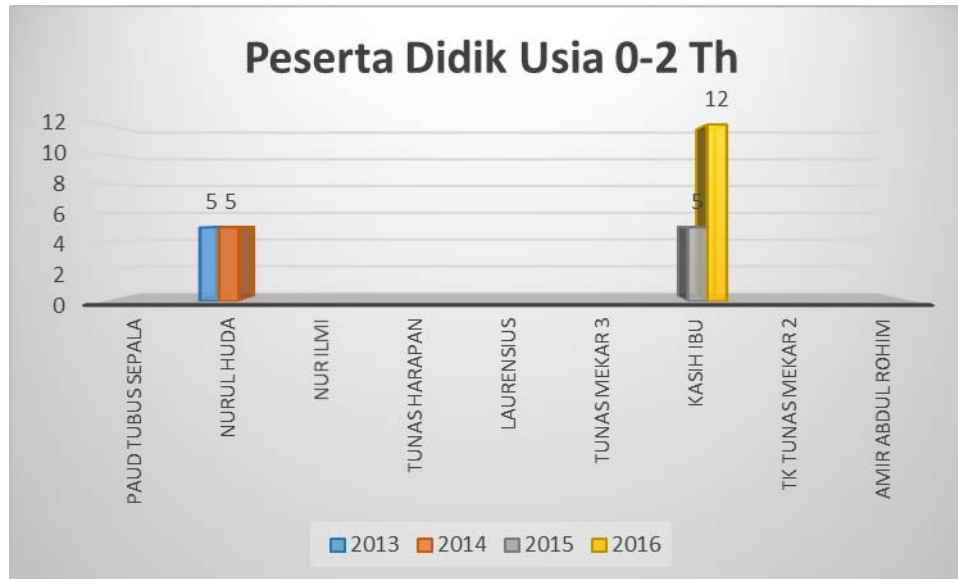


Rata-rata 16,67 % tenaga kependidikan PAUD di Kecamatan Muruk Rian yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD, yaitu KB Mutiara Hati dan KB Mulia. Sedangkan KB Sehati, Sinar Kasih, dan KB Perintis tidak satupun tenaga kependidikannya yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD.

Berdasarkan data tenaga kependidikan di atas diperoleh bahwa tenaga kependidikan KB Sehati, KB Sinar Kasih, dan KB Perintis tidak layak dalam pengelolaan PAUD, karena tidak satupun tenaga kependidikannya yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD.

Di Kecamatan Sesayap Hilir terdapat 9 PAUD dengan kondisi umum sebagai berikut :

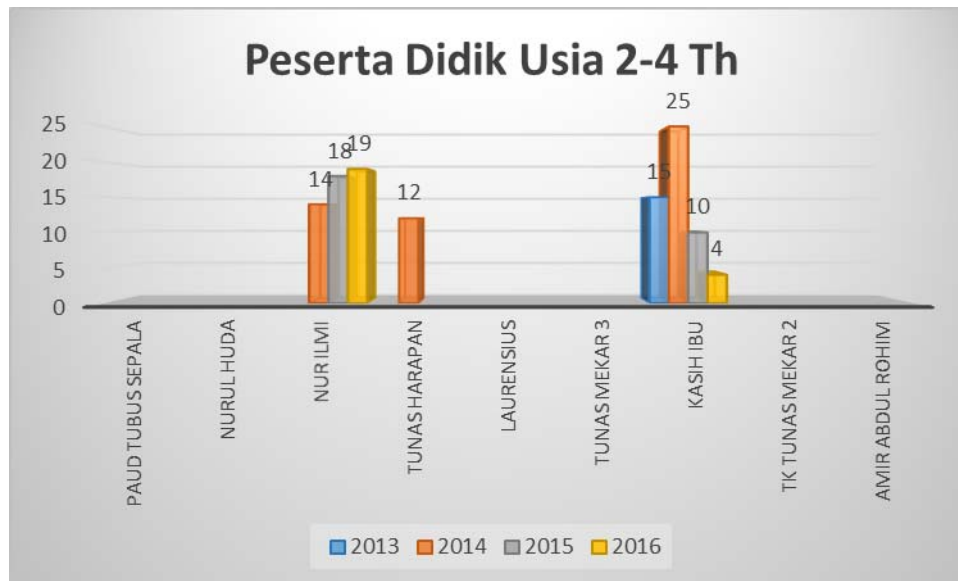
Gambar 3.26. Data Peserta Didik PAUD Usia 0-2 Tahun di Kecamatan Sesayap Hilir



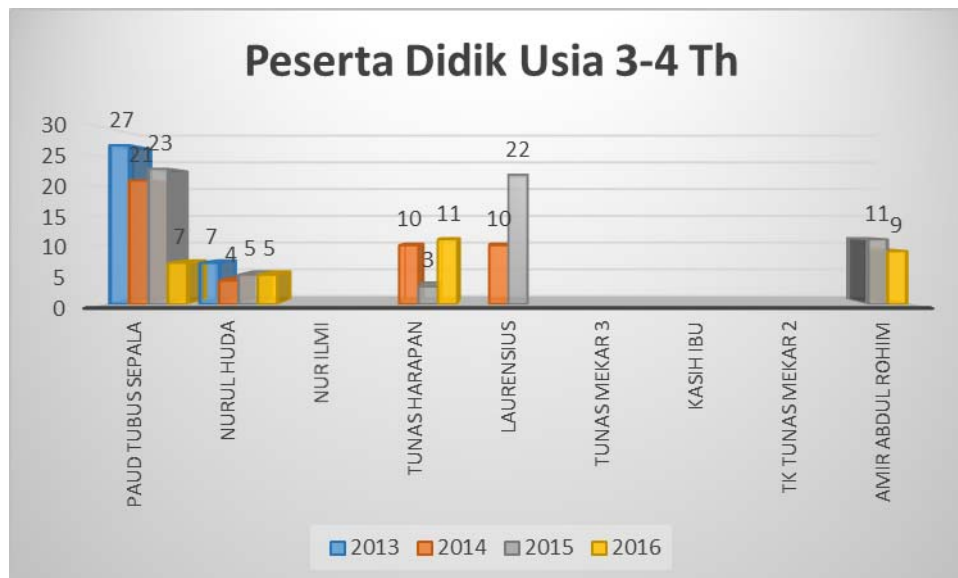
Gambar 3.27. Data Peserta Didik PAUD Usia 2-3 Tahun di Kecamatan Sesayap Hilir



Gambar 3.28. Data Peserta Didik PAUD Usia 2-4 Tahun di Kecamatan Sesayap Hilir



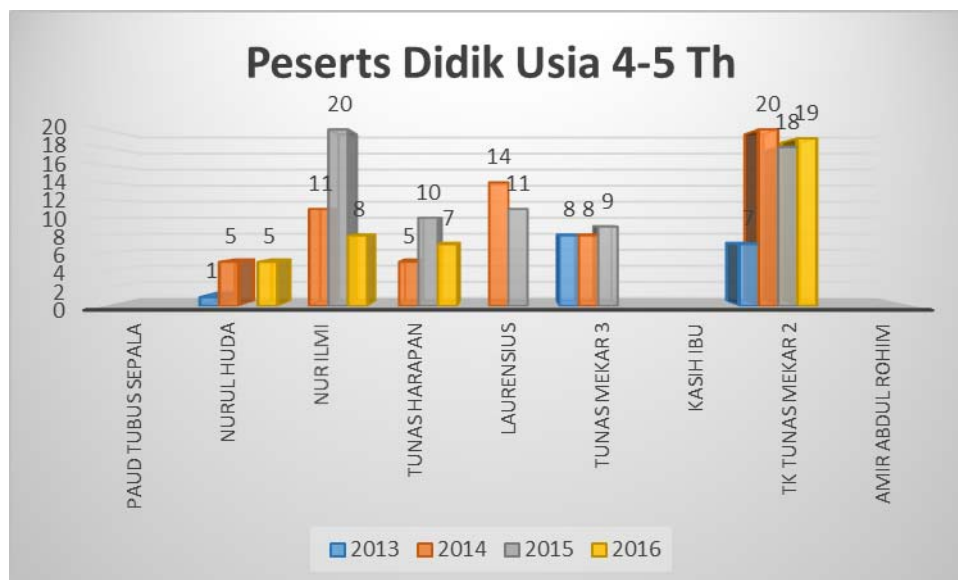
Gambar 3.29. Data Peserta Didik PAUD Usia 3-4 Tahun di Kecamatan Sesayap Hilir



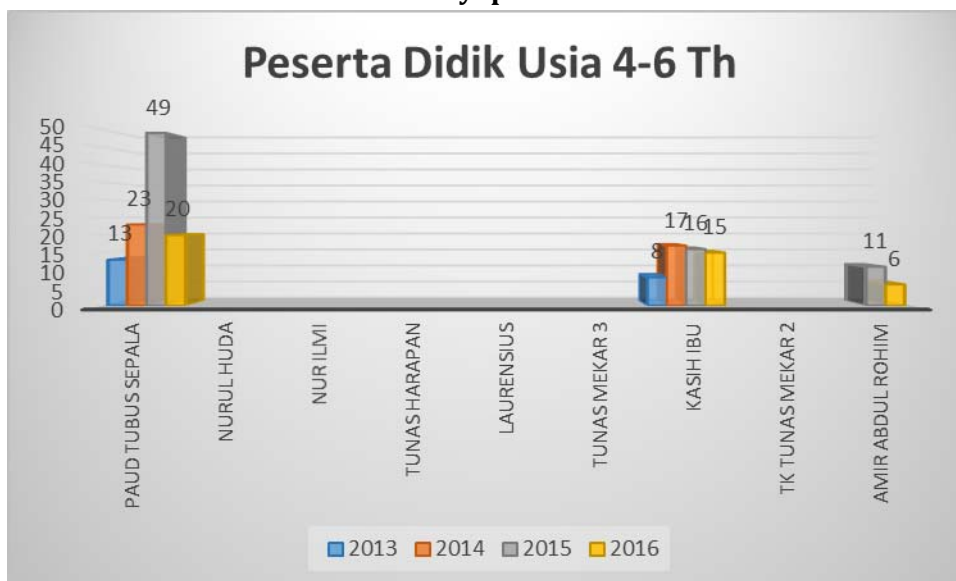
Gambar 3.30 Data Peserta Didik PAUD Usia 3-5 Tahun di Kecamatan Sesayap Hilir



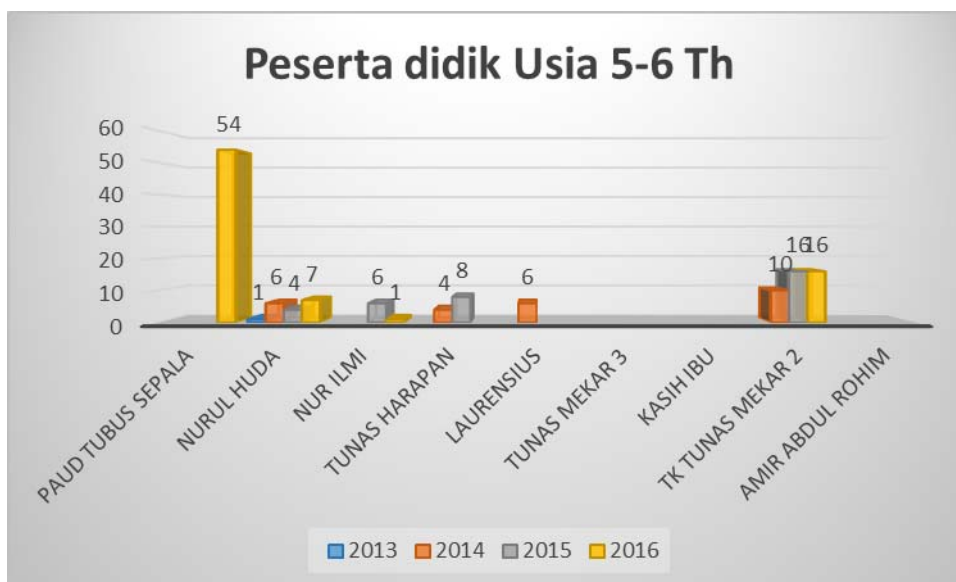
Gambar 3.31. Data Peserta Didik PAUD Usia 4-5 Tahun di Kecamatan Sesayap Hilir



Gambar 3.32. Data Peserta Didik PAUD Usia 4-6 Tahun di Kecamatan Sesayap Hilir



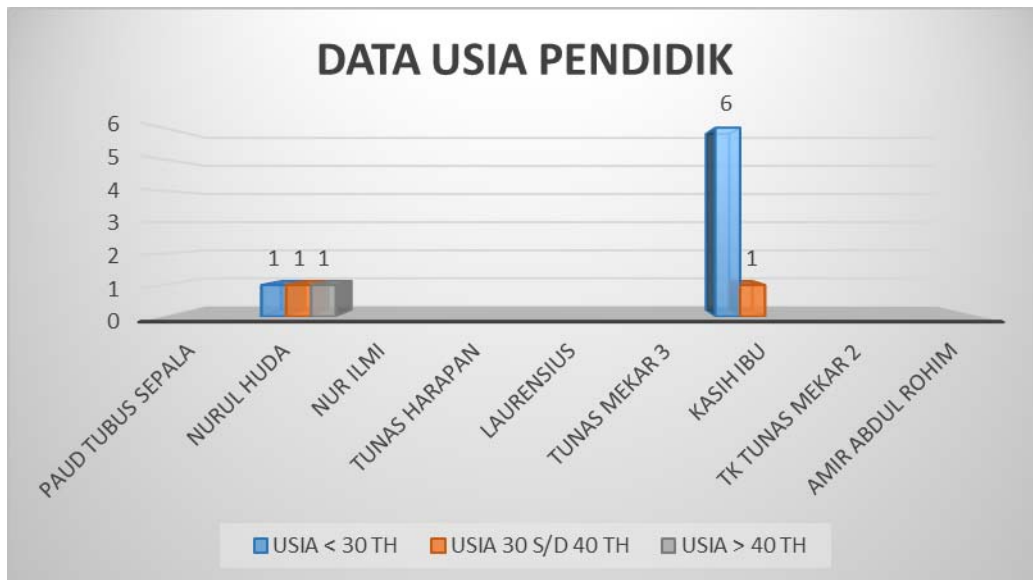
Gambar 3.33. Data Peserta Didik PAUD Usia 5-6 Tahun di Kecamatan Sesayap Hilir



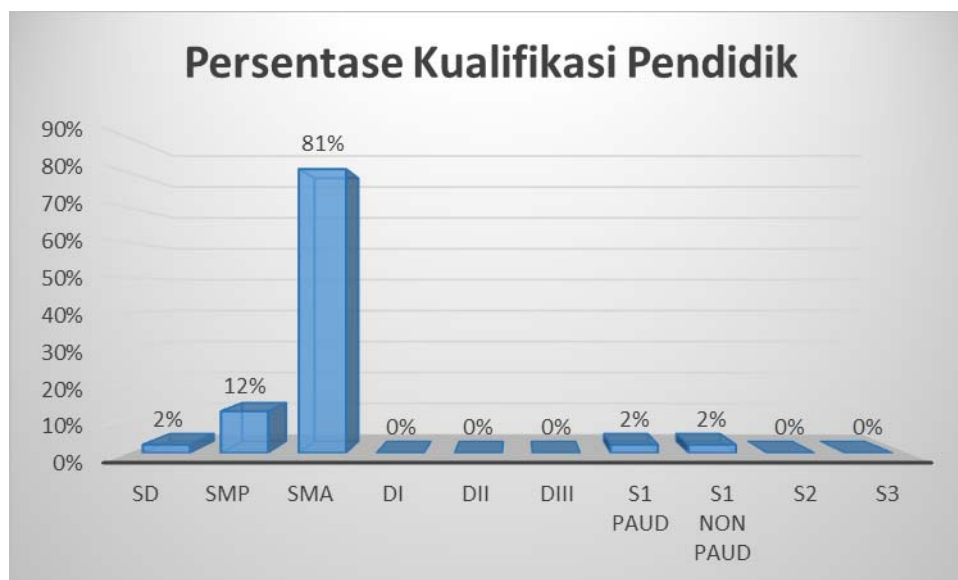
KB Nurul Ilmi, KB Tunas Harapan pada tahun 2013 tidak mempunyai peserta didik. KB Laurensius tidak mempunyai peserta didik tahun 2013 dan 2016. KB Tunas Mekar 3 tidak melampirkan data peserta didik tahun 2016. KB Amir Abdul Rohim tidak mempunyai peserta didik 2013 dan 2014. KB Kasih Ibu

mempunyai peserta didik dengan kelompok usia 3-5 tahun yang tidak sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.

Gambar 3.34. Sebaran Pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap Hilir



Gambar 3.35. Persentase Pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap Hilir

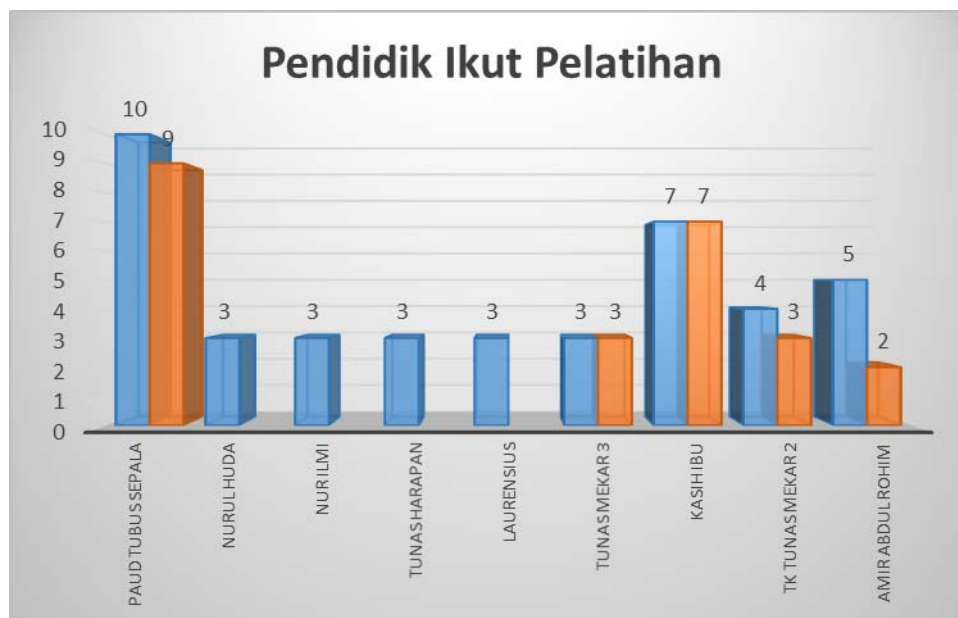


Gambar 3.36. Sebaran Pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap Hilir



KB Tunas Mekar 2 mempunyai pendidik berijasah SD. KB Nurul Ilmi, KB Tunas Harapan, KB Laurensius, dan KB Amir Abdul Rohim pendidiknya berijasah SMP.

Gambar 3.37. Jumlah Pelatihan Pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap Hilir



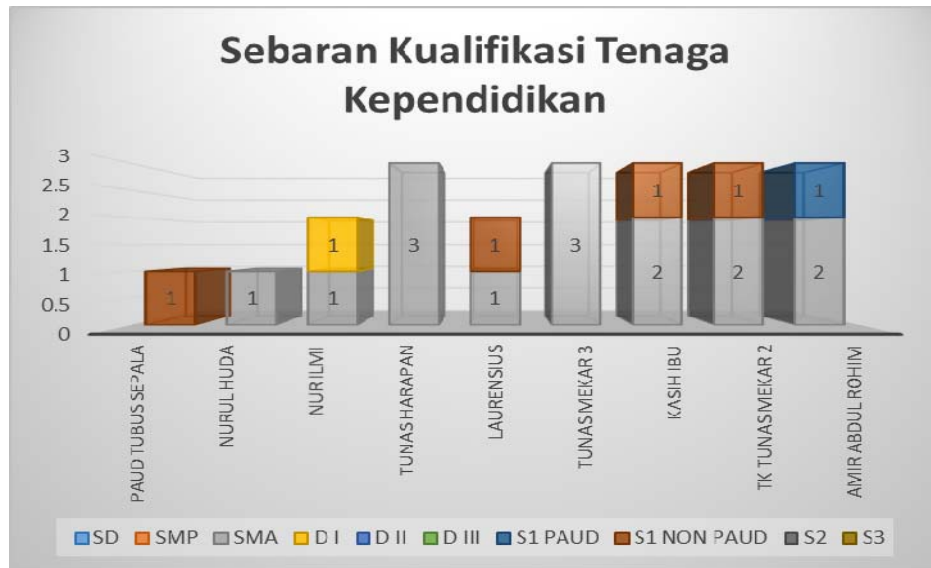
KB Nurul Huda, KB Nur Ilmi, KB Tunas Harapan, KB Laurensius tidak pernah ikut pelatihan dasar PAUD.

Pendidik KB Tunas Mekar 2, KB Nurul Ilmi, KB Tunas Harapan, KB Laurensius, dan KB Amir Abdul Rohim, KB Nurul Huda, KB Nur Ilmi, KB Tunas Harapan, KB Laurensius tidak selayaknya mengajar di PAUD tersebut karena Kualifikasi pendidikannya masih berijazah SD, SMP, dan SMA, serta belum mengikuti pelatihan dasar PAUD.

Gambar 3.38. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap Hilir



Gambar 3.39. Sebaran Kualifikasi Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap Hilir



Gambar 3.40. Jumlah Pelatihan yang Diikuti Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap Hilir

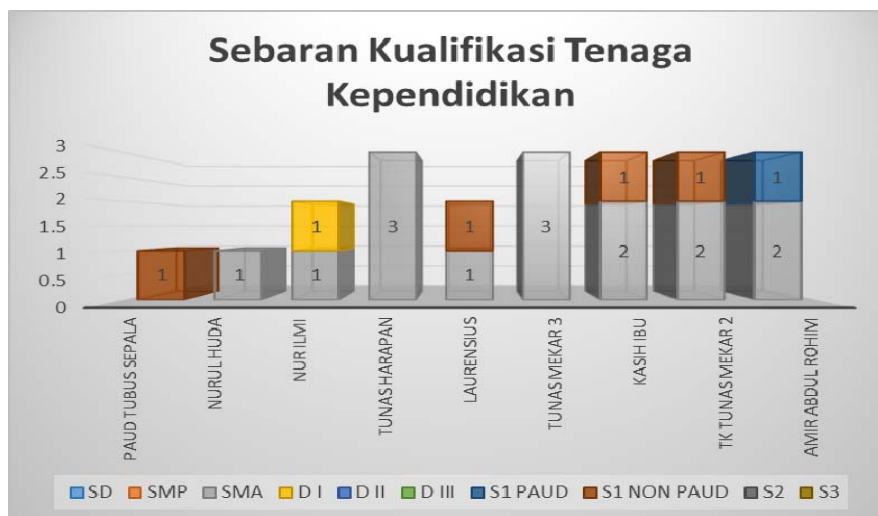


Berdasarkan gambar di atas KB Tubus Sepala, KB Nurul Huda, KB Nur Ilmi, KB Tunas Harapan, KB Laurensius, KB Tunas Mekar 2 tidak pernah ikut pelatihan dasar PAUD. Sehingga PAUD tersebut seharusnya tidak layak dalam pengelolaan PAUD.

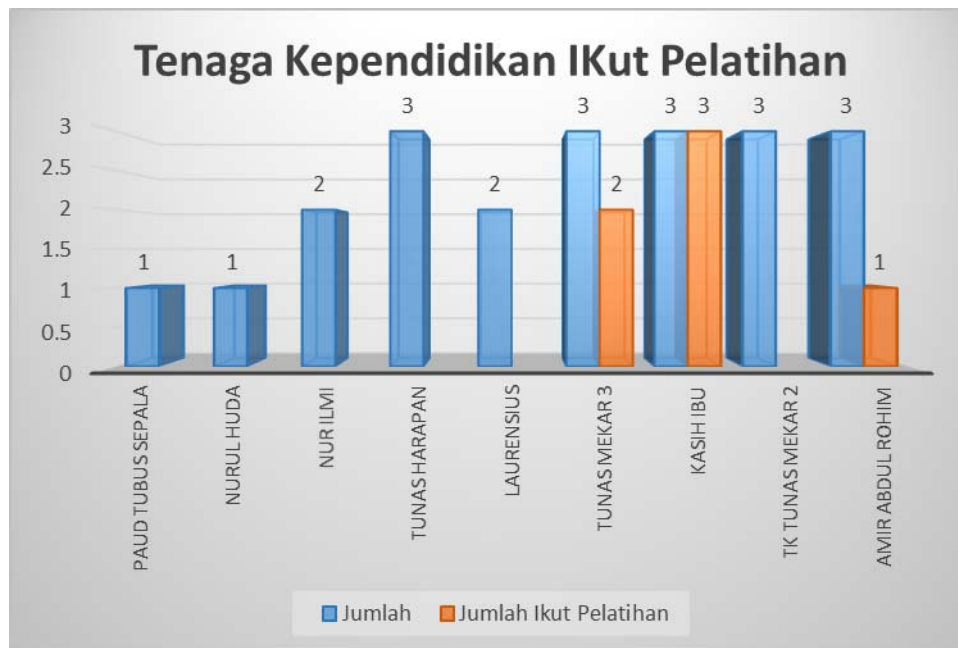
Gambar 3.41. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap Hilir



Gambar 3.42. Sebaran Kualifikasi Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap Hilir



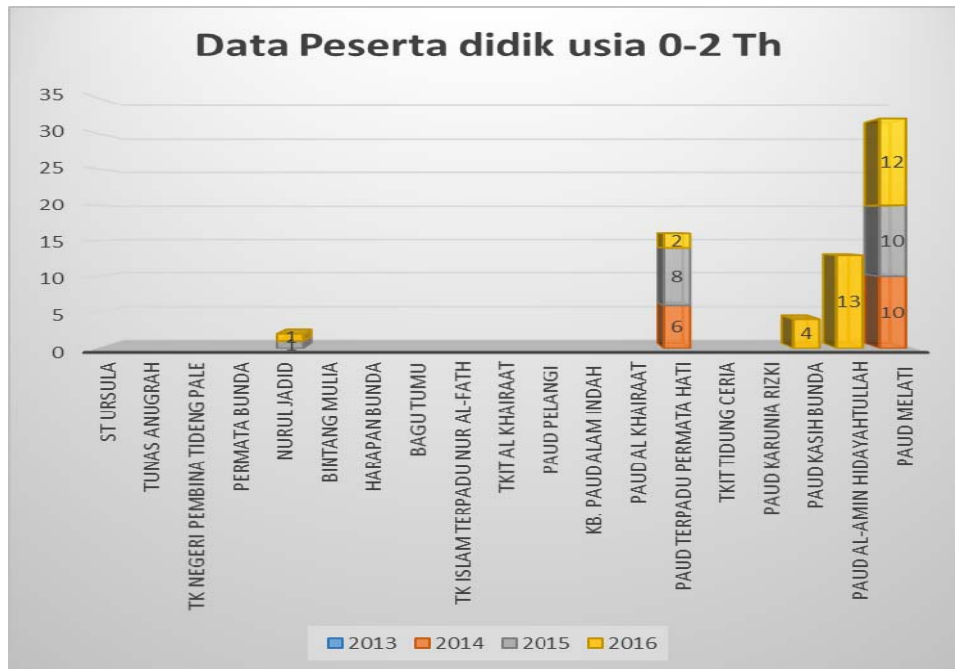
Gambar 3.43. Jumlah Pelatihan yang Diikuti Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap Hilir



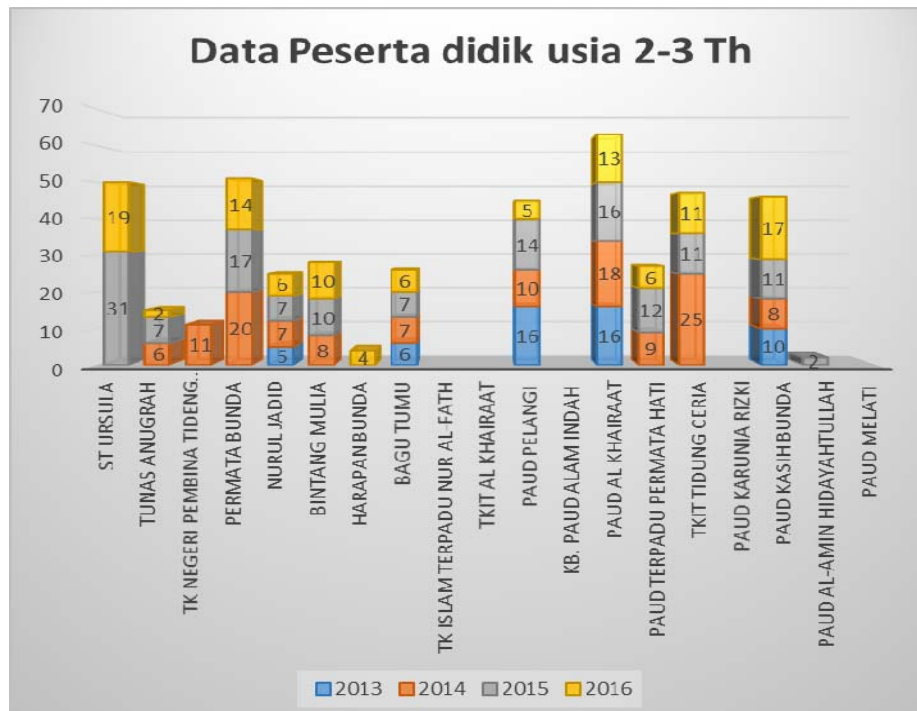
Berdasarkan gambar di atas KB Tubus Sepala, KB Nurul Huda, KB Nur Ilmi, KB Tunas Harapan, KB Laurensius, KB Tunas Mekar 2 tidak pernah ikut pelatihan dasar PAUD. Sehingga PAUD tersebut seharusnya tidak layak dalam pengelolaan PAUD.

Di Kecamatan Sesayap terdapat 19 PAUD dengan kondisi umum sebagai berikut:

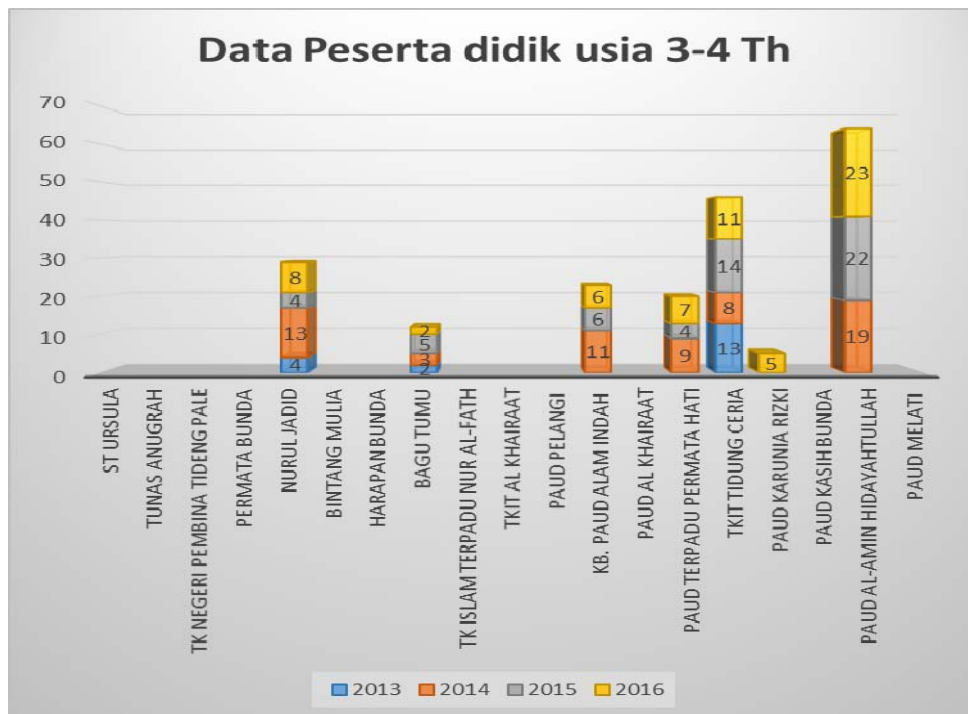
Gambar 3.44. Data Peserta Didik Usia 0-2 Th PAUD di Kecamatan Sesayap



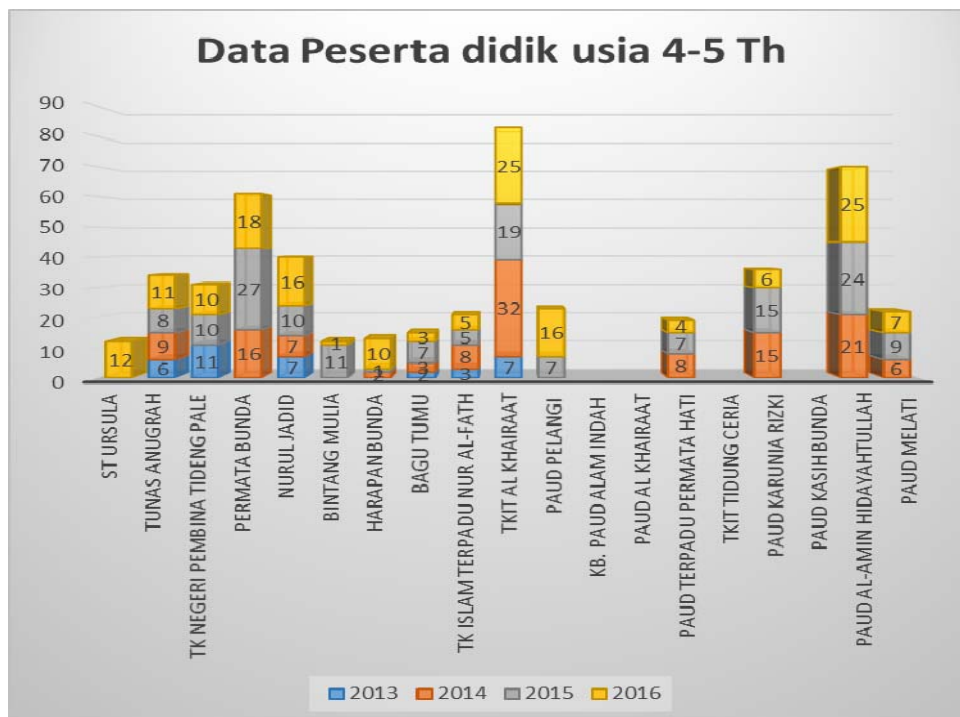
Gambar 3.45 Data Peserta Didik Usia 2-3 Th PAUD di Kecamatan Sesayap



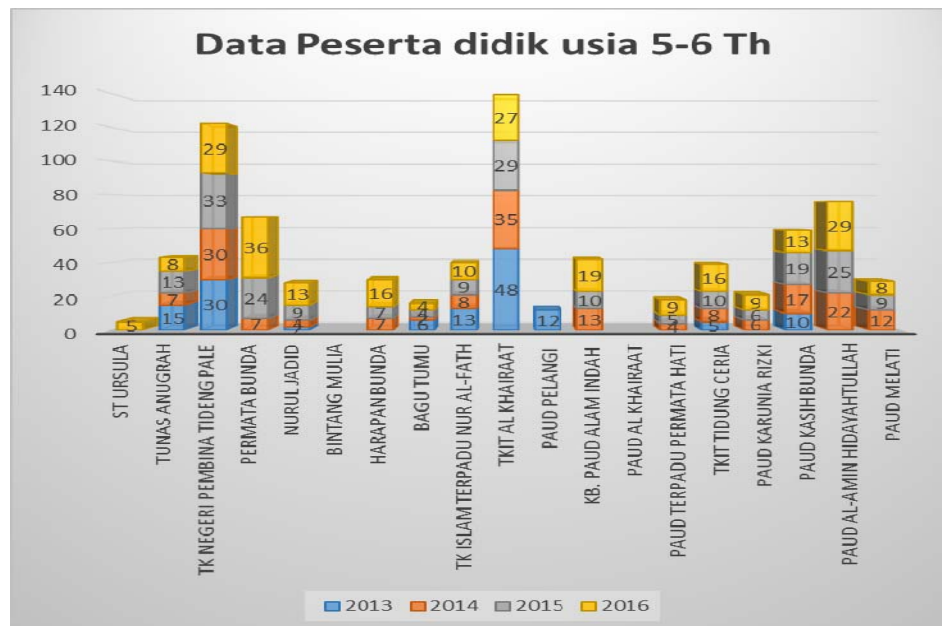
Gambar 3.46. Data Peserta Didik Usia 3-4 Th PAUD di Kecamatan Sesayap



Gambar 3.47. Data Peserta Didik Usia 4-5 Th PAUD di Kecamatan Sesayap

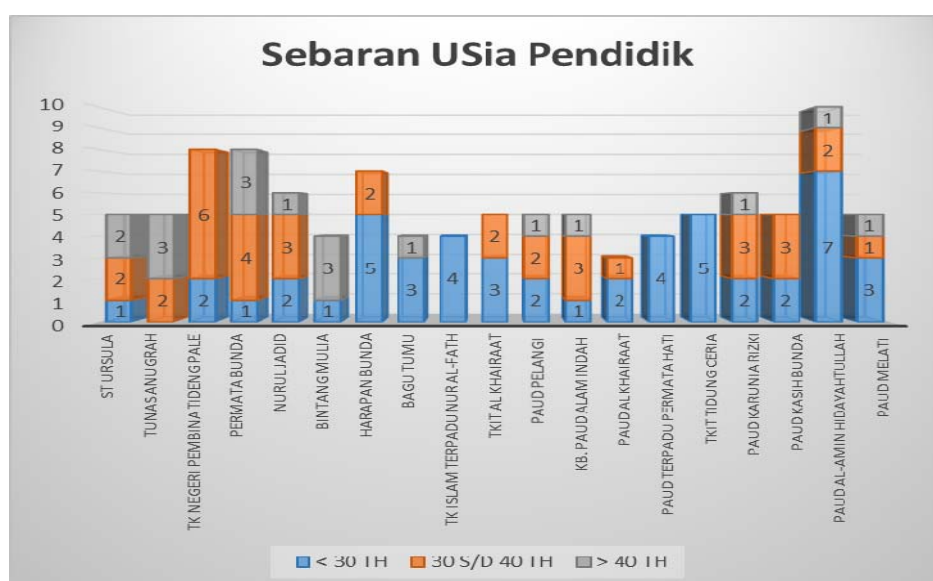


Gambar 3.48. Data Peserta Didik Usia 5-6 Th PAUD di Kecamatan Sesayap

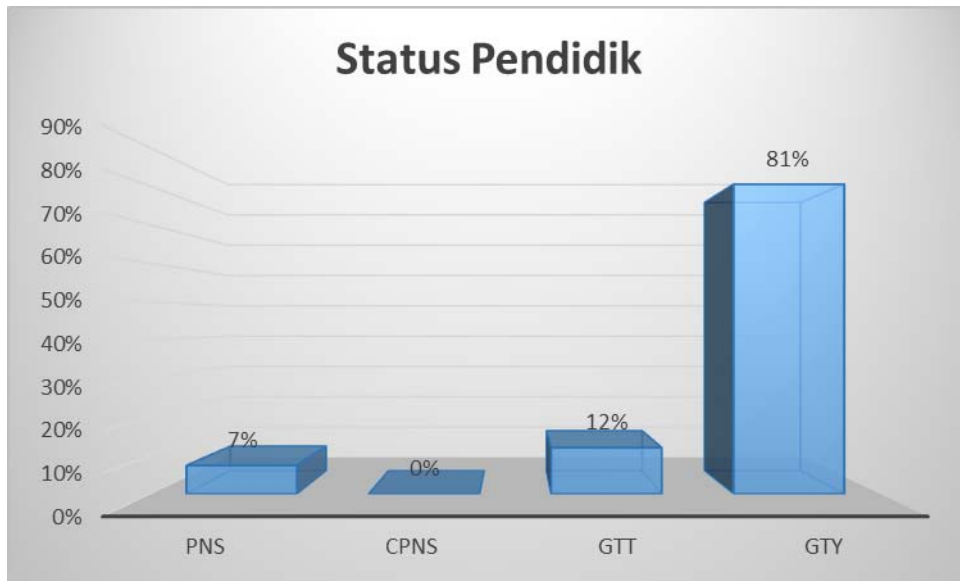


Berdasarkan gambar 2-6 dapat disimpulkan KB St. Ursula tidak mempunyai peserta didik tahun 2013-2014; KB Bintang Mulia, KB Harapan Bunda, KB Alam Indah (berdiri tahun 2010), KB Karunia Rizki (berdiri tahun 2013), KB Al-Amin Hidayatullah, KB Melati (berdiri tahun 2010) tidak mempunyai peserta didik pada tahun 2013.

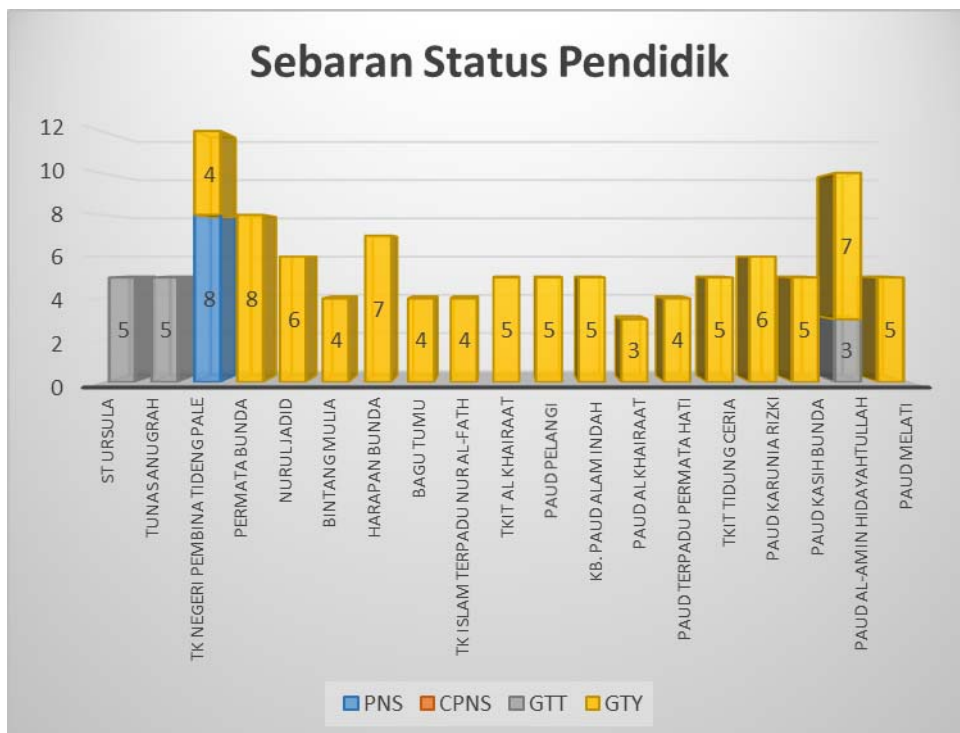
Gambar 3.49. Sebaran Usia Pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap



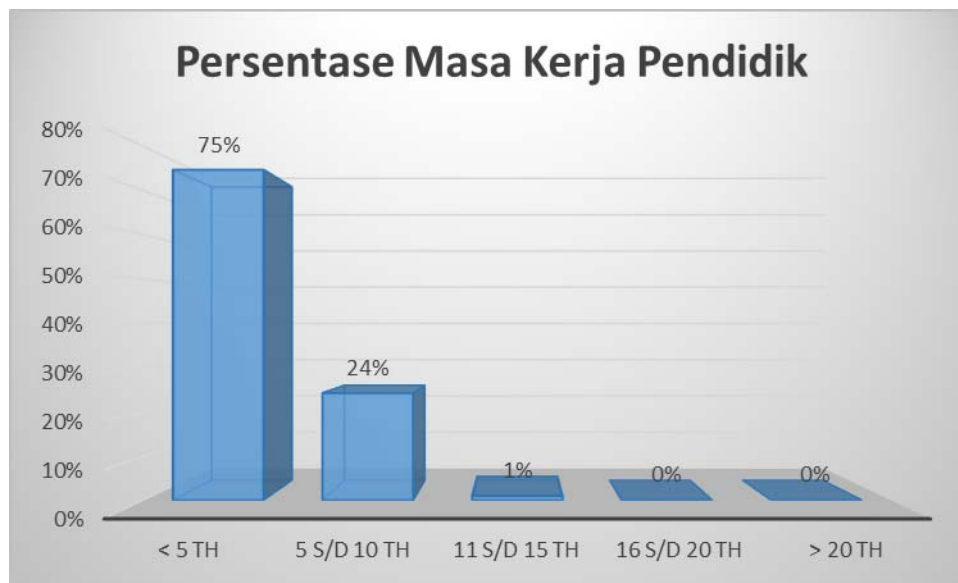
Gambar 3.50. Sebaran Usia Pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap



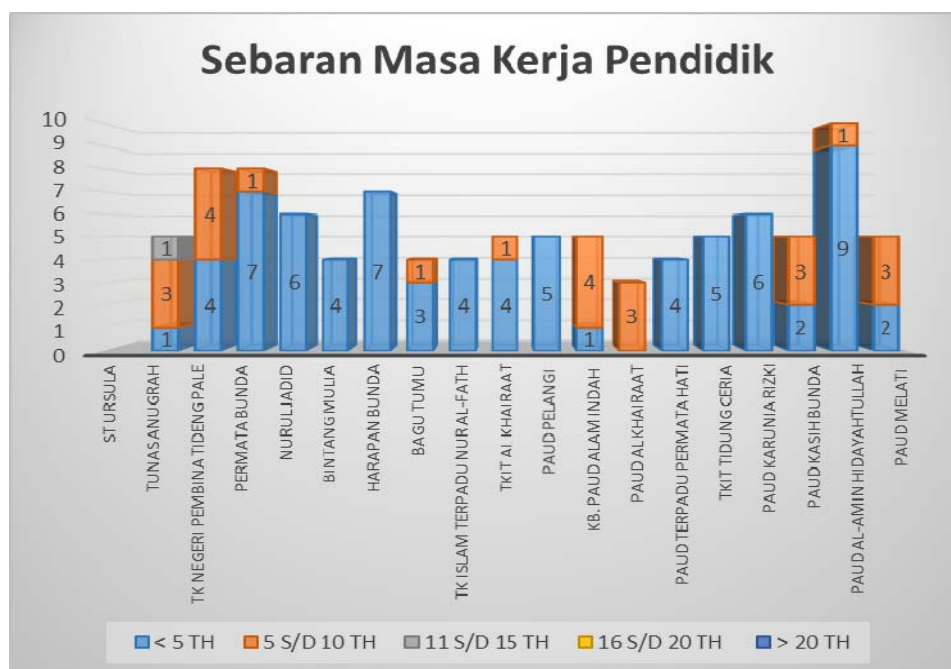
Gambar 3.51. Sebaran Status Pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap



Gambar 3.52. Persentase Masa Kerja Pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap

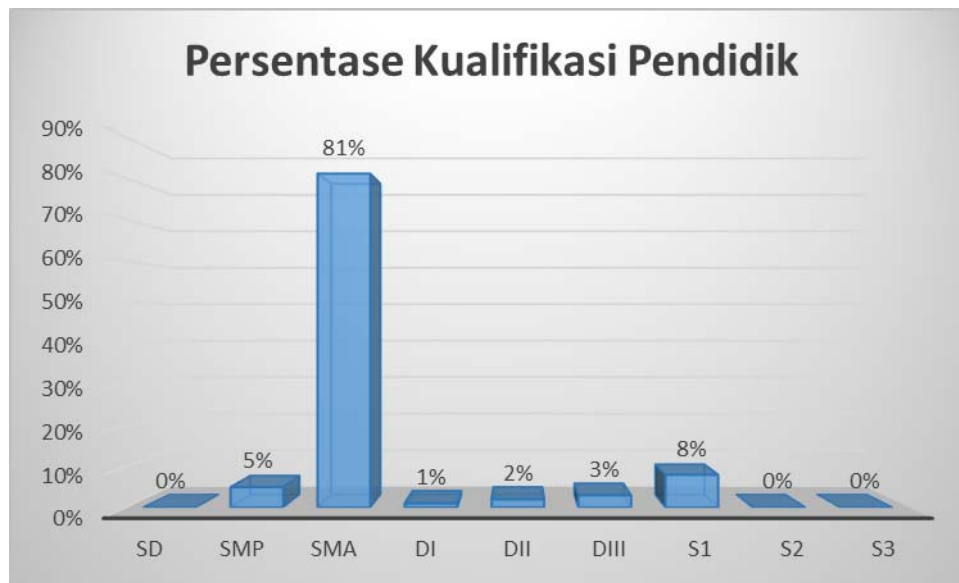


Gambar 3.53. Sebaran Masa Kerja Pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap



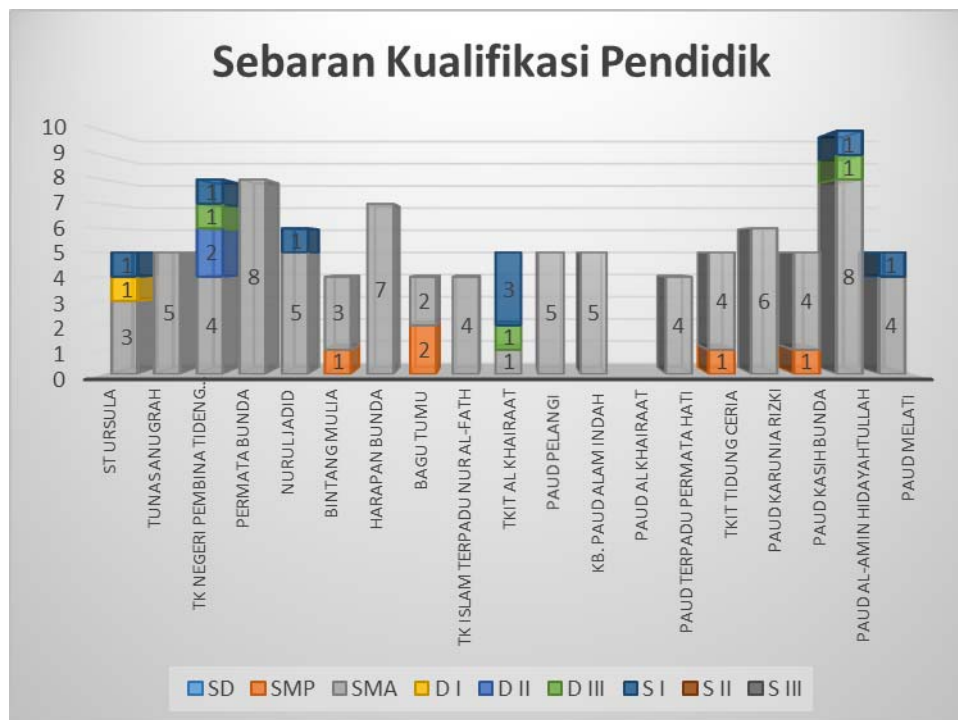
Pada Gambar di atas terlihat bahwa KB St. Ursula tidak mencantumkan masa kerja pendidiknya.

Gambar 3.54 Persentase Kualifikasi Pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap



Pada gambar di atas masih ada 5% pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap yang berijazah SMP.

Gambar 3.55 Sebaran Kualifikasi Pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap



Pada gambar di atas pendidik KB Bintang Mulia, KB Bagu Tumu, TKIT Tidung Ceria, dan KB Kasih Bunda masih ada yang berijazah SMP.

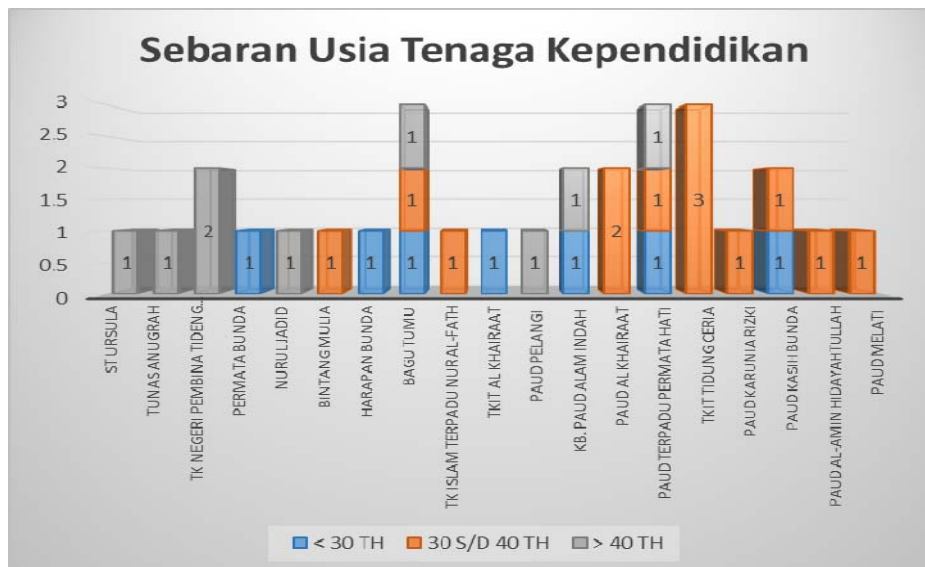
Gambar 3.56. Jumlah Pelatihan yang Diikuti Pendidik PAUD di Kecamatan Sesayap



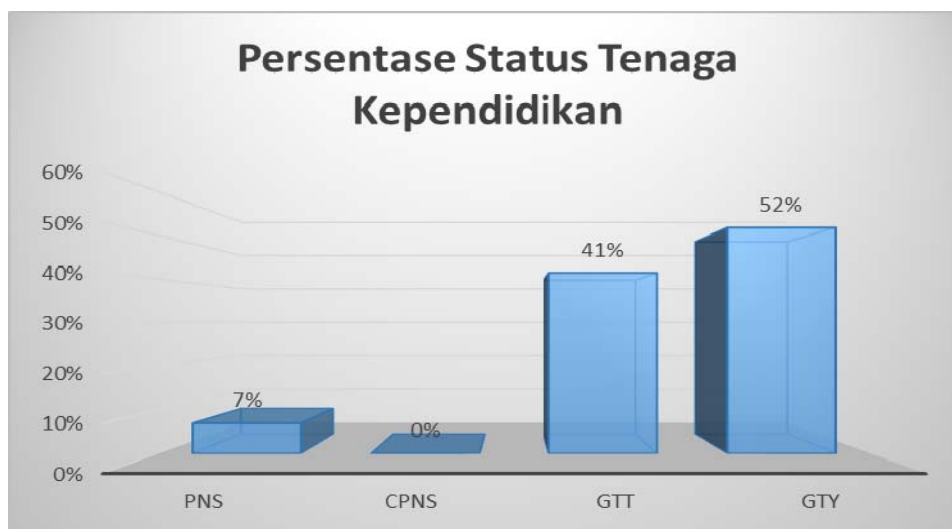
Pada gambar di atas tampak bahwa pendidik KB Karunia Rizki tidak pernah mengikuti pelatihan dasar PAUD.

Berdasarkan gambar 3.55 dan 3.56 disimpulkan seharusnya pendidik suatu PAUD minimal berijazah SMA, tetapi pendidik KB Bintang Mulia, KB Bagu Tumu, TKIT Tidung Ceria, dan KB Kasih Bunda masih ada yang berijazah SMP sehingga pendidik KB tersebut tidak layak mengajar. Begitupun dengan KB Karunia Rizki tidak pernah mengikuti pelatihan dasar PAUD sehingga pendidik KB tersebut tidak layak mengajar.

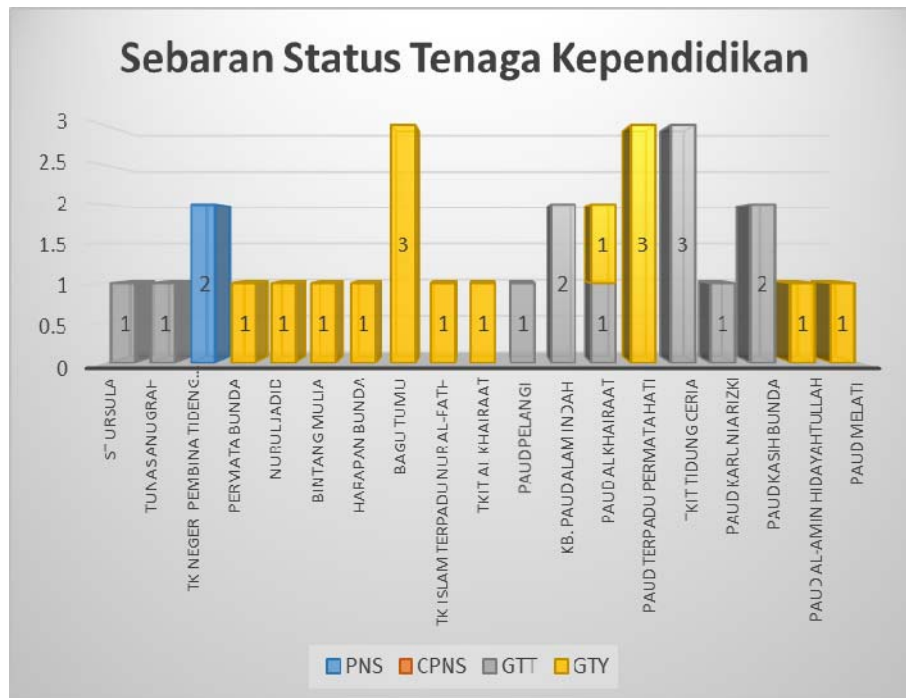
Gambar 3.57 Sebaran Usia Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap



Gambar 3.58. Persentase Status Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap



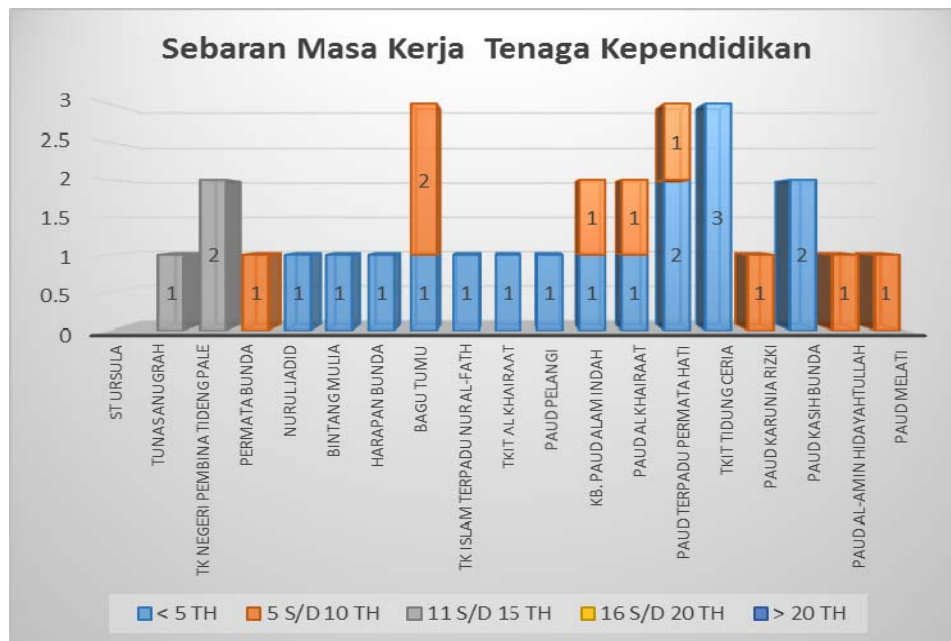
Gambar 3.59. Sebaran Status Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap



Gambar 3.60. Persentase Masa Kerja Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap

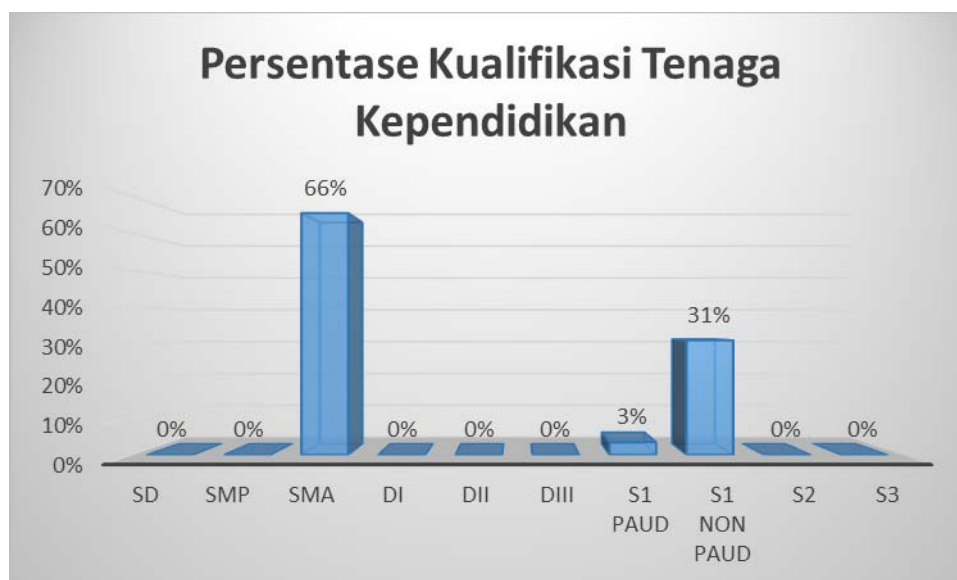


Gambar 3.61. Sebaran Masa Kerja Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap

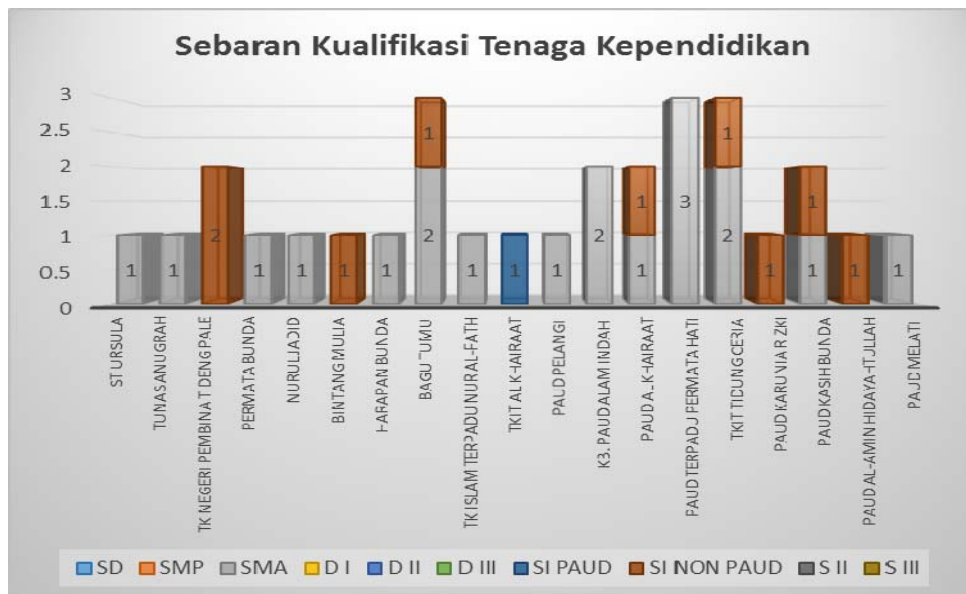


Pada gambar di atas KB St. Ursula tidak mencantumkan masa kerja dari tenaga kependidikannya.

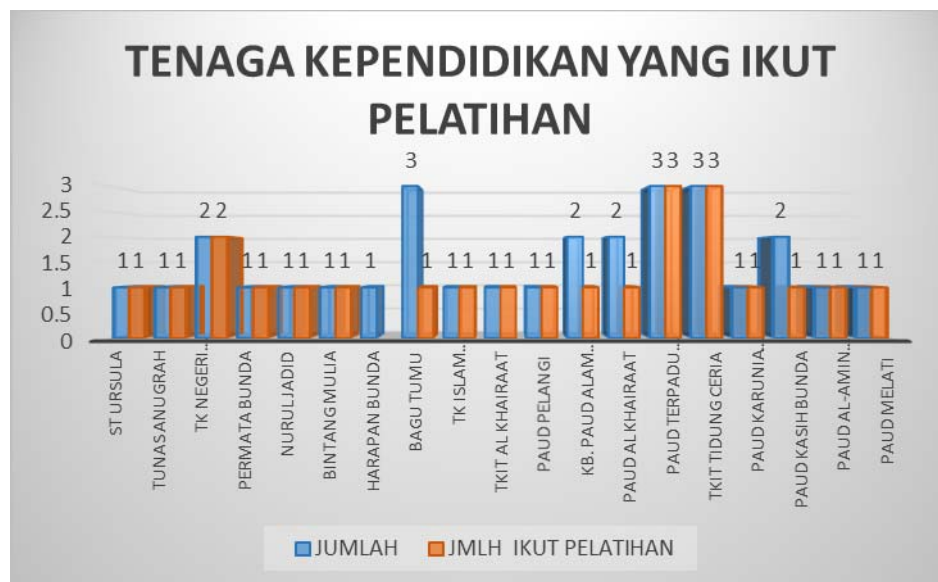
Gambar 3.62. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap



Gambar 3.63. Sebaran Kualifikasi Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Sesayap



Gambar 3.64. Tenaga Kependidikan PAUD yang Ikut Pelatihan di Kecamatan Sesayap

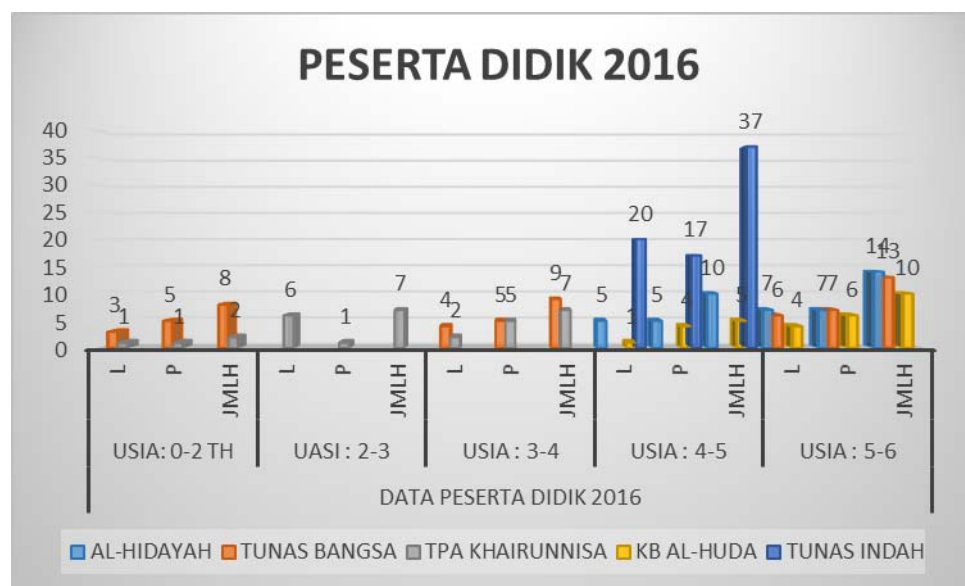


Pada gambar di atas tampak bahwa Tenaga kependidikan KB Harapan Bunda tidak ada yang ikut pelatihan dasar PAUD.

Berdasarkan gambar 3.63 dan 3.64 tenaga kependidikan KB Harapan Bunda tidak layak mengelola PAUD, karena tidak satupun yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD.

Di Kecamatan Tanah Lia terdapat 5 PAUD dengan kondisi umum sebagai berikut :

Gambar 3.65. Data Peserta Didik PAUD di Kecamatan Tanah Lia Tahun 2016

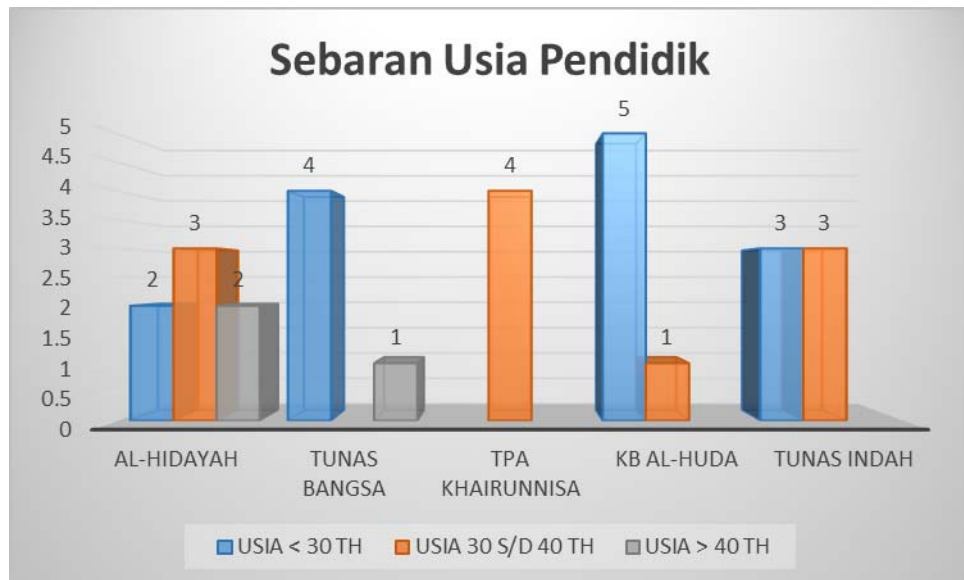


Pada tahun 2016 KB Tunas Indah tetap memiliki peserta didik terbanyak dengan 1 kelompok usia yaitu 4-5 tahun. KB Tunas Bangsa memiliki peserta didik dengan menjadi 3 kelompok usia yaitu 0-2 tahun, 3-4 tahun, dan 5-6 tahun. KB Al-Huda pada tahun 2016 tetap memiliki peserta didik dengan 2 kelompok usia yaitu 4-5 tahun dan 5-6 tahun. TPA Khairunnisa pada tahun 2016 tetap memiliki 3 kelompok usia yaitu 0-2 tahun, 2-3 tahun, dan 3-4 tahun dengan jumlah paling banyak 7 peserta didik dengan rincian berturut-turut 2, 7, dan 7 peserta didik. Sedangkan KB Al-Hidayah pada tahun 2016 meningkat memiliki 2 kelompok usia yaitu 4-5 tahun dan 5-6 tahun.

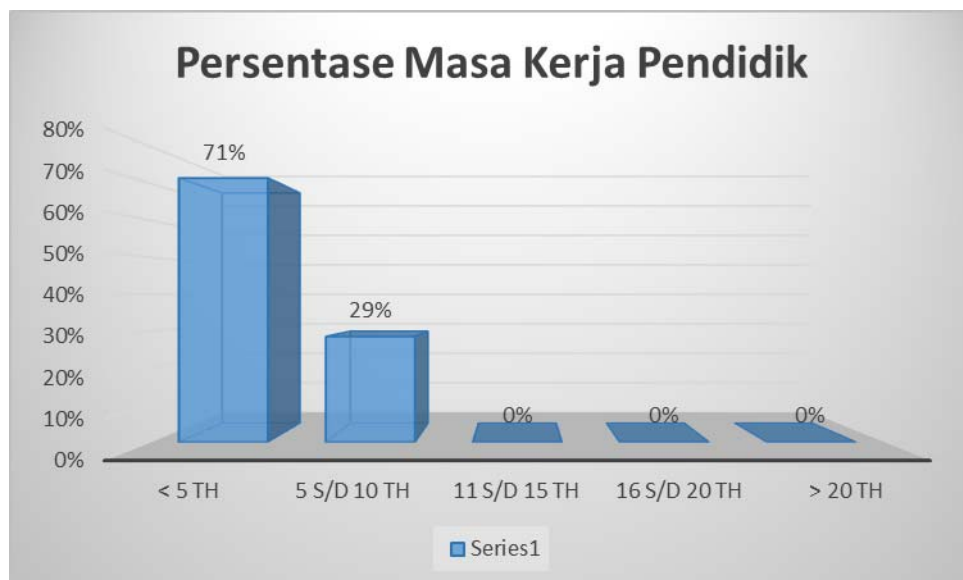
Berdasarkan data peserta didik dari tahun 2013 sampai 2016 dapat disimpulkan bahwa TPA Khairunnisa selalu mempunyai jumlah peserta didik

paling sedikit. KB Al-Hidayah dari tahun 2013-2014 terlihat tidak memiliki peserta didik, bertolak belakang dengan tahun akta pendirian sejak tahun 2009.

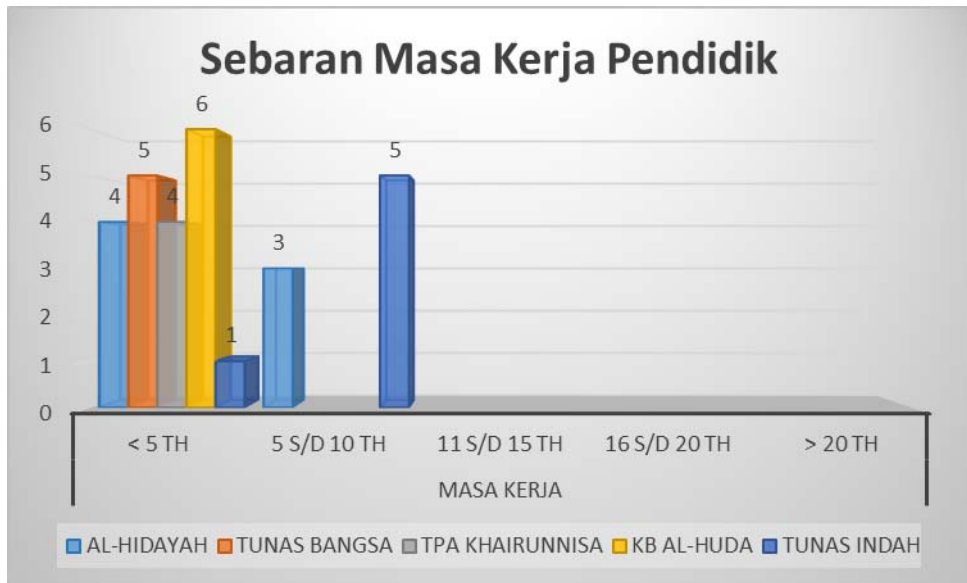
Gambar 3.66. Sebaran Data Usia Pendidik PAUD Kecamatan Tanah Lia



Gambar 3.67. Persentase Masa Kerja Pendidik PAUD Kecamatan Tanah Lia

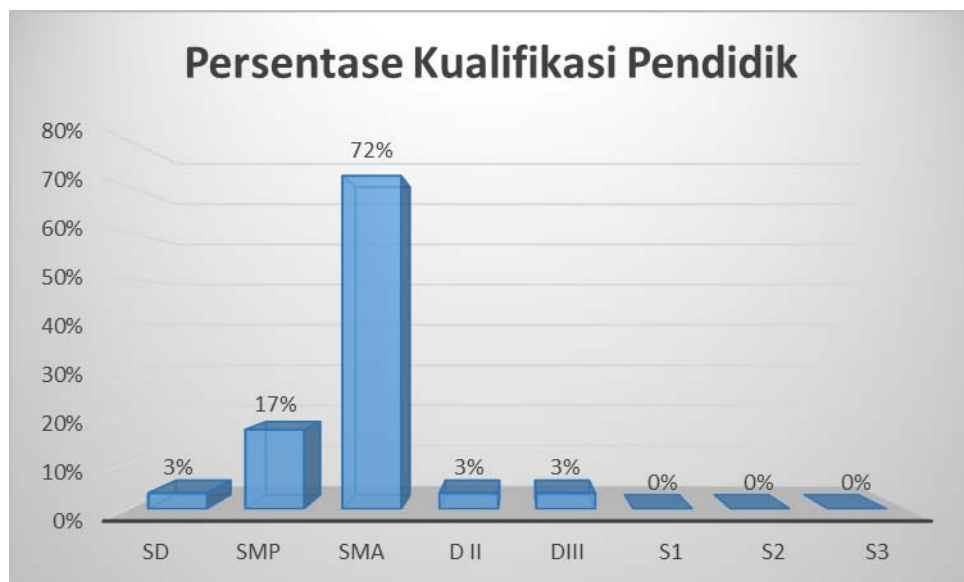


Gambar 3.68. Sebaran Masa Kerja Pendidik PAUD Kecamatan Tanah Lia

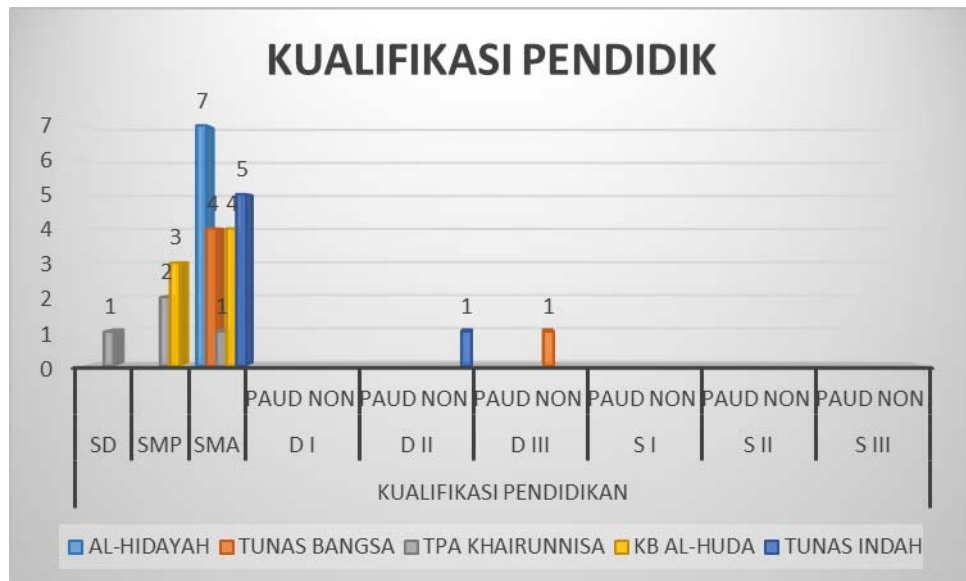


Pada gambar di atas untuk masa kerja pendidik 5 s/d 10 tahun hanya berada pada KB Al-Hidayah dan KB Tunas Indah.

Gambar 3.69 Persentase Kualifikasi Pendidik PAUD Kecamatan Tanah Lia

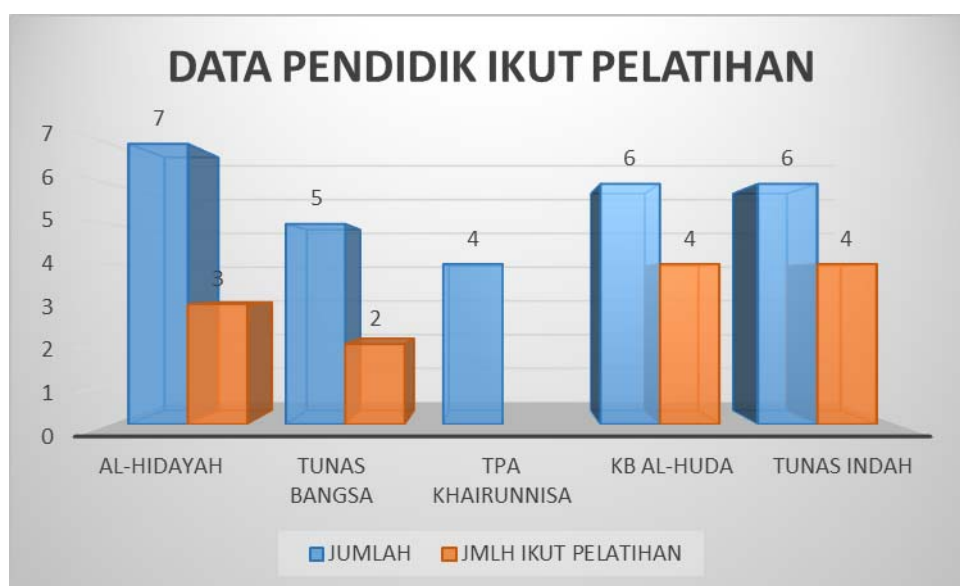


Gambar 3.70. Sebaran Kualifikasi Pendidik PAUD di Kecamatan Tanah Lia



Kualifikasi pendidik PAUD di Kecamatan Tanah Lia tidak satu pun yang berijazah S1 PAUD atau Kependidikan. Kualifikasi pendidik paling banyak dari SMA yaitu sekitar 72 %. Sekitar 17% peserta didik yang berkualifikasi SMP, yaitu TPA Khairunnisa dan KB Al-Huda. 3% pendidik berkualifikasi DII dan DIII Non PAUD. Dan masih ada pendidik yang berijazah SD yaitu sekitar 3%, yaitu di KB TPA Khairunnisa .

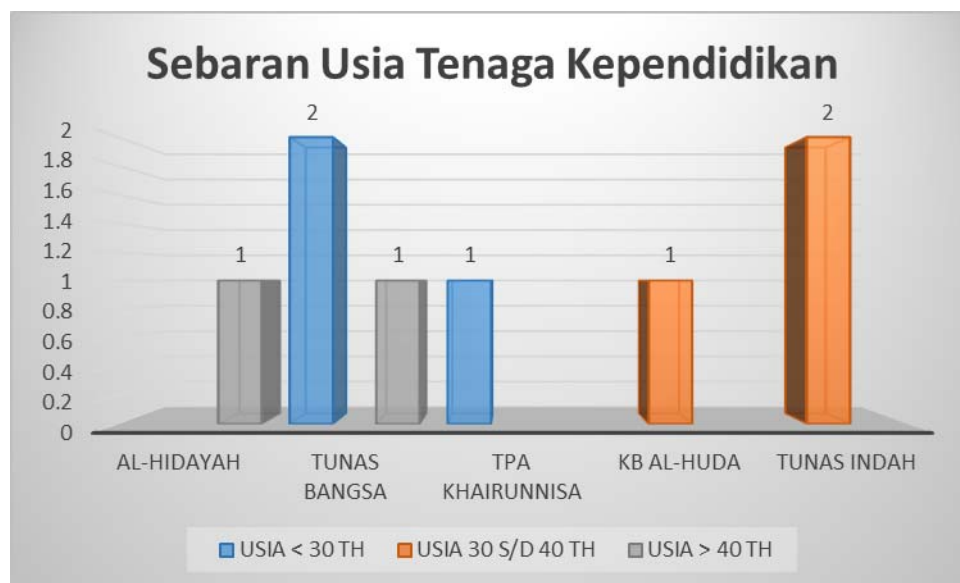
Gambar 3.71. Data Jumlah Pelatihan yang Diikuti Pendidik PAUD di Kecamatan Tanah Lia



Rata-rata 49,84% pendidik di KB AL-Hidayah, KB Tunas Bangsa, KB Al-Huda, dan KB Tunas Indah pernah ikut pelatihan dasar PAUD. Sedangkan TPA Khairunnisa tidak satupun pendidiknya yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD.

Berdasarkan data tenaga pendidik diatas diperoleh bahwa pendidik TPA Khairunnisa tidak layak untuk mendidik peserta didik di TPA Khairunnisa, karena tidak mempunyai minimal satu pendidik nya berijazah S1 PAUD atau kependidikan dan tidak satupun pendidiknya yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD.

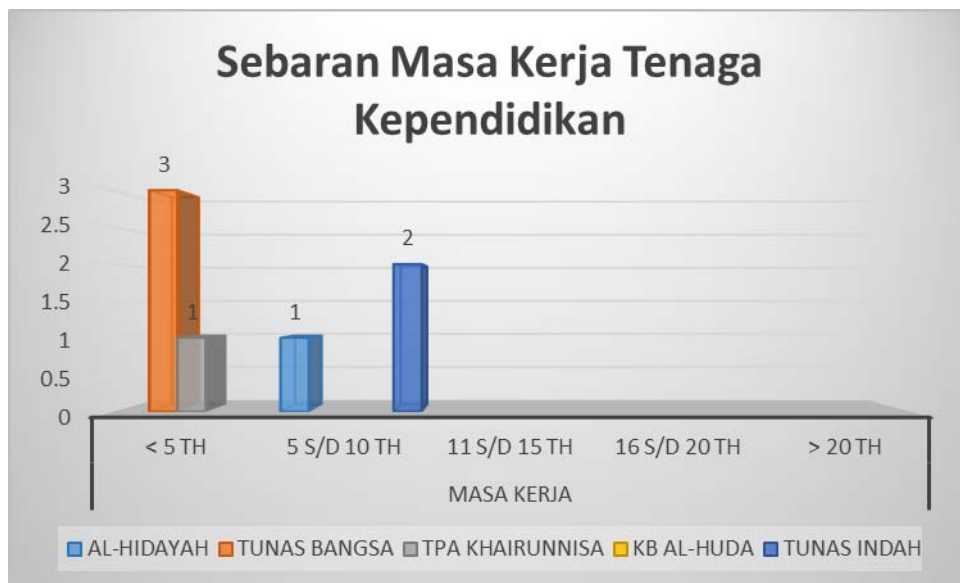
Gambar 3.72. Sebaran Usia Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Tanah Lia



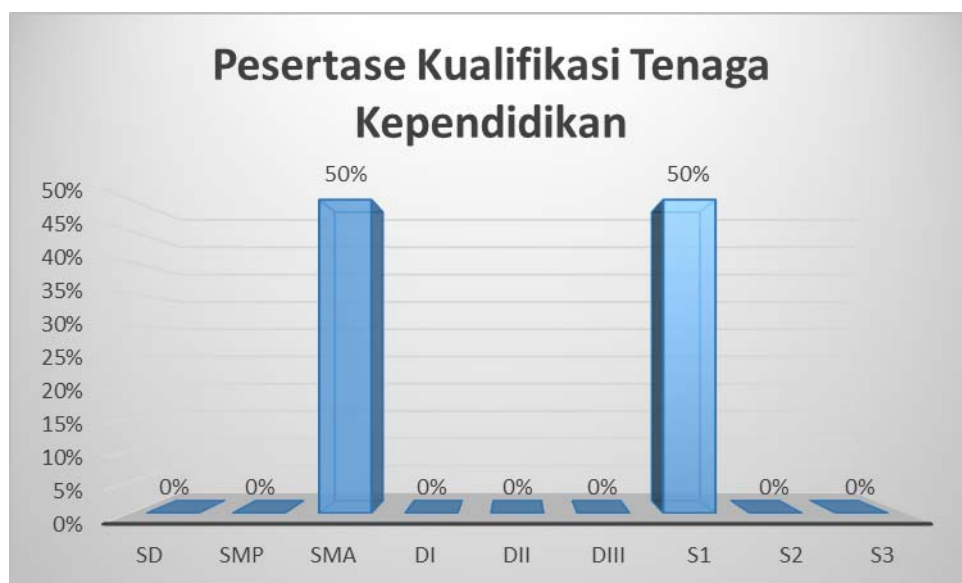
Gambar 3.73. Persentase Masa Kerja Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Tanah Lia



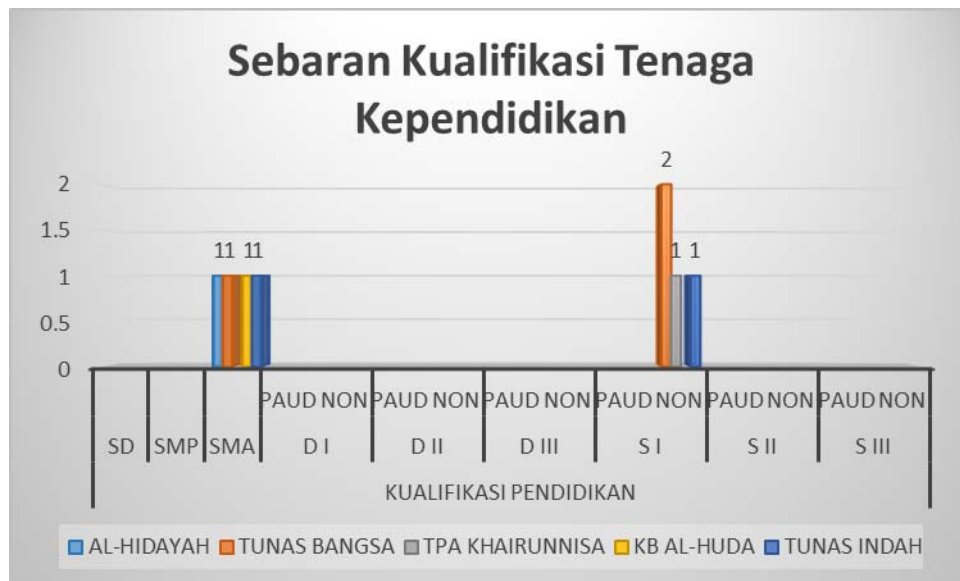
Gambar 3.74. Sebaran Masa Kerja Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Tanah Lia



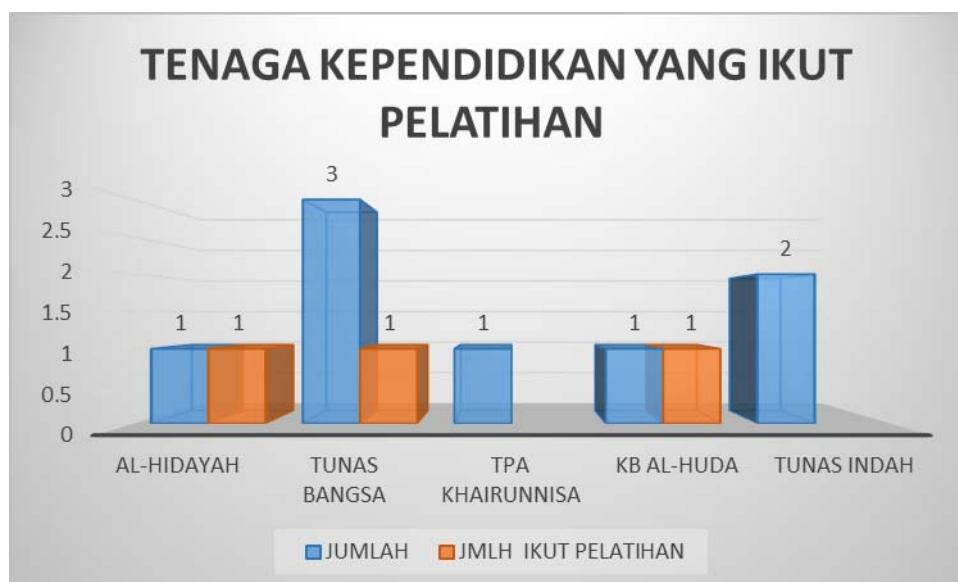
Gambar 3.75. Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Tanah Lia



Gambar 3.76 Sebaran Kualifikasi Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Tanah Lia



Gambar 3.77. Data Jumlah Pelatihan yang Diikuti Tenaga Kependidikan PAUD di Kecamatan Tanah Lia



Rata-rata 77,78% tenaga kependidikan di KB AL-Hidayah, KB Tunas Bangsa, dan KB Al-Huda pernah ikut pelatihan dasar PAUD. Sedangkan TPA

Khairunnisa dan KB Tunas Indah tidak satupun tenaga kependidikannya yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD.

Berdasarkan data tenaga kependidikan di atas diperoleh bahwa tenaga kependidikan TPA Khairunnisa dan KB Tunas Indah tidak layak dalam pengelolaan PAUD, karena tidak satupun tenaga kependidikannya yang pernah ikut pelatihan dasar PAUD.

3.2.2. Gambaran Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Kondisi pendidikan Sekolah Dasar kabupaten Tana Tidung sampai dengan Tahun ajaran 2016/2017 sebagai berikut :

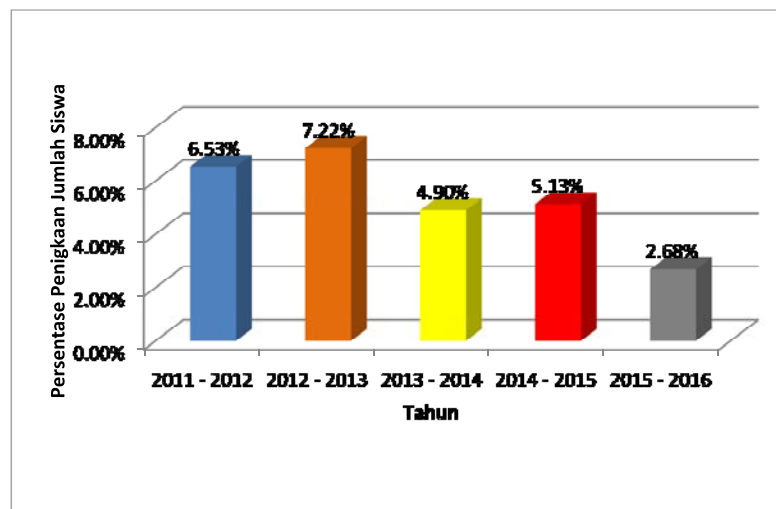
Jumlah sekolah Dasar yang ada di kabupaten Tana Tidung saat ini terdiri dari 27 SD Negeri dan 2 SD swasta dimana SD swasta terletak di kecamatan Sesayap. Jumlah siswa SD secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel 3.1. adapun jumlah siswa yang terbanyak berada di Kecamatan Sesayap, kecamatan Sesayap Hilir, Tana Lia, Betayau dan terakhir kecamatan Muruk Rian. Urutan tersebut berdasarkan kepadatan jumlah siswa. Berdasarkan data hasil survei telah diperoleh Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sebesar 87,48 dan Angka partisipasi Murni (APM) sebesar 78,24.

Tabel 3. 1
Data Jumlah Siswa SD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 s/d 2016

TAHUN	JUMLAH SISWA											
	I		I		III		IV		V		VI	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
2011	180	181	159	148	158	165	130	140	132	144	132	137
2012	214	191	174	152	166	162	157	156	144	144	132	132
2013	266	201	175	148	164	178	172	157	149	169	136	148
2014	212	229	202	168	196	163	168	175	171	163	163	154
2015	236	238	214	179	200	169	190	178	181	169	160	161
2016	244	215	229	198	209	200	191	170	179	162	174	165

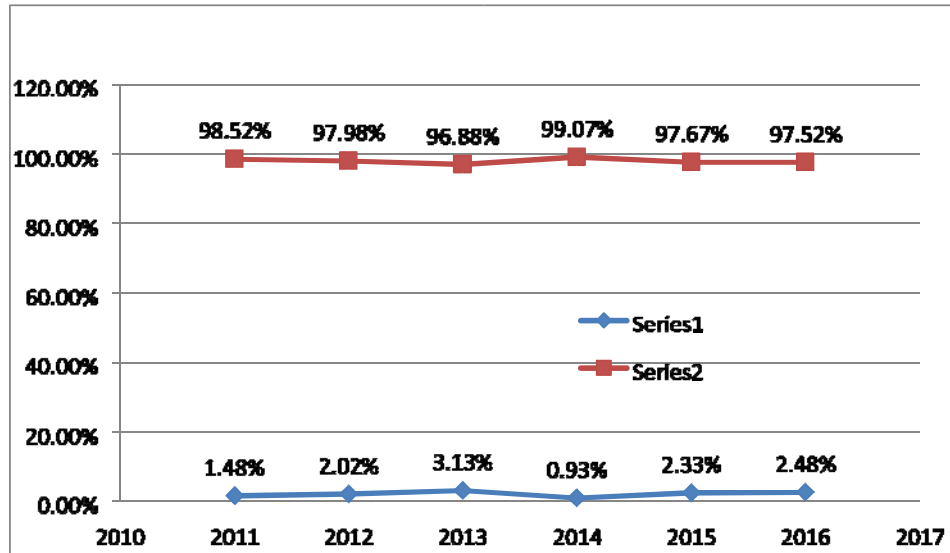
Penyebaran jumlah siswa yang tidak merata pada setiap desa dan kecamatan ini juga mengindikasikan bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Tana Tidung pada kondisi yang sama sehingga jika pembangunan sekolah berdasarkan desa bukan berdasarkan jumlah populasi ideal akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan cenderung kurang tepat guna. Sehingga diperlukan strategi lain agar pembangunan sekolah di masing-masing wilayah dapat diakses oleh masyarakat namun efektif dalam penggunaan anggaran. Strategi yang dimaksud adalah menggunakan skala prioritas pembangunan Pendidikan. Disamping itu juga perlu dipertimbangkan agar dalam penyediaan sarana prasarana pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan biaya yang lebih murah. Sedangkan jika ditinjau dari aspek jenis kelamin jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kabupaten Tana Tidung relatif seimbang.

Grafik 3. 1 Data Persentase Peningkatan Jumlah Siswa SD Setiap Tahun



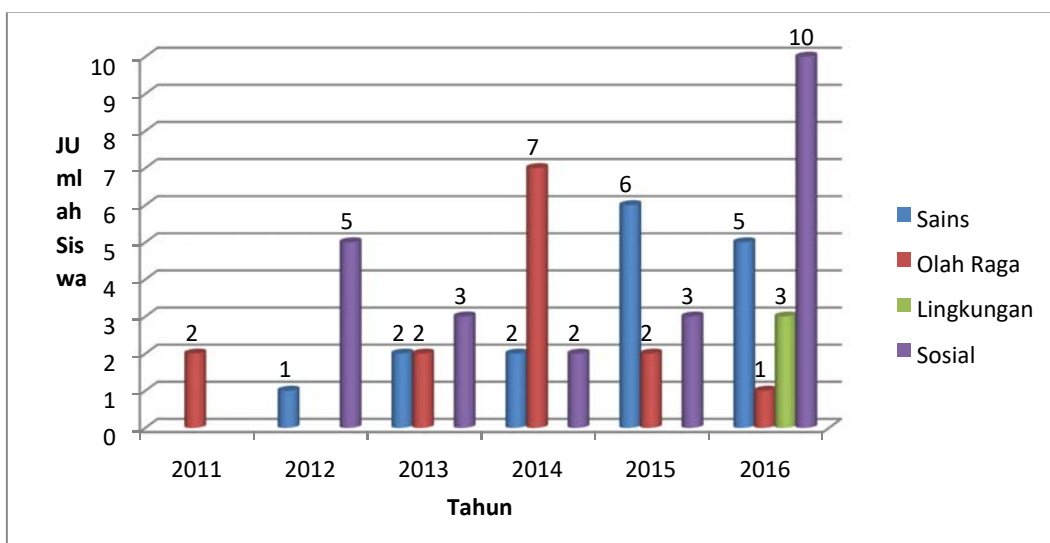
Tabel 3.1 dan grafik 3.79 diperoleh informasi bahwa peningkatan jumlah siswa dalam waktu lima tahun terakhir cukup bervariasi pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan yang signifikan dimana peningkatan jumlah siswa terbesar terjadi pada tahun ajaran 2012-2013 yaitu 7,22%, Namun kondisi tidak diikuti pada tahun berikutnya, bahkan pada tahun ajaran 2015-2016 pada posisi yang paling pada 5 (lima) tahun Terakhir yaitu 2.68%.

Grafik 3. 2 Persentase Kelulusan Siswa SD Kabupaten Tana Tidung



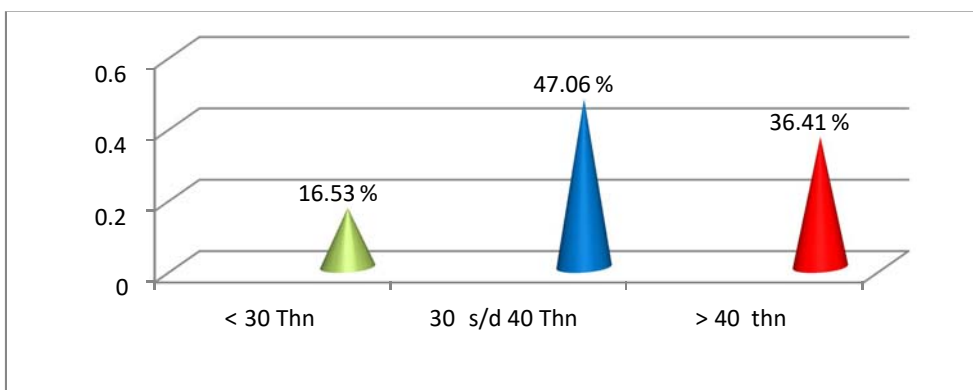
Pada grafik 3.2 Apabila dilihat dari angka tingkat kelulusan siswa setiap tahunnya cenderung stabil. Perbandingan persentase siswa lulus dan tidak lulus sudah menunjukkan angka yang sangat baik dengan persentase rata-rata kelulusan 97,94%.

Grafik 3. 3 Data Jumlah siswa SD menurut Prestasinya



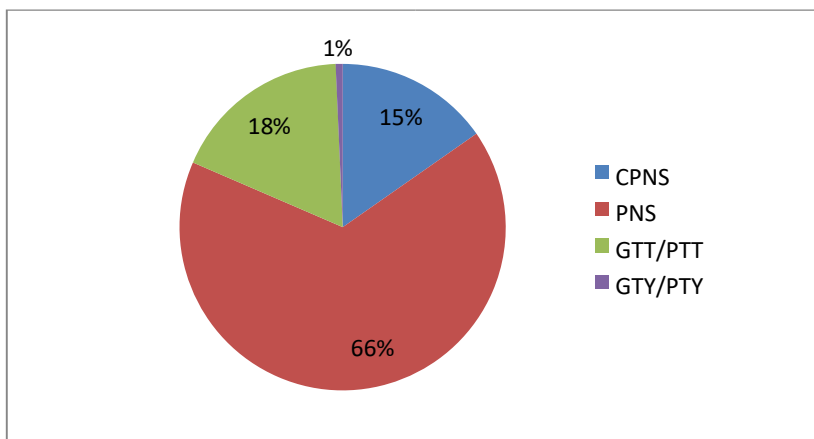
Pada grafik 3.3 berkenaan dengan prestasi siswa, Sekolah Dasar di kabupaten Tana Tidung lebih banyak meraih prestasi lebih didominasi oleh katagori ilmu sosial seperti lomba puisi, cerpen, tari dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sosial jumlahnya 10 prestasi kemudian diikuti oleh prestasi dalam bidang sains 7 prestasi. Sedangkan prestasi dalam bidang olahraga diraih paling banyak pada tahun 2014.

Grafik 3. 4 Data Persentase Guru SD menurut Usia Kabupaten Tana Tidung



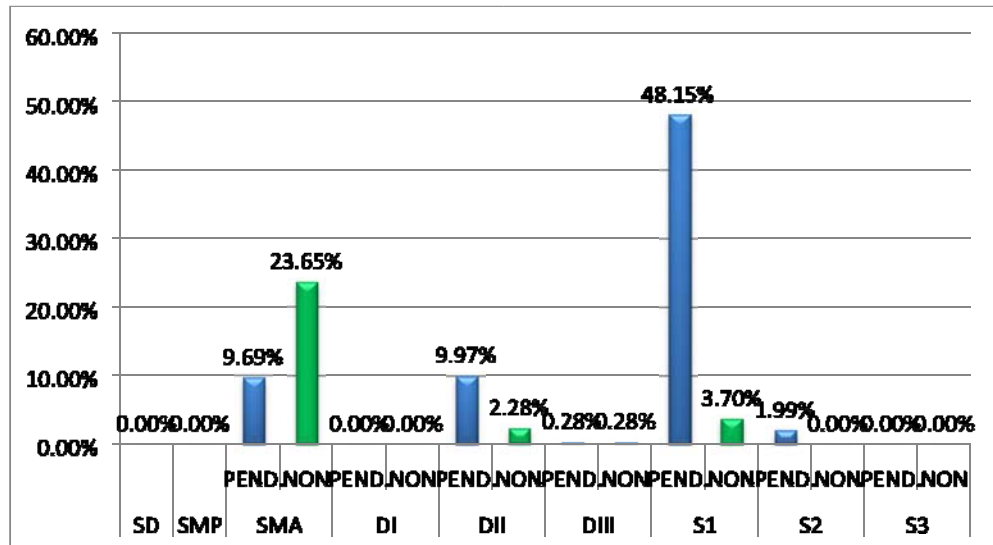
Secara umum pada grafik 3.82 kondisi guru di KTT lebih banyak di dominasi oleh usia produktif Persentase guru-guru SD di Kabupaten Tana Tidung (KTT) paling banyak didominasi di usia antara 30 sampai dengan 40 tahun yaitu 47,06% dan usia dibawah 30 tahun 16,53 %. yang merupakan usia produktif dan 36,41% jumlah usia guru diatas 40 tahun. Pertanyaan menarik adalah apakah dengan mayoritas usia produktif yang ada di KTT sudah bisa dimaksimalkan untuk menjadi motor penggerak perubahan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Dengan banyaknya guru usia produktif bisa menjadi penggerak perubahan pendidikan di Kabupaten Tana Tidung.

Grafik 3. 5 Data Persentase Guru SD Menurut Status Kepegawaian



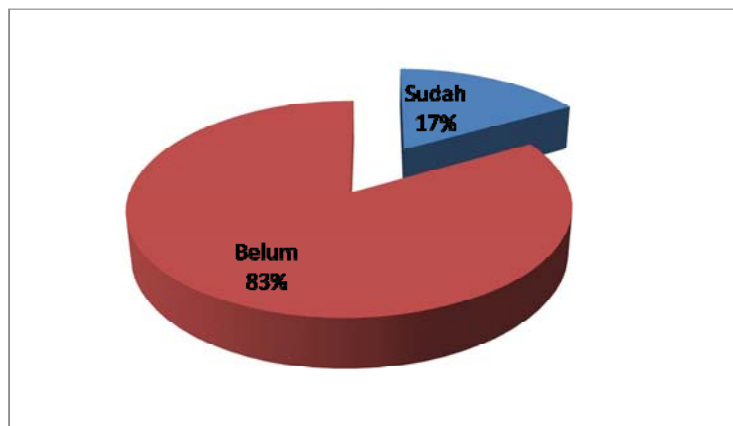
Sedangkan menurut status kepegawaian guru SD di KTT didominasi oleh PNS sebanyak 66% dan ditambah CPNS 15% kemudian sisanya dari guru tidak tetap dan guru yayasan untuk sekolah swasta. Jika ditinjau dari status pegawai sudah cukup mumpuni untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di KTT. Namun kedepan harus dipikirkan pola-pola perekrutan Pegawai negeri Sipil (PNS) disesuaikan dengan kebutuhan SDM yang punya relevansi dengan bidang studi yang di butuhkan, dengan mengedepankan aspek profesionalisme pada semua level pendidikan yang di Kabupaten Tana Tidung.

Grafik 3.6 Data Persentase Guru SD Kabupaten Tana Tidung Menurut Kualifikasi Pendidikan



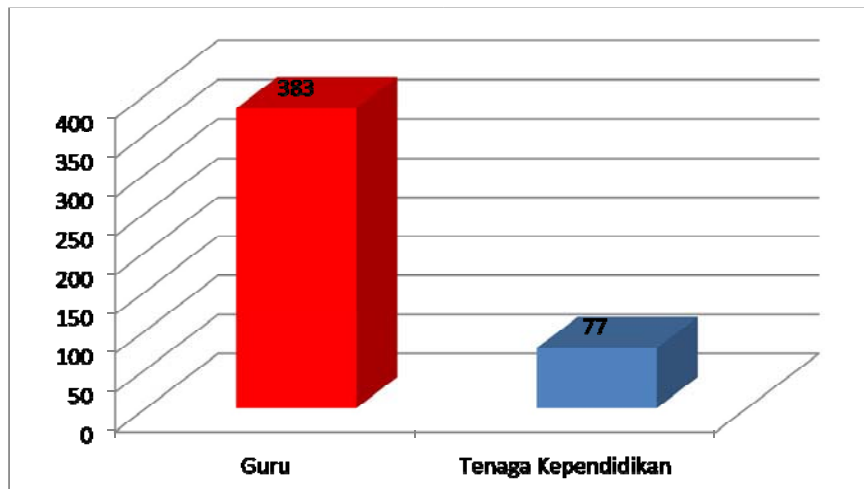
Dari kualifikasi pendidikan guru di KTT paling banyak lulusan S1 dengan bidang pendidikan sebanyak 48,15% diikuti oleh lulusan SMA non pendidikan sebanyak 23,65%. Jika dilihat dari banyaknya guru yang telah mendapat sertifikasi dari pemerintah, maka guru-guru di KTT yang telah memiliki sertifikasi hanya 17%.

Grafik 3. 7 Data Persentase Guru Kabupaten Tana Tidung Menurut Sertifikasi



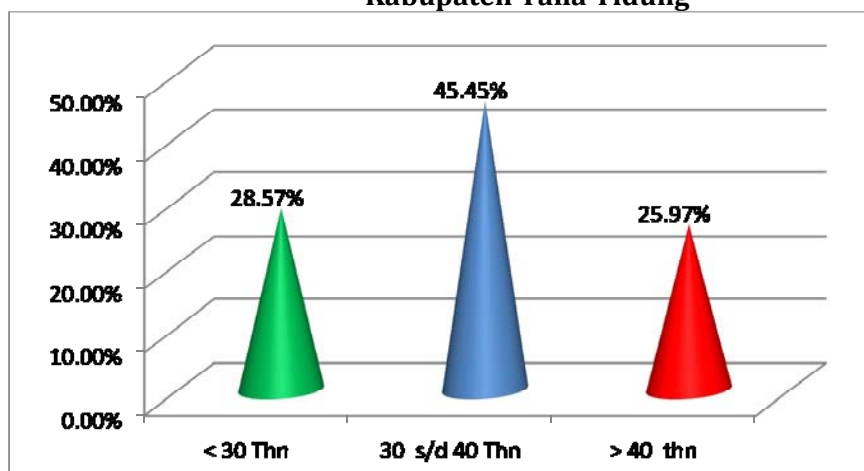
Pada grafik 3.7 menunjukan bahwa mayoritas guru belum mendapatkan sertifikasi pendidik atau berjumlah 83%, sedangkan 17 % sudah bersertifikasi pendidik. Ini menggrafikkan bahwa kualitas tenaga pendidik pada jenjang pendidikan sekolah Dasar masih sangat perlu untuk ditingkatkan.

Grafik 3. 8 Data Perbandingan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan



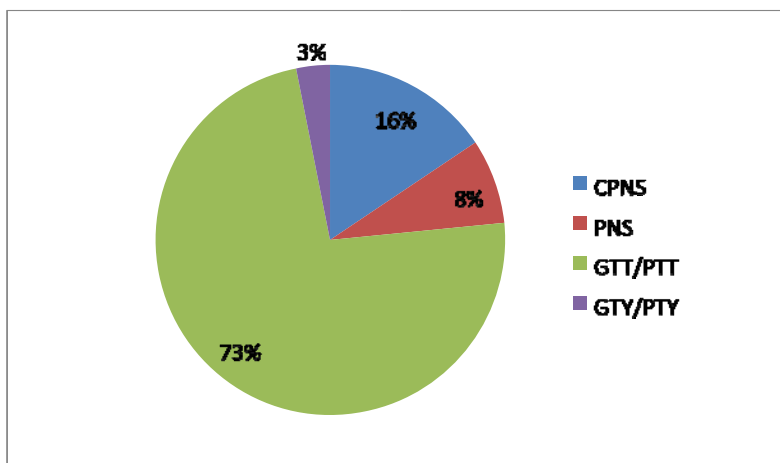
Perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan grafik 3.8 adalah 1:5. Tenaga kependidikan SD di KTT masing seimbang yaitu 383 guru dan 77 tenaga kependidikan.

Grafik 3.9 Data Persentase Tenaga Kependidikan SD menurut Usia Kabupaten Tana Tidung



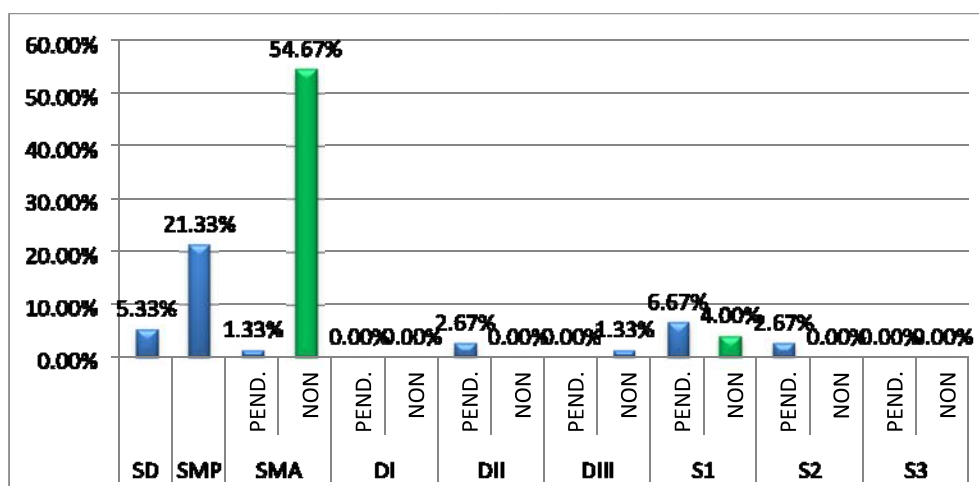
Pada grafik 3.9 Jika ditinjau dari usia paling banyak didominasi oleh produktif yaitu usia diantara 30 sampai dengan 40 tahun yaitu sebanyak 45,45%, dibawah 30 tahun 28,57% dan usia diatas 40 tahun berjumlah 25,97%.

Grafik 3. 10 Data Persentase Tenaga Kependidikan SD Menurut Status Kepegawaian

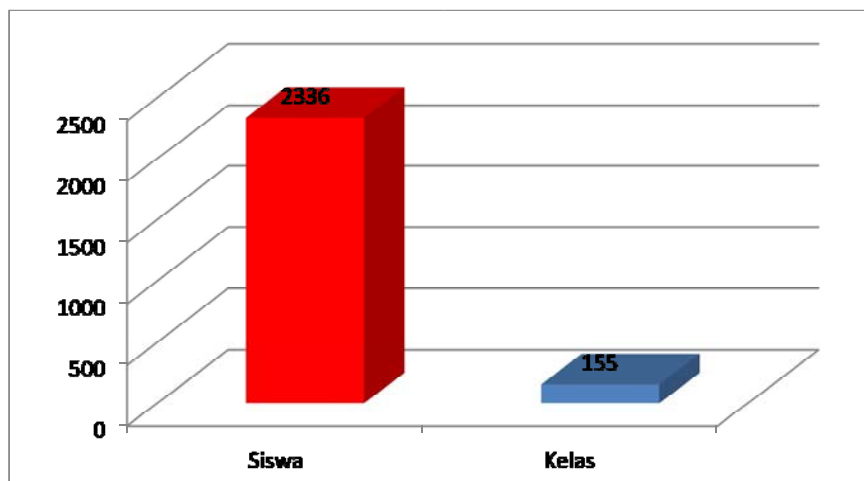


Dari hasil observasi pada grafik diatas menunjukan bahwa status kepegawaian untuk Tenaga Kependidikan SD di KTT lebih banyak didominasi tenaga tidak tetap atau honorer sebanyak 73%, CPNS 16%, PNS 8% dan guru/pegawai tetap yayasan 3%. Tenaga kependidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Tana Tidung jika dilihat dari kualifikasi pendidikannya paling banyak didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 54,67% kemudian lulusan SMP sebanyak 21,33%. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.91 berikut:

Grafik 3. 11 Data Persentase Tenaga kependidikan SD Kabupaten Tana Tidung Menurut Kualifikasi Pendidikan

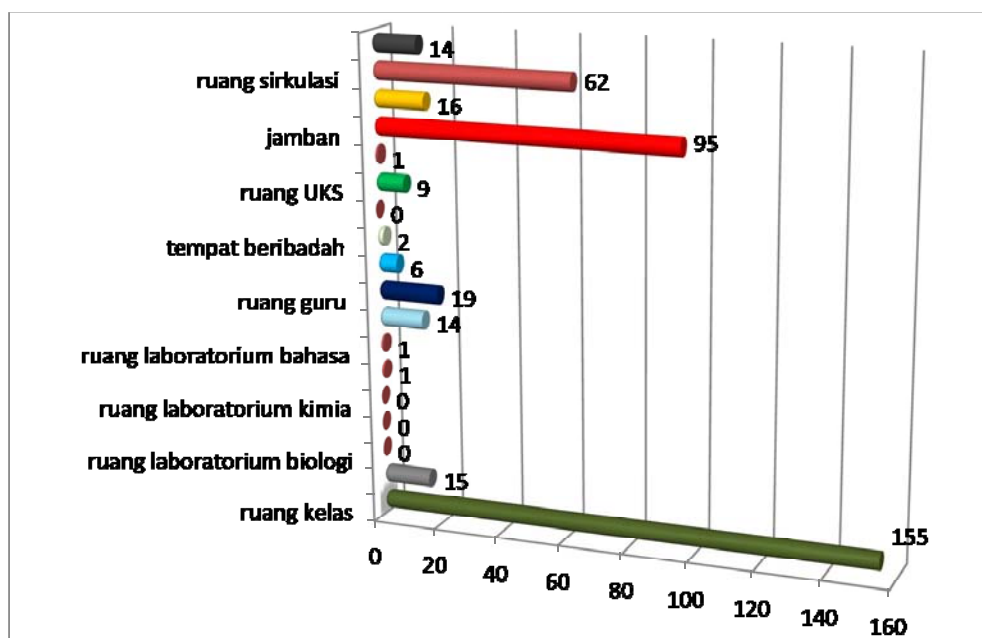


Grafik 3. 12 Data Perbandingan Jumlah Kelas dan Siswa



Sarana penunjang yang digunakan pada setiap pembelajaran yang dilakukan di kelas merupakan hal yang sangat penting untuk dipersiapkan. Jika dilihat dari jumlah kelas yang tersedia di SD KTT terdata sebanyak 155 kelas dan siswa sebanyak 2236 orang sehingga jika idealnya berada pada kisaran 1 : 20 maka dari data yang diperoleh 1 : 16 secara umum jika di kalkulasi secara utuh dan sebaranya merata sudah cukup memenuhi.

Grafik 3. 13 Sarana SD Kabupaten Tana Tidung

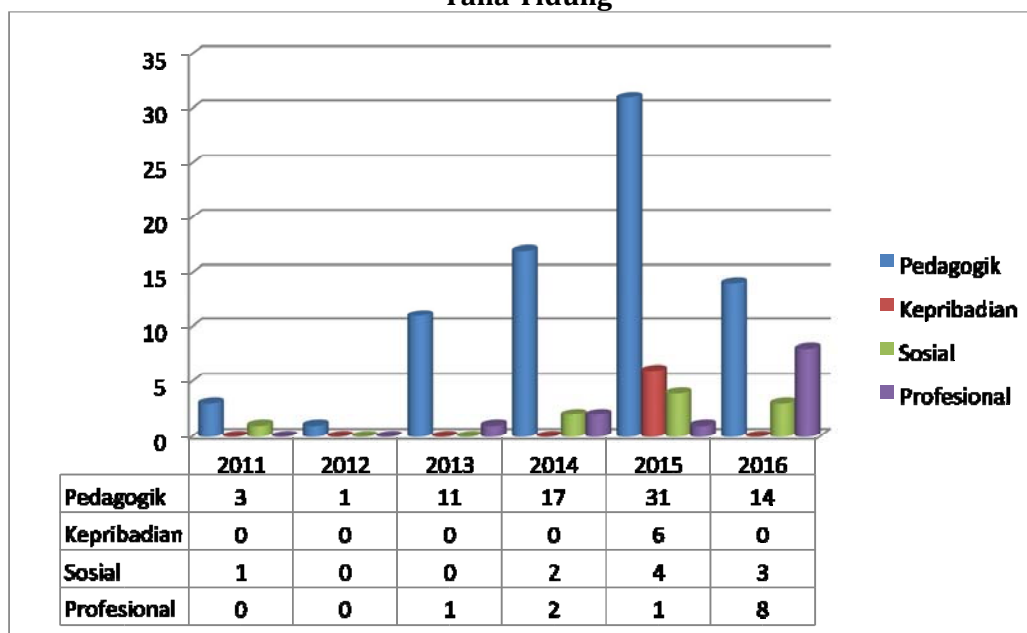


Pada grafik 3.13 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana vital yang sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran, ketersediaan ruang

Laboratorium bahasa, ruang laboratorium kimia dan ruang laboratorium biologi di sekolah Dasar masih sangat tidak memadai.

Jika dilihat dari jenis dan jumlah Pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh sebagian guru di tiap SD di Kabupaten TanaTidung tercatat paling banyak mengarah pada pelatihan pedagogik yang diikuti oleh sekolah di tahun 2015 sedangkan pelatihan-pelatihan menyangkut kepribadian yang berisi pelatihan kepemimpinan, adminstrasi, masih sangat dari hasil survey hanya 6 sekolah yang mengikuti di tahun 2015. Hal ini bisa di lihat dalam grafik 3. 14 sebagai berikut;

Grafik 3. 14 Data Pelatihan Yang pernah diikuti Guru SD Kabupaten Tana Tidung



3.2.3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

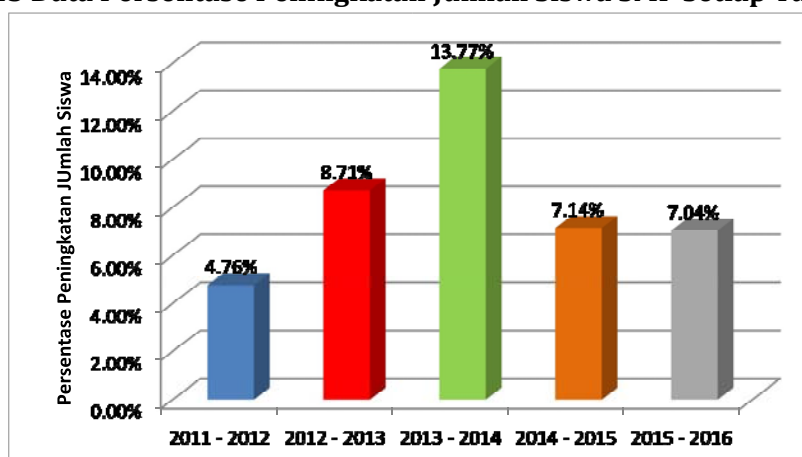
Secara umum Kondisi pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama kabupaten Tana Tidung sampai dengan Tahun ajaran 2016/2017 dapat digrafikkan sebagai berikut : SMP di kabupaten Tana Tidung terdiri dari 8

SMP Negeri. Jumlah siswa SMP secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel 3.2. jumlah siswa terbanyak terdapat di Kecamatan Sesayap kemudian kecamatan Sesayap Hilir, Tana Lia, Betayau dan terakhir kecamatan Muruk Rian. Berdasarkan hasil data survei telah diperoleh Angka Partisipasi Kasar SMP sebesar 90,17 dan Angka partisipasi Murni sebesar 81,12.

Tabel 3.2 Jumlah Siswa SMP Secara Keseluruhan di Kabupaten Tana Tidung

TAHUN	JUMLAH SISWA KELAS					
	II		VIII		IX	
	L	P	L	P	L	P
2011	129	151	124	133	124	117
2012	150	142	127	137	128	131
2013	164	160	166	152	115	129
2014	203	172	165	175	147	146
2015	218	205	183	183	140	151
2016	203	200	223	204	166	160

Grafik 3. 15 Data Persentase Peningkatan Jumlah Siswa SMP Setiap Tahun

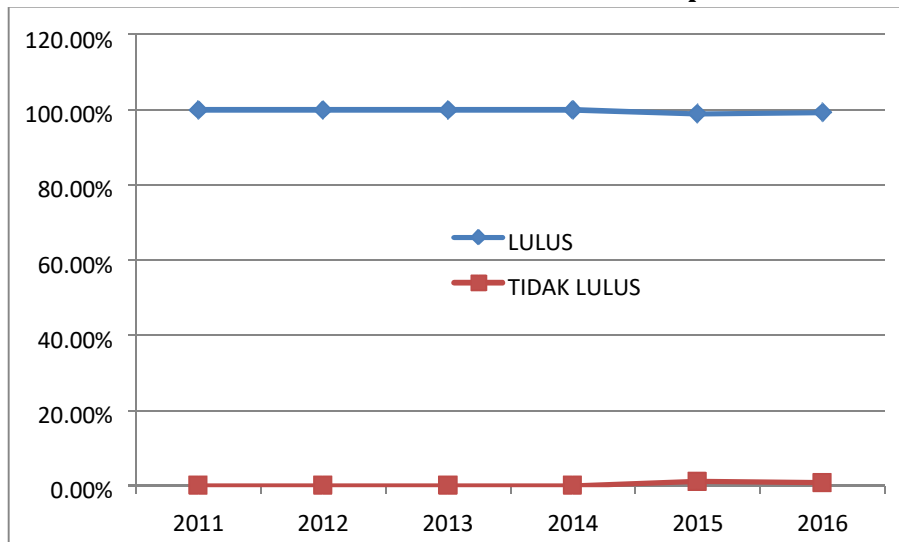


Berdasarkan tabel 3.2 dan grafik 3.95 diperoleh informasi bahwa peningkatan jumlah siswa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan dimana peningkatan jumlah siswa terbesar terjadi pada tahun 2012-2013 yaitu 13,77% ,

pada tahun 2014-2015 7.14%, dan 2015-2016 7.04%. Jika Ditinjau dari aspek jenis kelamin jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kabupaten Tana Tidung selisihnya tidak terlalu besar atau relatif seimbang.

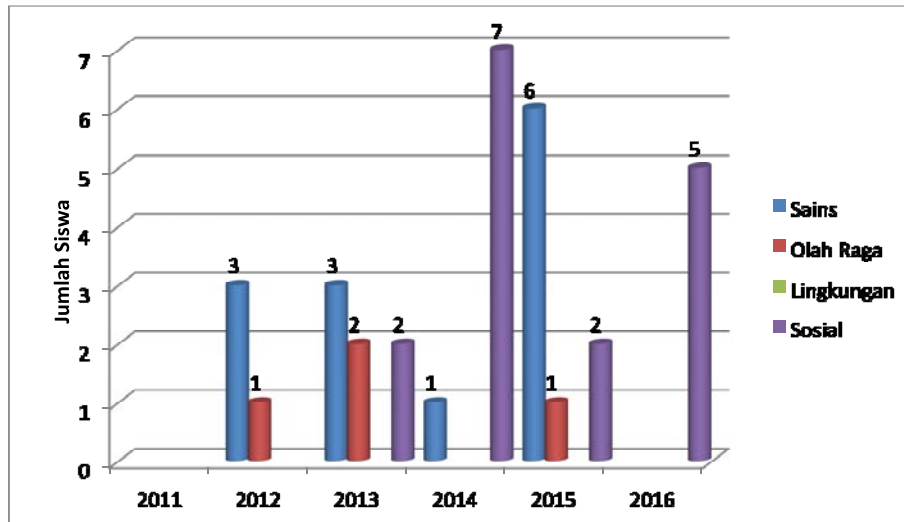
Berdasarkan tabel 3.2 dan grafik 3.95 diperoleh informasi bahwa peningkatan jumlah siswa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan dimana peningkatan jumlah siswa terbesar terjadi pada tahun 2012-2013 yaitu 13,77% , pada tahun 2014-2015 7.14%, dan 2015-2016 7.04%. Jika Ditinjau dari aspek jenis kelamin jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kabupaten Tana Tidung selisihnya tidak terlalu besar atau relatif seimbang.

Grafik 3. 16 Persentase Kelulusan Siswa SMP Kabupaten Tana Tidung



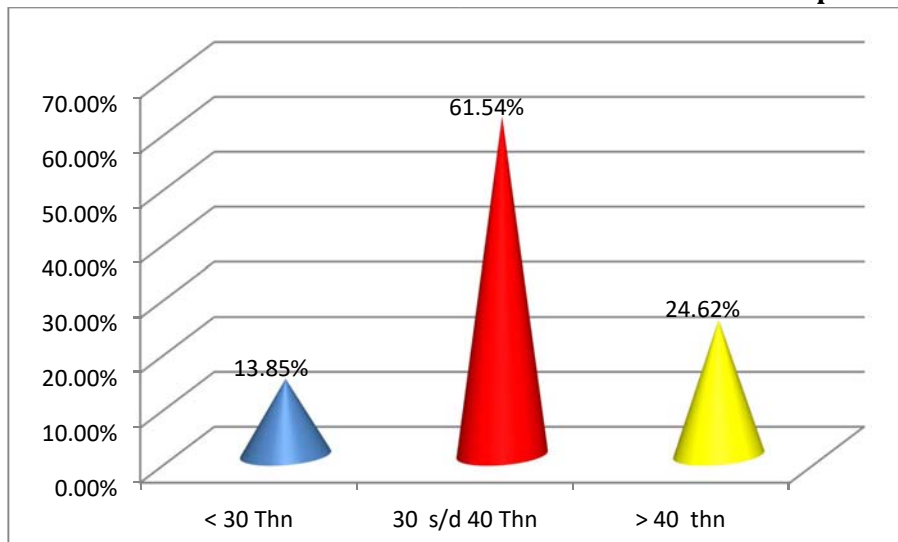
Apabila dilihat dari angka kelulusan siswa setiap tahunnya perbandingan persentase siswa lulus dan tidak lulus sudah sangat baik dengan persentase rata-rata kelulusan 99,71%.

Grafik 3.17 Data Jumlah siswa SMP menurut Prestasinya



Jika ditinjau dari aspek prestasi, seperti yang digambarkan pada grafik 3.97 diatas, siswa SMP kabupaten Tana Tidung lebih banyak diraih untuk katagori lomba pidato, tari dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sosial kemudian diikuti oleh prestasi dalam bidang sains dan olah raga.

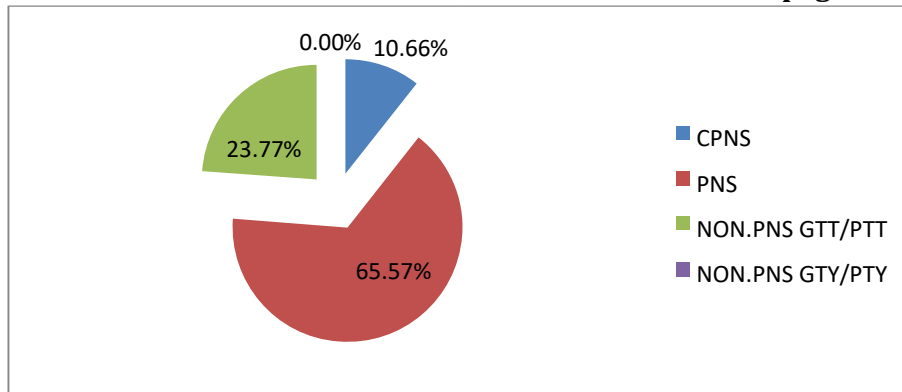
Grafik 3. 18 Data Persentase Guru SMP menurut Usia Kabupaten Tana Tidung



Persentase guru-guru SMP di Kabupaten Tana Tidung (KTT) paling banyak didominasi di usia antara 30 sampai dengan 40 tahun yaitu 51,54% dan usia produktif dibawah 30 tahun berada pada persentase 13,85 %. Sedangkan

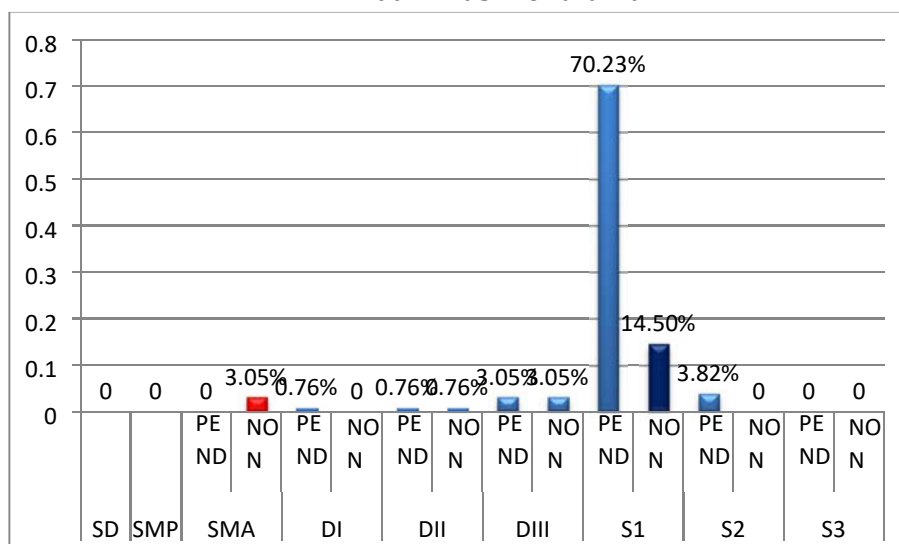
menurut status kepegawaian guru SMP di KTT didominasi oleh PNS sebanyak 65,57% dan ditambah CPNS 10,66% kemudian sisanya dari guru tidak tetap.

Grafik 3. 19 Data Persentase Guru SMP Menurut Status Kepegawaian

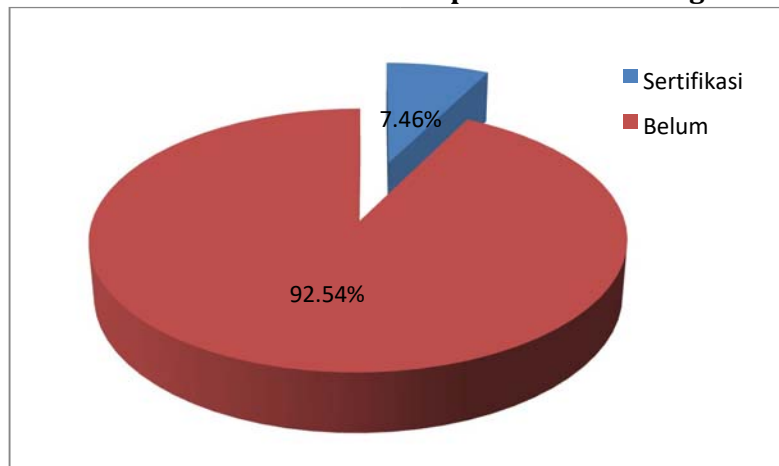


Dari kualifikasi pendidikan guru di KTT paling banyak lulusan S1 dengan bidang pendidikan sebanyak 70,23% diikuti oleh lulusan S1 non pendidikan sebanyak 14,50%.

Grafik 3.20 Data Persentase Guru SMP Kabupaten Tana Tidung Menurut Kualifikasi Pendidikan

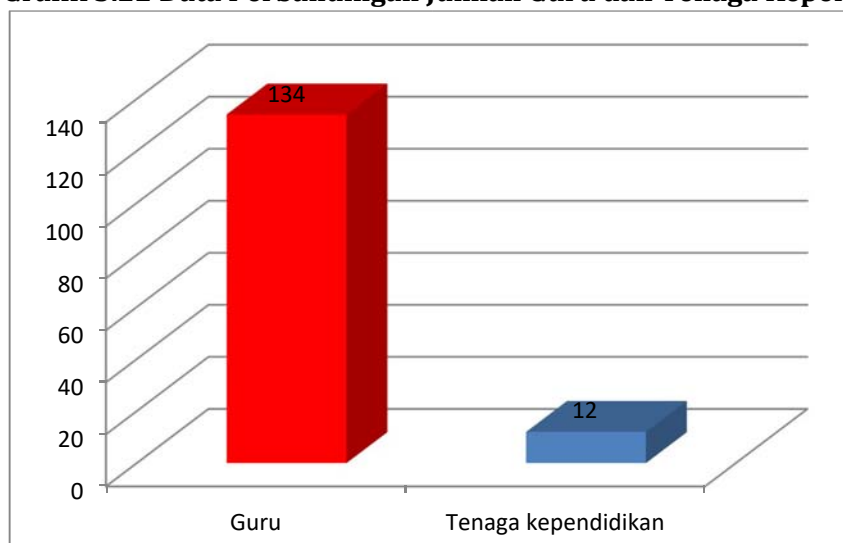


Grafik 3.21 Data Persentase Guru Kabupaten Tana Tidung Menurut Sertifikasi



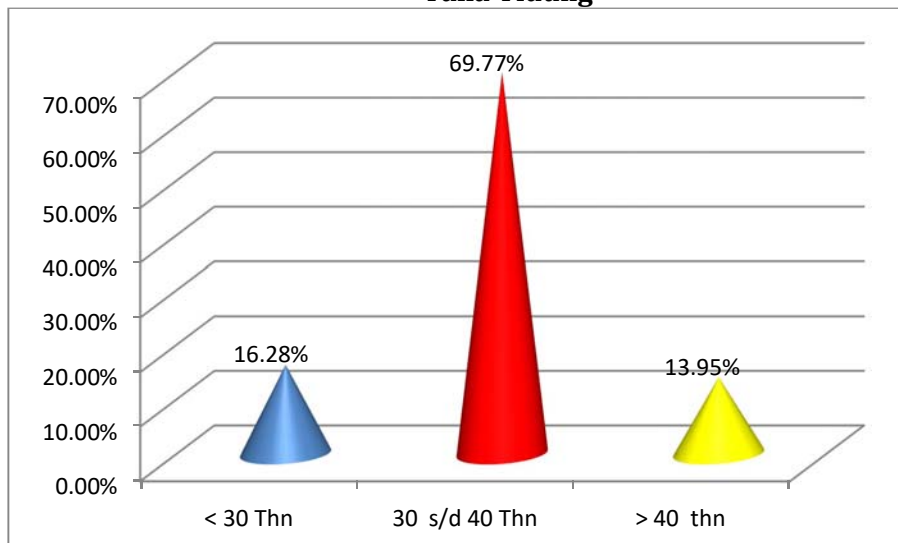
Jika dilihat dari banyaknya guru yang ada di Kabupaten Tana Tidung telah mendapat sertifikasi dari pemerintah sebanyak 7, 46%, sedangkan yang belum bersertifikasi sebanyak 92,54%, artinya kurang dari 10% Guru Sekolah Menengah Pertama di KTT belum bersertifikasi.

Grafik 3.22 Data Perbandingan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan



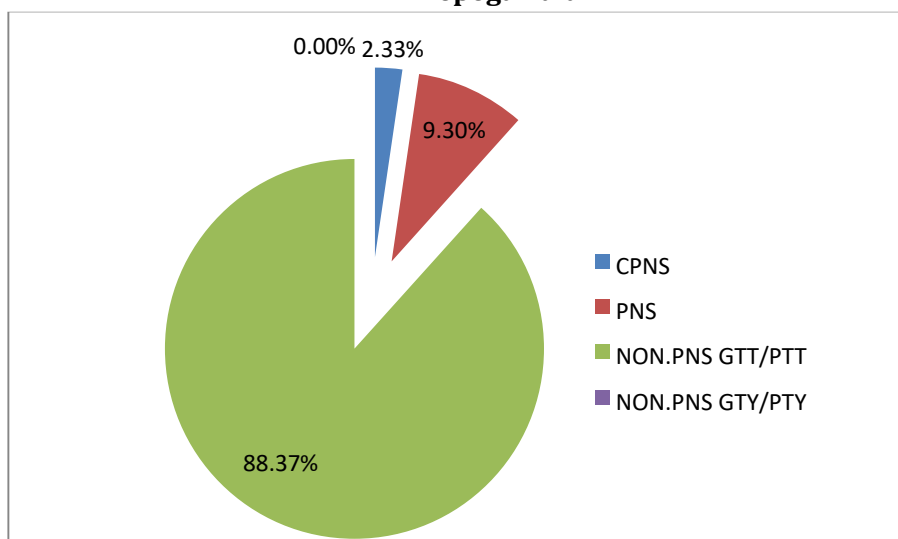
Dari grafik 3.22 dapat dilihat jumlah tenaga pendidik sebanyak 134 orang dan jumlah tenaga pendidikan 12 orang.

Grafik 3. 23 Data Persentase Tenaga Kependidikan SMP menurut Usia Kabupaten Tana Tidung

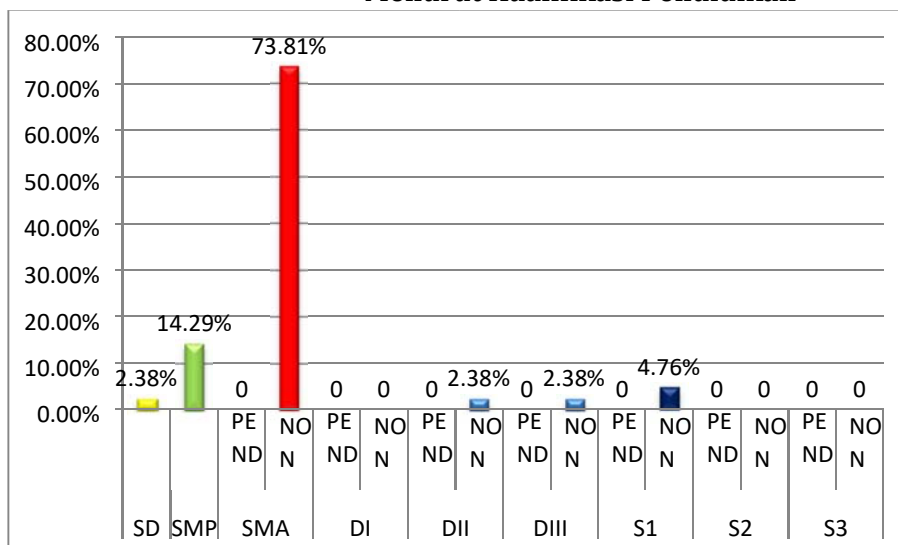


Perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan berdasarkan grafik 3.23 adalah 1:12. Sedangkan pada grafik 3.103 prosentase Tenaga kependidikan SMP di KTT ditinjau dari usia paling banyak didominasi oleh usia produktif dan ideal diantara 30 sampai dengan 40 tahun yaitu sebanyak 59,77%, dibawah 30 tahun 16,28% dan yang usia diatas 40 tahun hanya 13, 95%. Namun jika dilihat dari status kepegawaianya seperti terlihat pada grafik 3.23, Tenaga Kependidikan SMP di KTT justru didominasi oleh tenaga tidak tetap atau honorer sebanyak 88,37%, dangkan PNS hanya 9.30%.

Grafik 3. 24 Data Persentase Tenaga Kependidikan SMP Menurut Status Kepegawaian



Grafik 3.25 Data Persentase tenaga pendidikan SMP Kabupaten Tana Tidung Menurut Kualifikasi Pendidikan



Tenaga kependidikan SMP di KTT jika dilihat dari kualifikasi pendidikannya paling banyak didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 73,81% kemudian lulusan SMP sebanyak 14,29%.

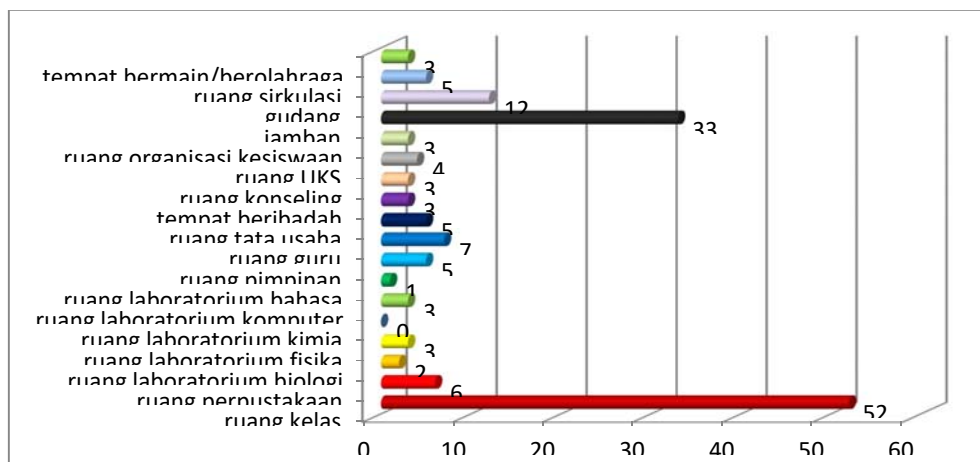
Jumlah kelas yang tersedia di SMP KTT terdata sebanyak 52 kelas dan siswa sebanyak 1156 orang sehingga dari data yang diperoleh perbandingan jumlah kelas dan siswa adalah 1 : 22. Sehingga jika sebaranya merata sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.26 berikut;

Grafik 3. 26 Data Perbandingan Jumlah Kelas dan Siswa

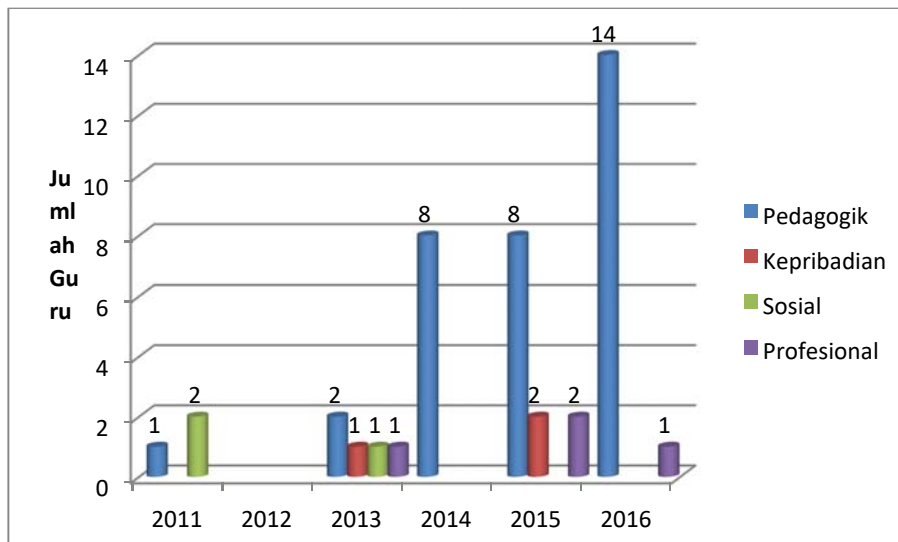


Dalam grafik 3.27, Efektifitas pembelajaran yang dilakukan di kelas tidak lepas dari sarana dan prasarana yang disediakan sekolah sebagai penunjang pembelajaran, jika dilihat pada grafik tersebut sangat terlihat bahwa sarana dan prasarana yang disediakan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama di luar Gedung Sekolah, seperti laboratorium belum memadai, seperti yang dapat dilihat pada grafik berikut yang cukup memadai hanya ruangan kelas.

Grafik 3. 27 Sarana SMP Kabupaten Tana Tidung



Grafik 3. 28 Data Pelatihan Yang pernah diikuti Guru SMP Kabupaten Tana Tidung



Pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh sebagian guru di tiap SMP di KTT tercatat paling banyak di pelatihan pedagogik, pada 2014 sebanyak 8

(delapan) kegiatan, 2015 ada 8 (delapan) kegiatan, pada tahun 2016 meningkat menjadi 14 (empat Belas) Kegiatan pelatihan kependidikan.

Sedangkan pelatihan-pelatihan menyangkut kepribadian, sosial dan profesional guru masih jarang dilakukan.

3.2.4. Sekolah Menengah Atas (SMA)

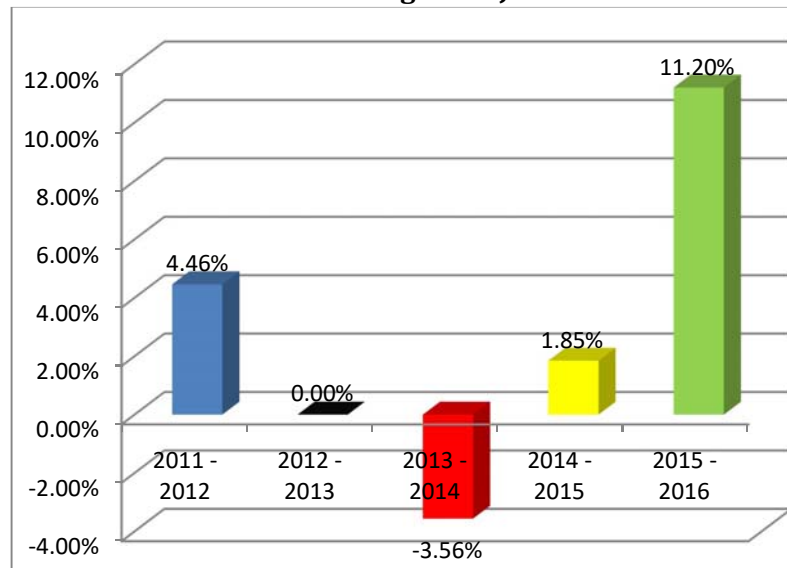
Kondisi pendidikan Sekolah Menengah Atas kabupaten Tana Tidung sampai dengan Tahun ajaran 2016/2017 sebagai berikut :

Sekolah Menengah Atas di kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 SMA Negeri. Jumlah siswa SMA secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel 3.3. pada tahun 2016 jumlah siswa terbanyak terdapat di Kecamatan Sesayap kemudian kecamatan Sesayap Hilir dan Tana Lia. Berdasarkan hasil data survei telah diperoleh Angka Partisipasi Kasar SMA sebesar 71,65 dan Angka partisipasi Murni sebesar 67,57.

Tabel 3. 3 Data Jumlah Siswa SMA Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 s/d 2016

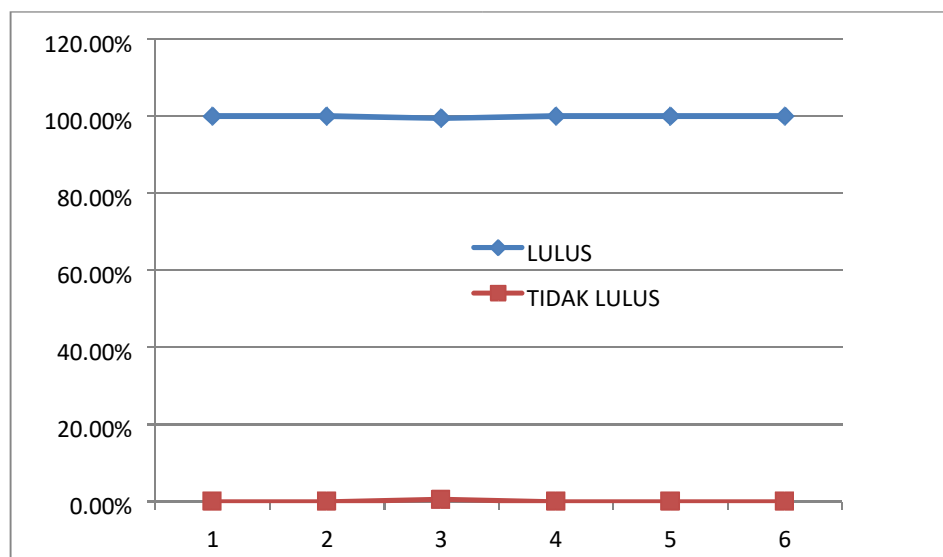
TAHUN	JUMLAH SISWA KELAS					
	X		XI		XII	
	L	P	L	P	L	P
2011	112	113	84	79	62	49
2012	116	100	90	89	68	70
2013	100	92	94	106	93	87
2014	115	118	93	91	104	88
2015	159	140	121	123	98	100
2016	141	153	157	136	114	123

Grafik 3. 29 Data Persentase Peningkatan Jumlah Siswa SMA Setiap Tahun



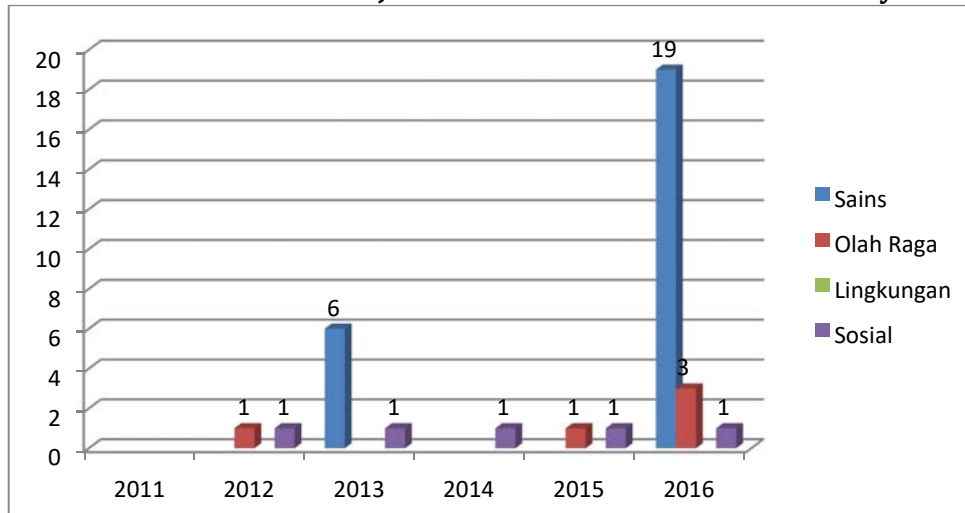
Berdasarkan tabel 3.3 dan grafik 3.109 diperoleh informasi bahwa peningkatan jumlah siswa dari tahun ke tahun sempat mengalami penurunan jumlah siswa yang signifikan yang puncaknya terjadi pada tahun 2013-2014 yaitu -3,56% dan kemudian meningkat pada tahun 2013-2015 1.85%, dan meningkat dratis pada tahun 2015-2016 11,20%. Ditinjau dari aspek jenis kelamin jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kabupaten Tana Tidung selisihnya tidak terlalu besar.

Grafik 3. 30 Persentase Kelulusan Siswa SMA Kabupaten Tana Tidung



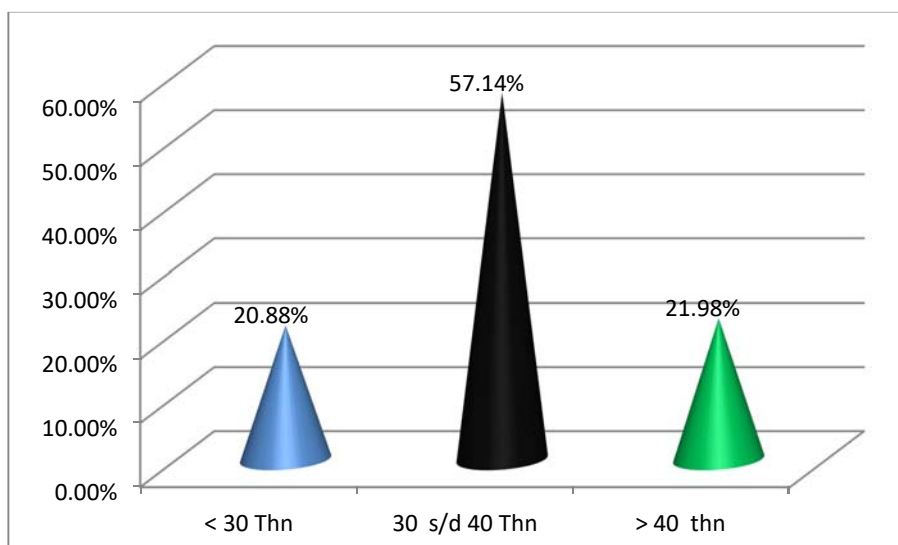
Apabila dilihat dari angka kelulusan siswa setiap tahunnya perbandingan persentase siswa lulus dan tidak lulus sudah sangat baik dengan persentase rata-rata kelulusan 99,91%. Prestasi siswa SMA kabupaten Tana Tidung lebih banyak diraih untuk katagori lomba sains dan cerdas cermat kemudian diikuti oleh prestasi dalam bidang olah raga.

Grafik 3.31 Data Jumlah siswa SMA menurut Prestasinya

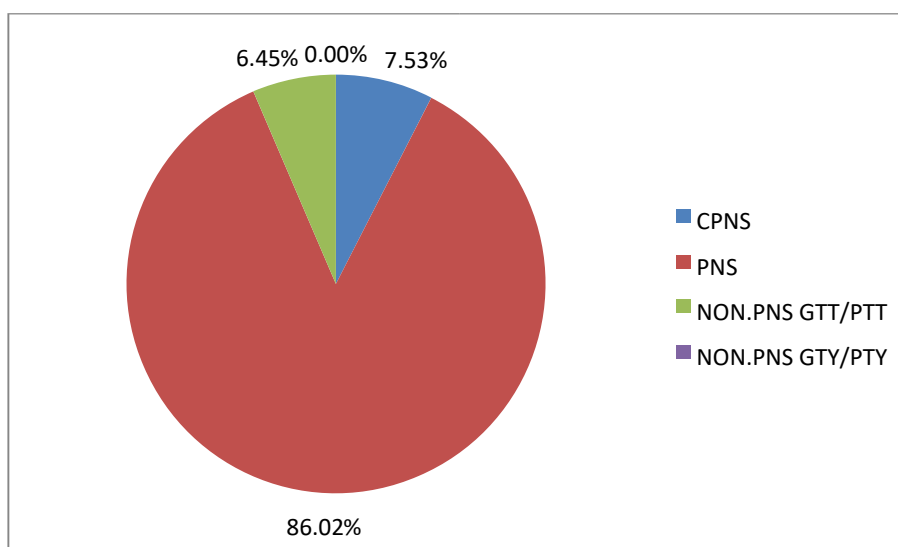


Persentase guru-guru SMA di Kabupaten Tana Tidung (KTT) paling banyak didominasi di usia antara 30 sampai dengan 40 tahun yaitu 57,14% dan termasuk usia produktif, sedangkan jumlah guru yang berusia dibawah 30 tahun berada pada persentase 20,88%, adapapun yang usianya diatas 40 tahun hanya 21,98%. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.32 berikut;

Grafik 3. 32 Data Persentase Guru SMA menurut Usia Kabupaten Tana Tidung

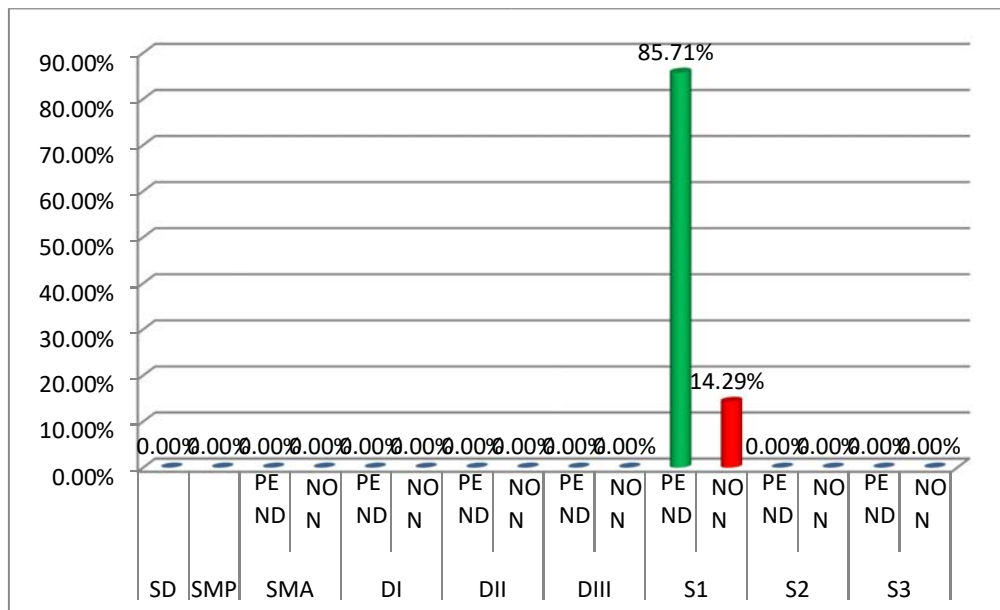


Grafik 3. 33 Data Persentase Guru SMA Menurut Status Kepegawaian



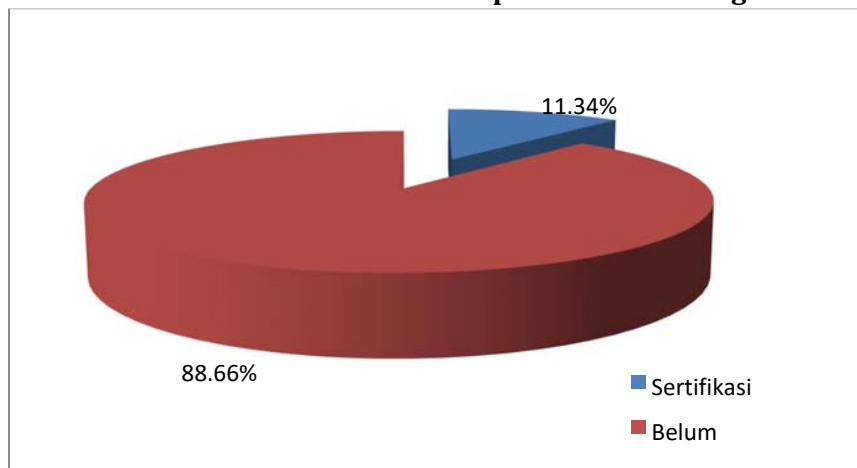
Informasi yang dapat diperoleh dari grafik 3.33 status kepegawaian guru SMA di Kabupaten Tana Tidung sudah cukup baik, yang mana sudah didominasi oleh PNS sebanyak 86,02% dan ditambah CPNS 7,536% kemudian sisanya dari guru tidak tetap.

Grafik 3. 34 Data Persentase Guru SMA Kabupaten Tana Tidung Menurut Kualifikasi Pendidikan

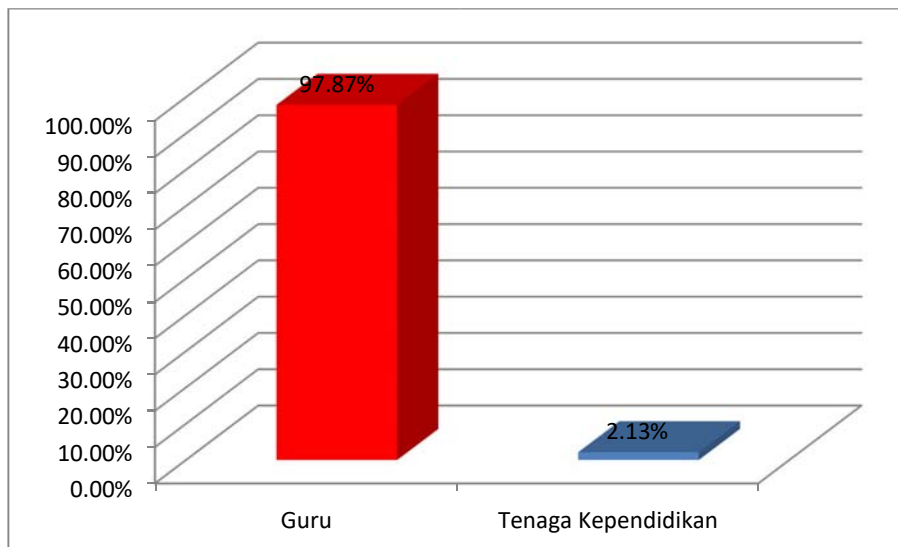


Dari grafik 3.114 diatas, kualifikasi pendidikan guru SMA di KTT sudah baik yaitu mayoritas sudah lulusan S1 di bidang pendidikan sebanyak 85,71% diikuti oleh lulusan S1 non pendidikan sebanyak 14,29%. Adapun yang sudah mendapatkan sertifikasi hanya 11,34%.

Grafik 3. 35 Data Persentase Guru Kabupaten Tana Tidung Menurut Sertifikasi

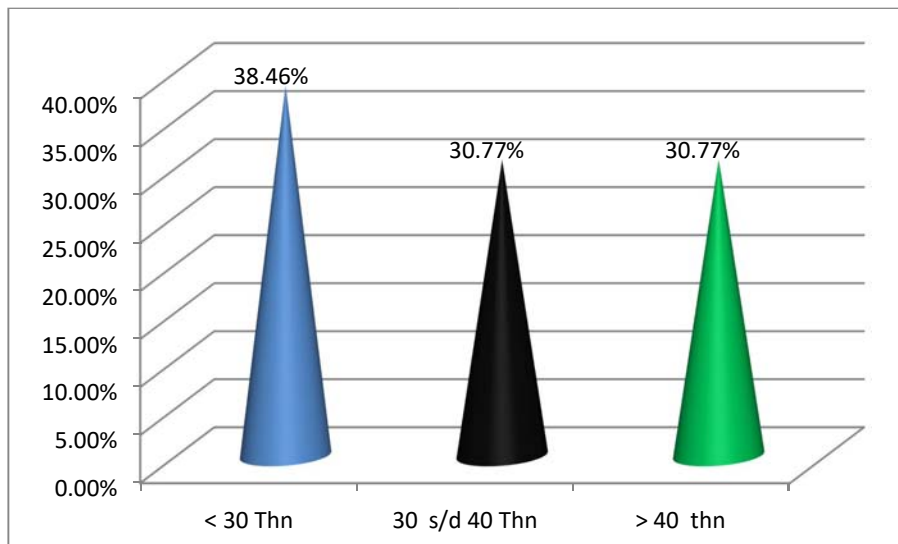


Grafik 3. 36 Data Perbandingan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan



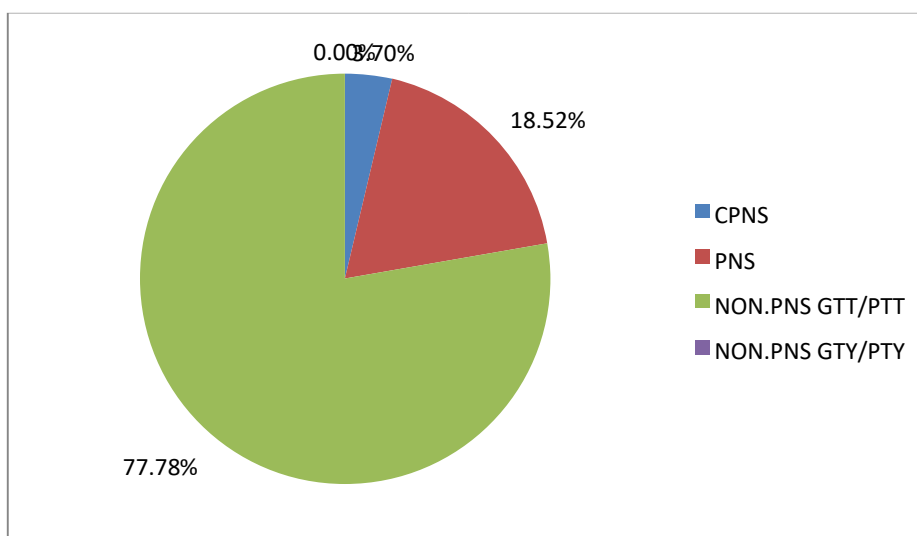
Perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan berdasarkan grafik 3.36 sangat belum mencukupi 1:46

Grafik 3. 37 Data Persentase Tenaga Kependidikan SMA menurut Usia Kabupaten Tana Tidung



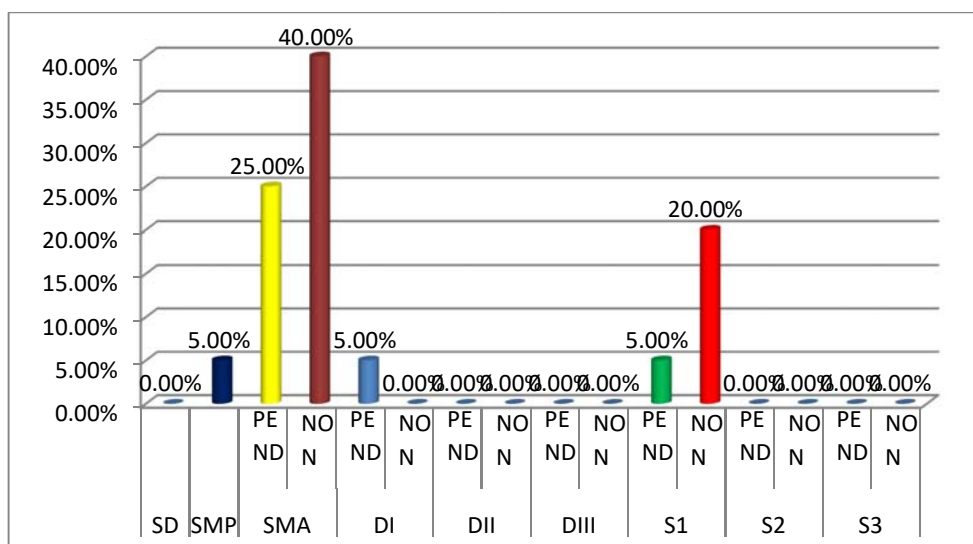
Tenaga kependidikan SMA di KTT ditinjau dari usia paling banyak didominasi oleh usia dibawah 30 tahun yaitu sebanyak 38,46%, usia 30-40 tahun berjumlah 30,77%, adapun yang berusia diatas 40 tahun masih cukup banyak yaitu 30,77%.

Grafik 3. 38 Data Persentase Tenaga Kependidikan SMA Menurut Status Kepegawaian



Dari grafik 3.38 dapat diperoleh informasi bahwa status kepegawaian untuk Tenaga Kependidikan SMA di KTT lebih banyak didominasi tenaga tidak tetap atau honorer berjumlah 77,78%, sedangkan Pegawai negeri Sipil hanya berjumlah 18,52%.

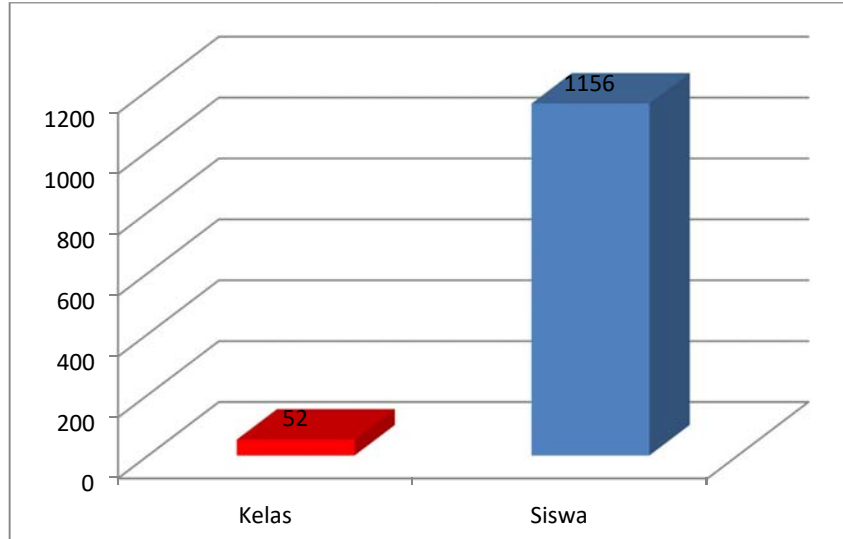
Grafik 3.39 Data Persentase tenaga kependidikan Kabupaten Tana Tidung Menurut Kualifikasi Pendidikan



Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tana Tidung jika dilihat dari kualifikasi pendidikannya paling banyak didominasi oleh lulusan

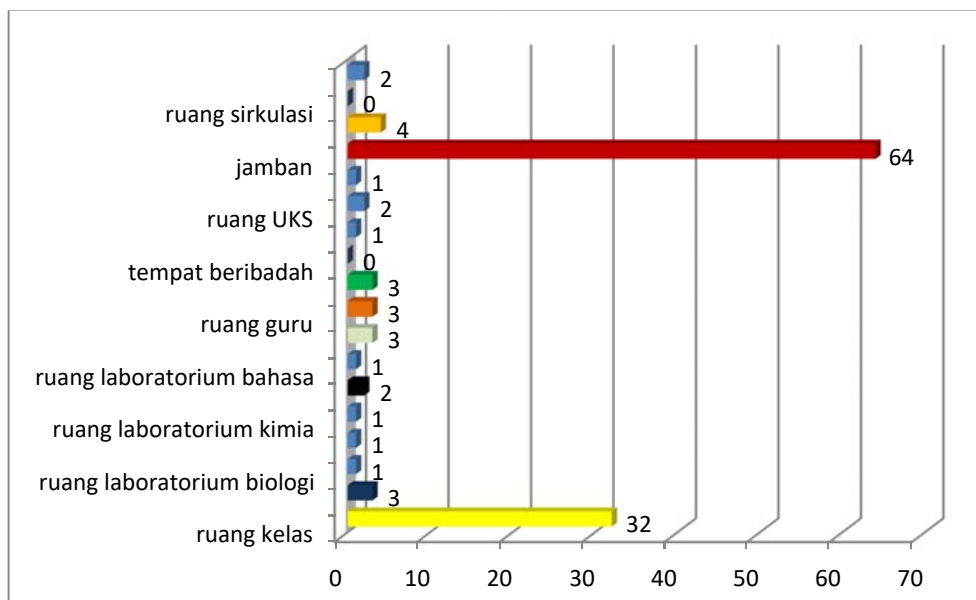
SMA non pendidikan sebanyak 40% kemudian lulusan SMA pendidikan sebanyak 25% dan S1 non pendidikan sebanyak 20 %.

Grafik 3. 40 Data Perbandingan Jumlah Kelas dan Siswa



Jumlah kelas yang tersedia di SMA KTT terdata sebanyak 32 kelas dan siswa sebanyak 824 orang sehingga dari data yang diperoleh perbandingan jumlah kelas dan siswa adalah 1 : 27.

Grafik 3. 41 Sarana SMA Kabupaten Tana Tidung



Pada grafik 3.41 menunjukan bahwa kondisi sarana dan prasarana pembelajaran diluar ruang kelas , seperti laboratorium masih belum mencukupi.

BAB IV PENETAPAN KINERJA PENDIDIKAN

4.1. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Tidung harus mengacu pada visi misi dan program Pembangunan Kabupaten Tana Tidung untuk periode pemerintahan 2019 – 2021. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut :
Visi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung:

“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANA TIDUNG MELALUI HARMONISASI DALAM PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM, EKONOMI PRO RAKYAT, BUDAYA LOKAL DAN IPTEK MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN”.

Adapun Visi di atas mengandung pengertian antara lain:

Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, yaitu melanjutkan pembangunan yang telah dimulai pada periode sebelumnya untuk menjadikan Kabupaten Tana Tidung lebih baik lagi, dengan mengoptimalkan peran seluruh sumber daya yang ada.

Harmonisasi, dimaksudkan untuk mensinergikan antara optimalisasi dayaguna sumber daya alam dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kabupaten Tana Tidung. Sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya alam sepenuhnya dapat mendukung peningkatan sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber Daya Manusia, yang mengandung arti bahwa kemajuan Kabupaten Tana Tidung hanya akan dapat dicapai apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompetitif, berdaya saing, mampu mandiri dalam segala hal dengan tetap memperhatikan tatanan kehidupan yang demokratis, berbudaya, religius, sehat dan cerdas, serta memiliki komitmen untuk maju dan berkembang guna mewujudkan Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah

yang menjadi pusat unggulan (center of excellent).

Sumber Daya Alam, bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan dioptimalkan bagi pembangunan Kabupaten Tana Tidung melalui program-program yang mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan Iptek, mengandung arti bahwa pembangunan Kabupaten Tana Tidung senantiasa diarahkan pada penciptaan perekonomian yang melibatkan seluruh masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan mengoptimalkan Iptek sebagai salah satu sarana untuk mendukung program pembangunan yang telah ditetapkan.

Berkelanjutan, yang artinya kegiatan pembangunan Kabupaten Tana Tidung tidak semata-mata untuk kepentingan saat ini akan tetapi memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk saling bersinergi dalam mengupayakan percepatan pembangunan yang tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya demi keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 menjabarkan lebih lanjut visi di atas menjadi beberapa misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
4. Menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek.
6. Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas.
7. Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara.
8. Memberikan pelayanan public yang cepat, mudah, murah, adil dan

transparan.

9. Mengembangkan agroindustri pertanian

Dari visi dan misi di atas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Tidung secara jelas dijabarkan berikut ini :

Misi kesatu : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk menjawab tantangan globalisasi, khususnya dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN, disamping itu mengingat Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah perbatasan antar Negara, maka keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing merupakan suatu keharusan, agar masyarakat Kabupaten Tana Tidung tetap menjadi aktor utama dalam kegiatan perekonomian di wilayahnya. Adapun tujuan utama dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu: (1) menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, (2) mendorong masyarakat agar menjadi bagian dari pelaku aktif pembangunan melalui model perencanaan pembangunan partisipatif (*Participatory Planning Development Model*), (3) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Maka strategi pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil, memiliki kompetensi, kemampuan dalam berkreasi dan berinovasi serta berdaya saing global.
2. Pelibatan masyarakat pada setiap penyelenggaraan pembangunan di segala bidang, dengan tetap memperhatikan keahlian serta profesionalisme dalam bekerja.
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang di dukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta guru-guru yang memiliki kompetensi.

Adapun arah kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan , akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru dan tenaga pendidik yang berkompetensi dan sesuai dengan kebutuhan;
4. Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industry, agar peserta didik siap terjun dalam dunia kerja dengan keahlian dan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung proses belajar mengajar pada sekolah-sekolah unggulan;
6. Menerapkan bebas biaya pendidikan 12 tahun dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga yang tidak mampu;
7. Membuat peraturan daerah tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Kabupaten Tana Tidung;
8. Membangun dan mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun swasta untuk melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan kerja berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Tana Tidung

Misi Keempat : Menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal.

Menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal. Derasnya arus modernisasi dikhawatirkan akan mengikis budaya dan kearifan lokal. Tujuan yang hendak dicapai adalah: (1) Meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap budaya lokal, (2) meningkatkan kontribusi kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tana Tidungsesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, (3) tumbuh dan terpeliharanya budaya dan kearifan lokal, (4) terlindunginya kepentingan masyarakat lokal dalam

kegiatan pembangunan

Strategi pembangunan yang dirumuskan adalah:

1. Peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti budaya sebagai identitas daerah yang harus di jaga dan dilestarikan;
3. Peningkatan fungsi balai-balai budaya untuk menggali dan meningkatkan budaya lokal;
4. Peningkatan promosi dan pementasan budaya lokal baik di dalam maupun di luar negeri;
5. Pendokumentasian karya dan pementasan budaya lokal;
6. Peningkatan peran pimpinan adat dalam memelihara dan melindungi budaya lokal serta dalam pengambilan kebijakan;
7. Karakterisasi dan identifikasi semua budaya lokal dan biodiversity khas Kabupaten Tana Tidung;
8. Pendaftaran hak kekayaan intelektual yang terkait dengan budaya lokal, termasuk warisan budaya.

Arah Kebijakan yang ditetapkan:

1. Meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal.
2. Mengembangkan kearifan dan budaya lokal yang berkarakter dan berkepribadian.
3. Meningkatkan pengelolaan dan kerjasama kemitraan dalam pengembangan obyek daya tarik wisata.
4. Meningkatkan perlindungan terhadap keberadaan kebudayaan dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan peran pemangku kepentingan terkait budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Tana Tidung.
6. Meningkatkan peran pemangku kepentingan terkait budaya dan kearifan lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rencana pembangunan di Kabupaten Tana Tidung.
7. Meningkatkan peran dan fungsi balai-balai budaya untuk menggali dan

meningkatkan budaya lokal.

8. Meningkatkan promosi dan pementasan budaya lokal baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Penyusunan database kebudayaan baik dalam bentuk kegiatan dokumentasi, karakterisasi maupun identifikasi semua budaya lokal dan biodiversity khas Kabupaten Tana Tidung.
10. Mendorong baik masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan budaya lokal, termasuk warisan budaya.
11. Penanaman budaya taat hukum.
12. Penguatan budaya politik yang beretika dan demokrasi Pancasila

Misi Ketujuh : Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara

Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara. Posisi Kabupaten Tana Tidung yang cukup strategis, berada di tengah-tengah antara wilayah yang perekonomiannya relatif maju dengan wilayah yang sedang berkembang di provinsi Kalimantan Utara merupakan potensi yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Tujuan yang hendak dicapai adalah: (1) Meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Tana Tidung (2) menjadikan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat unggulan (3) Terbukanya lapangan kerja (4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Strategi pembangunan yang dirumuskan:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam;
3. Peningkatan pelayanan publik;
4. Peningkatan pembukaan lapangan kerja;
5. Peningkatan peran sektor pariwisata;
6. Peningkatan jaminan keamanan;
7. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan

lingkungan hidup;

8. Peningkatan kualitas sadar hukum masyarakat.

Kebijakan yang ditetapkan:

1. Pengembangan dunia usaha dan investasi;
2. Meningkatkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder dan tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, kompeten, beretika, serta memiliki kemampuan dalam berkreasi dan berinovasi serta berdaya saing baik secara nasional maupun global, melalui pendidikan maupun pelatihan berbasis kompetensi;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan pada kegiatan hilirisasi, untuk meningkatkan investasi serta nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diarahkan untuk memberikan kemudahan dalam perizinan melalui pengembangan pelayanan terpadu satu pintu, dalam rangka mengundang kegiatan investasi di Kabupaten Tana Tidung;
6. Merumuskan perda-perda yang ramah investasi;
7. Menyusun dokumen/ perda rencana umum penanaman modal daerah;
8. Memberikan kemudahan/ insentif terhadap kegiatan usaha yang dapat menghasilkan lapangan kerja;
9. Meningkatkan promosi kebudayaan dan pariwisata yang dapat menjadi daya tarik Kabupaten Tana Tidung;
10. Meningkatkan keamanan dengan melakukan pendekatan baik yang bersifat persuasif maupun pencegahan dan penanggulangan dari gangguan-gangguan yang dapat menghambat kelancaran kegiatan perekonomian di Kabupaten Tana Tidung

Misi Kedelapan : Memberikan pelayanan public yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan.

Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan.

Misi dirumuskan dalam rangka mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana minimal wajib yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi hak masyarakat atas dasar prinsip (standar pelayanan minimum) terhadap semua layanan yang diperlukan masyarakat secara cepat, adil, murah, mudah, merata, dan diberikan dengan ramah. Tujuan yang hendak dicapai adalah: (1) Meningkatnya akses mutu pelayanan kesehatan (2) Meningkatnya pelayanan perizinan pada berbagai bidang.

Strategi pembangunan yang dirumuskan:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi;
2. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pengembangan dan pembangunan fasilitas olah raga dan sosial;
4. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi, berperan aktif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan yang ditetapkan:

1. Mewujudkan instrumen birokrasi yang efisien dan ketersediaan SDM yang berkualitas;
2. Simplifikasi system perijinan, transparan, cepat, berorientasi kepuasan publik;
3. Peningkatan dan pengembangan layanan elektronik: e-planing, e-budgeting, e-reporting, e-monitoring dan complaint handling center;
4. Peningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi, berperan aktif dalam kegiatan pelayanan publik;
5. Meningkatkan interaksi masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas publik, fasilitas olah raga serta fasilitas sosial lainnya;
6. Simplifikasi sistem perijinan, transparan, cepat, berorientasi kepuasan publik;

BAB V TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, INDIKATOR, DAN KEBIJAKAN

5.1 Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung adalah

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan sesuai prinsip-prinsip layanan prima.
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pendidikan.
3. Terjamin dan tersedianya akses bagi seluruh warga Tana Tidung dalam memperoleh kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan.
4. Meratanya secara proporsional penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas;
5. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan yang baik dan memadai
6. Meningkatnya kualitas pembinaan karir profesionalitas tenaga pendidik yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan serta meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik.
7. Terwujudnya otonomi satuan pendidikan melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan potensi sekolah.
8. Terwujudnya Pemuda Kabupaten Tana Tidung yang maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.
9. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan bidang olahraga yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional
10. Menggali potensi wisata baik darat maupun perairan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
11. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah
12. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan administrasi perkantoran yang baik

13. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur (ASN) yang professional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat

5.2 Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya sarana prasarana belajar mengajar pada sekolah unggulan dan sekolah konvensional sesuai dengan SPM yang ditentukan.
2. Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah (daya tampung) dan menurunnya angka putus sekolah.
3. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan merata.
4. Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi guru.
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan satuan pendidikan.
6. Meningkatnya penyelenggaraan akreditasi dan mutu pendidikan.
7. Meningkatnya pembinaan pendidikan kesetaraan dan menurunnya angka buta aksara.
8. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat.
10. Mengembangkan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan.
11. Mengembangkan dan meningkatkan perlindungan terhadap keberadaan budaya dan kearifan lokal yang berkarakter dan berkepribadian.
12. Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
13. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pelayanan publik.
14. Terwujudnya angkatan kerja yang berkualitas dan memiliki produktivitas yang baik.

5.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung adalah

1. Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun yang bermutu.
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.
3. Peningkatan jumlah dan kualifikasi akademik pendidikan.
4. Peningkatan jumlah, kualitas, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Fasilitasi penyelenggaraan akreditasi sekolah dan pencapaian sekolah berstandar nasional (SSN) dan bersertifikat ISO.
6. Peningkatan kualitas manajemen layanan pendidikan melalui pengembangan kapasitas lembaga (*capacity building*), dan peningkatan tata kelola pendidikan (*good governance*).
7. Menuntaskan angka buta huruf dan wajib belajar melalui Program-Program Paket Kesetaraan dan Pembinaan PKBM.
8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga berprestasi.
9. Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
10. Penyelenggaraan event/kejuaraan olahraga.
11. Peningkatkan kualitas seni dan budaya melalui pembinaan terhadap pelaku dan pemenuhan sarana dan prasarananya.
12. Melakukan usaha inventarisasi dan dokumentasi aset seni budaya serta benda cagar budaya dan Menetapkan produk hukum atas nilai seni budaya serta benda cagar budaya.
13. Penyediaan anggaran kegiatan yang menunjang layanan administrasi perkantoran dan administrasi pengelolaan keuangan SKPD.
14. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dan penunjang kinerja aparatur.
15. Mengembangkan kemampuan sumber daya aparatur melalui kursus dan pelatihan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

5.4. Pola kebijakan yang diambil Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung untuk mendukung pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar sesuai dengan standar melalui pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan sarana penunjang sekolah, dan pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah yang menunjang proses belajar mengajar yang baik.
2. Peningkatan profesionalisme pelayanan dan metode pembelajaran menuju sekolah unggulan, bermutu dan berstandar nasional (SSN).
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pendidik pada semua jenjang pendidikan dan di setiap kecamatan.
4. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kesejahteraan pendidik.
5. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
6. Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan non formal sebagai wadah pelayanan pendidikan sepanjang hayat.
7. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi seluruh peserta didik untuk memastikan semua anak usia sekolah dapat mengikuti pendidikan.
8. Meningkatnya pembangunan generasi muda dalam pembangunan.
9. Meningkatkan pembangunan sarana dan penyediaan alat kelengkapan olahraga berprestasi yang memadai dan merata.
10. Pembinaan dan pemberdayaan olahraga pendidikan dan masyarakat.
11. Mendorong pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta dapat mendukung kelancaran kegiatan pariwisata.
12. Peningkatan sistem informasi pariwisata dan kebudayaan melalui promosi yang efektif dan efisien serta terpadu.
13. Meningkatkan pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya tradisional sebagai jati diri daerah.
14. Fasilitasi fungsi pelayanan administrasi perkantoran dan administrasi pengelolaan keuangan SKPD.

15. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendukung dan penunjang kerja aparatur perkantoran.
16. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur ASN dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

BAB VI PENCAPAIAN KINERJA PENDIDIKAN

6.1. PENINGKATAN PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PADA JENJANG PENDIDIKAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam upaya pemerataan dan perluasan akses layanan dan kesempatan mendapatkan pendidikan meliputi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan mutu pendidikan dasar, dengan demikian pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan pada kurun waktu 2016-2021 di samping mengarah pada upaya pencapaian angka partisipasi dalam pendidikan, juga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai asset yang berharga dengan memperhatikan kualitas layanan pendidikan. Distribusi pelayanan penyediaan akses selain harus bisa menjangkau anak-anak yang berada di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak perempuan serta anak berkebutuhan khusus. Kebijakan umum Pembangunan Pendidikan kabupaten Tana Tidung pada bidang pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta nasional, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual dan kondisi fisik.

Tujuan dari Kebijakan ini dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kabupaten Tana Tidung untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEE) dan globalisasi, serta untuk meningkatkan peringkat IPM hingga mencapai posisi sama atau lebih baik. Untuk itu, sampai dengan tahun 2021 perlu dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Dengan paling mempertahankan APM- SD pada tingkat 87,48 % dan APM 75,55 memperluas SMP hingga mencapai APK 90,17% atau APM 75,5% , dan SMA APK 91, 68% atau APM 62,53%serta menurunkan angka

buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas.

Dalam pemeratakan dan memperluas layanan dan kesempatan memperoleh pendidikan, asumsi yang digunakan adalah pemenuhan daya tampung bagi anak usia -15 tahun yang belum sekolah, menjadi prioritas pertama. Program-program yang perlu diprioritaskan untuk dilaksanakan adalah:

- a. Rehabilitasi gedung yang rusak.
- b. Pembangunan unit sekolah baru.
- c. Pengembangan SD-SMP satu atap.
- d. Pembangunan ruang kelas baru.

6.2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Kebijakan Umum Pembangunan Pendidikan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung pada bidang Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing layanan dan tamatan pendidikan di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani.

Adanya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dapat diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi sehingga lulusan dapat lebih proaktif dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat baik pada tingkat loka, national maupun international. Selain itu, peningkatan daya saing layanan dan tamatan pendidikan mengandung pengertian bahwa layanan institusi pendidikan memiliki kapabilitas, profesionalitas, dan mutu layanan yang dapat dibandingkan dengan layanan yang berstandar international. Sedangkan peningkatan daya saing tamatan pendidikan mengandung pengertian bahwa tamatan pendidikan dari institusi pendidikan

Kabupaten Tana Tidung memiliki pengetahuan, kemampuan dan kompetensi serta profesionalitas yang sejajar dengan institusi yang bertaraf maupun berstandar internasional.

Dengan memperhatikan kesenjangan antara kondisi idaman dankondisi saat ini, rumusan program-program peningkatan mutu adalah:

a. Output

Peningkatan mutu luaran pendidikan mencakup beberapa aspek yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu:

- 1) Pengembangan kepribadian/karakter lulusan melalui pembelajaran.
- 2) Peningkatan nilai dan angka kelulusan ujian nasional.
- 3) Pengembangan kecakapan hidup lulusan (*hard skills* dan *soft skills*)
- 4) Penurunan angka *drop-out*.
- 5) Pembinaan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik.

b. Kurikulum

1).Kurikulum 2013

Berdasarkan ketentuan pada Permendikbud 105 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Menengahdan Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah, ini merupakan masa transisi dari kurikulum sebelumnya yang penekananya pada aspek pengetahuan atau kognitif menuju pada keseimbangan antara aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotorik. Dalam kondisi ini dimana mayoritas sekolah/guru yang belum siap melaksanakanya. Hal ini mengakibatkan sebagian besar sekolah menggunakan model kurikulum yang telah digunakan selama ini (KTSP).

Dengan Memperhatikan masih banyaknyasekolah yang belum mengimplementasikan kurikulum 2013 dan kecenderungan sekolah untuk menggunakan kurikulum KTSP yang tersedia, dan realisasi Kurikulum 2013 di kelas yang masih terbatas, serta dengan mempertimbangkan efektififitas dan efesiensi program sebelumnya, sehingga sangat diperlukan untuk merencanakan program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan sekolah dalam mengimple-mentasikan Kurikulum

2013).

2. Pelatihan dan Pengembangan pembelajaran kooperatif dan Inovatif dengan pendekatan saintifik.
3. Supervisi klinis pelaksanaan Kurikulum 2013.
4. Peningkatan ketersediaan bahan ajar dan buku referensi di sekolah.
5. Membangun Sarana prasarana yang mendukung terlaksananya kurikulum 2013.
6. Kurikulum *Boarding School*

Dengan adanya rencana pemerintah Kabupaten Tanah Tidung dalam membangun Sekolah Unggulan dan sekolah unggulan Plus, maka perlu disiapkan adanya kurikulum yang mendukung terlaksananya program tersebut. sehingga program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kurikulum *Boarding School* yang mengarah pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) *Plus*.
2. Mengadopsi dan menyusun Kurikulum *Cambridge International Examination (CIE)* atau *International Baccalaureate (IB)*.
3. Melakukan pelatihan intensif bagi sekolah *boarding School* tentang kurikulum *Cambridge International Examination (CIE)* atau *International Baccalaureate (IB)*.
4. Membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya *boarding School*.

c. Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran

Peningkatan mutu proses pembelajaran pada dasarnya dilakukan untuk menghasilkan mutu lulusan yang lebih berkualitas. Sebagaimana disebutkan di depan, output yang hendak diwujudkan hingga 2021 adalah dimilikinya kepribadian/karakter lulusan yang tangguh, nilai rerata UN yang tinggi dan angka kelulusan 97%, dimilikinya hard skills dan soft skills oleh lulusan (terutama mereka yang tidak akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, menurunnya angka DO hingga 1,69%, dan meningkatnya prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Untuk mencapai target-target

tersebut, ditetapkan program-program strategis berikut:

- 1) Pengembangan dan pelatihan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
- 2) Pengembangan dan pelatihan pembelajaran berbasis *Inquiry Learning*.
- 3) Pengembangan dan pelatihan pembelajaran yang berbasis pada *Boarding School*.
- 4) Pengembangan pembelajaran di SD-SMP Satu Atap.
- 5) Pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran.
- 6) Pengembangan pembelajaran IPA dan IPS terpadu.
- 7) Peningkatan kemampuan bahasa Inggris peserta didik.
- 8) Pengembangan pembelajaran berbasis budi pekerti.
- 9) Pengembangan pembelajaran *Lesson Study*.
- 10) Pengembangan Pembelajaran berbasis Sistem Kredit Semester (SKS).
- 11) Pengembangan PTD.
- 12) Pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL).
- 13) Pembinaan pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan.

d. Peningkatan Penilaian Pendidikan

Untuk mengatasi kelemahan penilaian hasil belajar, program peningkatan meliputi program-program strategis berikut:

- 1) Pengembangan sistem penilaian otentik.
- 2) Pembinaan penilaian *Cambridge International Examination* atau *International Baccalaureate (IB)*.
- 3) Pembinaan persiapan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional.
- 4) Pengembangan penilaian untuk kemahiran berbahasa Inggris.

e. Peningkatan Penyelenggaraan (Kelembagaan) Pendidikan

untuk Program peningkatan penyelenggaraan kelembagaan pendidikan yang berkualitas dan unggul akan dilaksanakan program – program sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sekolah *Boarding School*.
- 2) Pengembangan Sekolah Unggulan (SNP Plus).

- 3) Pengembangan Sekolah Standar Nasional (SNP).
- 4) Pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL).
- 5) Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- 6) Pengembangan sekolah yang terakreditasi
- 7) Pengembangan Sistem Manajemen Mutu atau Sertifikasi ISO 9000:2001
- 8) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
- 9) Pengembangan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi (SME) oleh sekolah (*internal*).
- 10) Pemberdayaan Komite Sekolah (KS).
- 11) Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- 12) Pendidikan Berbasis karakter.
- 13) Pembiayaan Pendidikan Bagi *Boarding School*
- 14) Pengembangan Tata Kelola Organisasi dan Administrasi Sekolah yang professional.
- 15) Pelaksanaan manajemen *Boarding School*
- 16) Pengembangan Manajemen dan Kelembagaan SD-SMP Satu Atap.
- 17) Pengembangan SMP dan SMA Terbuka
- 18) Pengembangan sekolah non Formal Paket A, B dan C.
- 19) SNP Bidang Sarana dan Prasarana.
- 20) Standarisasi dan pemenuhan Sarana dan Prasarana, serta aspek lainnya khususnya untuk *Boarding School* dan Sekolah Unggulan *Plus*.

f. Pembinaan Kesiswaan

Memperhatikan kebijakan dan target peningkatan mutu khususnya pembinaan kegiatan kesiswaan serta masalah-masalah yang dihadapi. Program-program tersebut dengan singkat diuraikan sebagai berikut;

- 1) Lomba MIPA.
- 2) Seleksi & Training Center IJSO.
- 3) IJSO.
- 4) OSN.
- 5) Sarana Kegiatan Olahraga dan Seni.
- 6) Kelas Olahraga di Tiap Kab/Kota.

- 7) FLS2N.
- 8) Lomba Lukis, Cipta Puisi dan Lagu.
- 9) LPIR.
- 10) *Student summer Camp*.
- 11) Lomba Sekolah Sehat.
- 12) Latihan Kepemimpinan.
- 13) Jambore Siswa Nasional (Pramuka).
- 14) Pembinaan Budi Pekerti.
- 15) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

g. Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Agar peningkatan pelayanan berjalan maksimal maka perlu dibangun sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
- 2) Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
- 3) Peningkatan Pembangunan sarana dan pra sarana SMP dan SMA *Bording School* dan unggulan.
- 4) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
- 5) Pembangunan Ruang Belajar Lain: Perpustakaan, Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium Media, Lapangan Olahraga.
- 6). Pembangunan jaringan internet yang memadai
- 7) Rehabilitasi Sekolah.

6.3. PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, dedikasi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenjang pendidikan dan diutamakan terlaksananya program boarding school dan sekolah unggulan. untuk dapat menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis dan mempunyai

komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, program-program yang menjadi prioritas adalah:

- 1) Peningkatan ratio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik dengan tetap memperhatikan pemerataan dan efisiensi dan efektifitas.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
- 3) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum pendidik dan tenaga kependidikan, dan pemberian insentif untuk guru-guru di *Bording School*
- 4) Pengembangan sistem perencanaan dan mekanisme rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan yang professional untuk mendukung terselenggaranya sekolah unggulan dan *boarding School*.
- 5) Peningkatan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di daerah yang kekurangan dan daerah terpencil.
- 6) Pemberian penghargaan kepada guru dan pamong pelajar yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa.
- 7) pengembangan kelembagaan melalui sistem standarisasi dan sertifikasi berskala nasional dan international.
- 8) Pembinaan profesi guru dan pamong belajar, guru, tutor, dan pamong belajar.

a. Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Pelajar

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemuda dan pelajar sebagai insan pelopor, penggerak pembangunan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.

Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas pemuda dan pelajar melalui peningkatan partisipasi pemuda pelajar di bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta meningkatnya pengembangan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat dan bernegara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antaran lain dapat berupa: pelatihan pembina dan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka), materi training penyuluhan HIV/AIDS dan narkoba, dialog organisasi pelajar, aksi di bidang keolahragaan

untuk meningkatkan budaya berolah raga, kesehatan jasmani, rohani, mental dan rohani siswa. Program ini dapat dimulai dari pendidikan dasar hingga menengah dengan meningkatkan kegiatan olahraga tradisional, meningkatnya upaya pemanduan bakat dan pembinaan olah raga sejak dini usia, mendukung pencapaian prestasi olah raga dalam kaitannya dengan pembangunan sosial ekonomi untuk meningkatkan citra bangsa dan kebangsaan nasional. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas fisik, prestasi belajar, kesehatan olahraga dan produktifitas kerja, memperoleh bibit olahragawan yang berpotensi di berbagai cabang olahraga, meningkatnya pertandingan berjenjang dari mulai tingkat desa sampai tingkat nasional, meningkatkan penerapan dan pemanfaatan ipteks olahraga dalam pemanduan, pembibitan, pembinaan, dan prestasi olah raga, serta meningkatnya prestasi olahragawan pelajar.

b. Tata kelola Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Beberapa program yang dilakukan dalam lingkup tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik adalah sebagai berikut.

- a. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- b. Pengembangan dan pembangunan *bording school*, sekolah unggulan dan sekolah terpadu yang terakreditasi.
- c. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu atau Sertifikasi ISO 9001
- d. Pengembangan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi (SME) oleh sekolah
- e. Pemberdayaan Komite Sekolah (KS).
- f. Pemberdayaan Sekolah.
- g. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- h. Verifikasi dan pengembangan data-base pendidikan.
- i. Fasilitas penyusunan profil pendidikan di tingkat kabupaten dan UPTD.
- j. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pendidikan antar instansi.
- k. Koordinasi penyerahan rencana dan program.
- l. Identifikasi isu-isu kritis permasalahan pembangunan pendidikan.
- m. Penataan sistem pendidikan dan latihan diklat fungsional peningkatan mutu anggaran.
- n. Monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

6.4. Prioritas Program Berdasarkan Jenjang Pendidikan

a. Program Pendidikan Dasar

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan. Sasaran tersebut adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar pihak yang menerima amanah sadar akan sesuatu yang harus dicapai.

- a. Sasaran untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan yang profesional adalah terlaksananya jumlah tenaga pendidik yang mengikuti program gelar akademik S1, meningkatnya kesejahteraan guru melalui tambahan insentif, kepada guru yang berprestasi serta memberikan beasiswa kepada guru-guru berprestasi di bidang akademik, penelitian, terlaksananya kegiatan kompetisi guru dalam bidang studi, tersedianya bahan ajar bagi guru, terlaksananya pemilihan guru-guru yang berprestasi, memberikan pelayanan penetapan angka kredit.

- a. Sasaran untuk memberdayakan MGMP dan KKG/KKS.

Terlaksananya pemetaan MGMP dan KKG/KKS, meningkatnya bantuan MGMP dan KKS jenjang pendidikan, terlaksananya kegiatan untuk setiap jenis bidang studi dan jenjang, terwujudnya data guru setiap jenis bidang studi dan jenjang pendidikan.

- b. Sasaran untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk Kegiatan di setiap jenis bidang studi dan jenjang pendidikan, rehabilitasi sekolah dan meningkatkan jumlah SD-SMP Satu Atap dan meningkatkan jumlah Asrama siswa terutama untuk *boarding school*

1. Sasaran untuk meningkatnya sarana pendidikan. Tersedianya alat-alat pendidikan pengajaran dan alat peraga pendidikan untuk setiap jenis jenjang pendidikan, tersedianya meubelair siswa, tersedianya buku-buku pelajaran untuk siswa dengan ratio 1:1, tersedianya buku-buku bacaan/referensi, ruang laboratorium, dan perpustakaan.
2. Sasaran meningkatkan jumlah sarana dan prasarana di sekolah daerah terpencil. Tercapainya jumlah sarana dan prasarana sekolah di daerah

terpencil, meningkatnya sarana pendidikan di daerah perbatasan, terlaksananya pembangunan asrama siswa dan guru di daerah terpencil.

3. Sasaran Peningkatan kemampuan guru dalam mengimplentasikan kurikulum K.13 dan penilaian Autentik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum dan sistem penilaian.
4. Sasaran untuk memberdayakan organisasi-organisasi kepemudaan. Terlaksananya pembinaan organisasi-organisasi pelajar, terlaksananya bantuan organisasi-organisasi pemuda pelajar.
5. Sasaran untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para pelajar. Terlaksananya pelatihan pembentukan sikap dan watak bukan hanya disekolah tapi juga dimasyarakat, tersedianya buku-buku penunjang keimanan dan ketaqwaan, Terlaksananya penyuluhan dan pencegahan pada narkoba dan HIV-AIDS.
6. Sasaran meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (IPTEKS) terwujudnya kemitraan sekolah dengan lembaga diluar sekolah dalam upaya meningkatkan ketrampilan yang dibutuhkan peserta didik.
7. Sasaran meningkatkan koordinasi dengan Perguruan Tinggi. Terwujudnya kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan Perguruan Tinggi, dalam upaya peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Sasaran menumbuhkan budaya olahraga di kalangan Siswa pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Terlaksananya sosialisasi makna dan manfaat pendidikan jasmani, terwujudnya penjaskes sebagai bagian integral dalam mata pelajaran, tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang dapat memenuhi kebutuhan minimal untuk melaksanakan kurikulum pendidikan jasmani sehingga terwujudnya prestasi olahraga bagi para pelajar.
9. Sasaran meningkatnya usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga perbatasan. Terlatihnya para pelajar dalam cabang-cabang olahraga yang dilombakan pada tingkat regional maupun national. Dengan menyediakan instruktur olahraga yang berkualitas, terlaksananya

pendidikan dan pelatihan guru-guru penjaskes.

10. Sasaran meningkatkan jumlah sarana dan prasarana di sekolah daerah terpencil. Tercapainya jumlah sarana dan prasarana sekolah di daerah terpencil, meningkatnya sarana pendidikan di daerah perbatasan, terlaksananya pembangunan asrama siswa dan guru di daerah terpencil.
11. Sasaran meningkatkan jumlah layanan pendidikan masyarakat tertinggal dan tidak mampu. Terdistribusinya secara merata penempatan guru-guru bantu untuk daerah terpencil, terlaksananya program pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C, terlaksananya penyelenggaraan program *Broad Based Education* (BBE) yang berorientasi pada keterampilan hidup bagi daerah tertinggal, terlaksananya pemberian insentif guru-guru di daerah terpencil, terlaksananya pembangunan SD-SMP Satu Atap.
12. Sasaran Peningkatan kemampuan guru dalam mengimplentasikan kurikulum K.13 dan penilaian Autentik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum dan sistem penilaian
13. Sasaran melaksanakan sosialisasi petunjuk penerimaan murid baru. Terlaksananya ketentuan-ketentuan tentang penerimaan murid baru, terlaksananya sosialisasi ketentuan penerimaan murid baru.
14. Sasaran menyusun kalender pendidikan. Terlaksananya Penyusunan rambu-rambu kalender pendidikan, serta terwujudnya kalender pendidikan.
15. Sasaran mengembangkan penilaian mutu pendidikan. Terlaksananya program penelitian, terwujudnya laporan penelitian bagi para tenaga pendidik di Kabupaten Tana tidung.

b. Program Pendidikan Menengah

Program ini bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menjadi yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, baik melalui jalur formal maupun nonformal pada tingkat pendidikan SMP dan SMA serta bentuk lain yang sederajat.

Sasaran program pendidikan menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan APK dan APM jenjang pendidikan menengah dan APS kelompok usia 16 s.d 18 tahun.
- 2) Meningkatkan angka melanjutkan lulusan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
- 3) Meningkatkan angka penyelesaian sekolah.
- 4) Menurunnya angka putus sekolah dan mengulang kelas.
- 5) Meningkatnya tingkat kelulusan ujian nasional (UN) dan tingkat ujikompetensi peserta didik.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Pemerataan dan perluasan

- a. Subsidi pembangunan unit sekolah baru SD SMP Satu Atap Subsidi ruang kelas baru (RKB).
- b. Rehabilitasi ruang penunjang.
- c. Pemerataan Tenaga Pendidik dan kependidikan
- d. Pengadaan mebeler sekolah.
- e. Pengembangan SMA terbuka.
- f. Pengembangan SMA swasta.
- g. Pengembangan SMK kecil.
- h. Penyediaan subsidi beasiswa.
- i. Bantuan subsidi ke sekolah.

2. Peningkatan Mutu Relevasi dan Daya Saing

- a. Pengembangan Boarding School
- b. Pengembangan sekolah unggulan
- c. Pengembangan sekolah terpadu
- d. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
- e. Pengembangan model-model pembelajaran.
- f. Penyediaan laboratorium IPA.
- g. Penyediaan laboratorium computer.
- h. Penyediaan perpustakaan sekolah.
- i. Penyediaan olimpiade keilmuan.
- j. Pengadaan bahan ajar dan buku pelajaran.

- k. Pengembangan kewirausahaan.
 - l. Pengadaan TV edukasi di lingkungan sekolah
 - m. Pengadaan majalah edukasi di lingkungan sekolah
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public
- a. Implementasi manajemen Berebasis Sekolah.
 - b. Peningkatan Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan SMP dan SMA.
 - c. Implementasi pembelajaran berpusat pada siswa (SCL). *Cooperative learning, Innovative Learning* dengan menggunakan *pendekatan saintifik*.
 - d. Implementasi *Lesson Study*
 - e. Pengembangan ITC.
 - f. Implementasi *English Day* di *Boarding School* dan Sekolah Unggulan.
 - g. Pelatihan Kurikulum 2013
 - h. Implementasi Kurikulum 2013
 - i. Pengembangan monitoring dan evaluasi.
 - j. Pengembangan SIM.

6.4. PELAKSANAAN SEKOLAH TERPADU UNGGULAN

A. Pengertian Sekolah Terpadu

Sekolah terpadu adalah sekolah-sekolah yang diselenggarakan berada dalam satu komplek dan di kelola secara terpadu baik dari aspek kurikulum, pembelajaran, guru, sarana dan prasarana, manajemen, dan evaluasi, sehingga menjadi sekolah yang efektif dan berkualitas. Kualitas yang dimaksud adalah sekolah tersebut minimal memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya, meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan telah menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan ciri keinternasionalan. Di samping itu, Sekolah Terpadu diharapkan mampu mengembangkan budaya sekolah dan lingkungan sekolah yang mendukung ketercapaian standar internasional dari berbagai aspek tersebut.

B. Konsep dan Model Sekolah Terpadu

Sekolah terpadu mengedepankan prinsip *seamless education* yaitu pendidikan yang saling berkesinambungan dan terpadu. *Building image* menjadi satu, sehingga SD, SMP, dan SMA merupakan satu bagian yang utuh. Seperti guru, staf, laboratorium, ruang kelas, gedung atau sumber daya sekolah lainnya merupakan milik bersama (*resources sharing*). Ada beberapa keunggulan dari sekolah terpadu diantaranya,

1. Adanya keterpaduan dan proses yang berkesinambungan antara pelaksanaan pembelajaran antara SD, SMP, dan SMA;
2. Sarana-prasarana yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara bersama-sama, sehingga penggunaannya lebih efisien dan efektif;
3. Guru dan staf dapat saling memperkuat dan mensinkronkan isi dan model pembelajaran, sehingga prosesnya menjadi berkelanjutan atau tidak terputus pada jenjang yang berikutnya; dan
4. Siswa setelah lulus dapat melanjutkan pendidikannya sampai jenjang SMA di satu sekolah yang sama tanpa khawatir memerlukan proses adaptasi lagi, sehingga gairah bersekolah dan kompetensi yang dikembangkan menjadi berkelanjutan.

Untuk membangun sekolah terpadu yang berbasis keunggulan, maka seluruh proses kegiatan belajar mengajar perlu dibangun secara terpadu, stimulatif, fasilitatif dan motivatif.

1. Terpadu (Integratif) Sekolah menjadikan sistem dan pola penyelenggaraannya terpadu dalam aspek:
 - a. Manajemen, yakni pengelolaan yang berbasis satu atap antara SD, SMP, dan SMA dikoordinasi oleh seorang direktur, namun semua memiliki masing-masing kepala sekolah yang memiliki otoritas dalam pengelolaan sekolahnya.
 - b. Kurikulum, yakni mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal yang berkesinambungan antara SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Kutai Timur.

- c. Kegiatan belajar mengajar, yakni memadukan secara utuh ranah kognitif, afektif dan konatif dalam seluruh aktivitas belajar. Belajar melalui pengalaman (*experiential learning*) menjadi suatu pendekatan yang sangat perlu mendapat perhatian dari pengelola sekolah. Dengan pendekatan langsung pada praktek yang memberikan pengalaman nyata kepada anak didik tentang pokok bahasan, *experiential learning* juga akan menumbuhkan semangat dan motivasi belajar yang tinggi, karena suasana menyenangkan dan menantang akan selalu mereka dapatkan. Proses pembelajaran juga semestinya melibatkan semua inteligensi (*multiple intelligences*).
 - d. Peran serta, yakni melibatkan pihak orangtua dan kalangan eksternal (masyarakat) sekolah untuk berperan serta menjadi fasilitator pendidikan para peserta didik. Orangtua harus ikut secara aktif memberikan dorongan dan bantuan baik secara individual kepada putera-puterinya maupun kesertaan mereka terlibat di dalam sekolah dalam serangkaian program yang sistematis. Keterlibatan orangtua memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan performance sekolah.
 - e. Iklim sekolah, yakni lingkungan pergaulan, tata hubungan, pola perilaku dan segenap peraturan yang diwujudkan dalam kerangka manajemen satu atap. Pola penataan lingkungan yang sesuai dengan hukum-hukum alam, seperti penataan kebersihan, kerapian, keteraturan, keefektifan, kemudahan, kesehatan, kelogisan, keharmonisan, keseimbangan dan lain sebagainya.
2. Stimulatif Kegiatan belajar yang efektif haruslah mampu memberikan stimulasi yang optimal kepada peserta didik. Memberikan stimulasi yang optimal sebaiknya menyesuaikan diri dengan bagaimana sifat-sifat dan gaya kognitif bekerja. Dalam hal ini psikologi kognitif dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya mengoptimalkan kemampuan daya serap anak dalam konteks belajar. Riding (2002) memaparkan bahwa strategi belajar hendaknya mempertimbangkan bagaimana memory bekerja (*working memory*) dan bagaimana gaya

kognitif seseorang (*cognitive style*). *Working memory* sangat mempengaruhi *performance* seorang anak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan kemampuan *problem solving*, *reasoning*, penyerapan perbendaharaan kata baru, dan *reading comprehension*.

3. Fasilitatif Kegiatan belajar mengajar harus mampu menyediakan seluas-luasnya sumber dan media belajar yang dapat digunakan secara bersama-sama. Belajar tidak hanya terpaku pada ruang kelas dan sumber belajar tradisional. Sumber dan media belajar haruslah diperluas tidak hanya di lingkungan sekolah, namun juga di lingkungan alam sekitar, masyarakat, instansi/lembaga, keluarga, mesjid, pasar, tokoh dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan informal juga dapat dijadikan media bagi proses belajar mereka, seperti: dalam hal berpakaian, aktivitas makan dan jajan, aktivitas ibadah, aktivitas kebersihan, aktivitas sosial. Dengan memperluas sumber dan media belajar yang terpadu, maka peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang membentuk kepribadian.
4. Motivatif Kegiatan belajar mengajar harus mampu membangkitkan motivasi berprestasi pada peserta didik. Dengan tumbuhnya *need of achievement* pada setiap siswa, maka ia akan selalu menjadikan seluruh aktivitasnya untuk meraih prestasi. Untuk dapat membangkitkan kebutuhan untuk selalu meraih prestasi, maka setiap pengalaman belajar anak haruslah dirasakan sebagai sesuatu pengalaman yang menyenangkan dan sekaligus menantang. Lingkungan belajar yang motivatif juga harus memunculkan iklim sekolah yang sehat yang ditandai dengan pola interaksi dan pergaulan yang hangat bersahabat diantara seluruh tenaga pendidikan dengan anak didik tanpa kehilangan ketegasan dan kewibawaan mereka.

C. Implementasi Manajemen Sekolah Terpadu Sebagai Sebuah Sistem, Sekolah juga mempunyai komponen-komponen input, proses output, lingkungan dan umpan balik. Input sekolah biasanya terdiri dari siswa, tenaga pendidikan, pembiayaan sekolah, regulasi pemerintah. Proses

transformasi meliputi antara lain kurikulum, proses belajar mengajar, motivasi, iklim, dan budaya sekolah. Output sekolah akan menghasilkan antara lain prestasi dan perkembangan siswa, kepuasan siswa dan wali siswa, kinerja dan kepuasan kerja tenaga kependidikan. Sedangkan umpan balik dalam sistem ini, merupakan informasi mengenai output atau proses yang akan berguna dan berpengaruh pada seleksi input pada masa datang, agar input sekolah dapat lebih baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk mendapatkan proses yang mengantarkan pada pencapaian tujuan, diperlukan suatu rekayasa manajemen organisasi yang efektif dan terpadu, dengan memperhatikan sifat-sifat dari proses itu sendiri. Berikut ini sistem manajemen sekolah yang berorientasi pada sistem penyelenggaraan terpadu.

1. DIREKTUR: Bertugas memimpin operasionalisasi sistem manajemen sekolah terpadu. Direktur bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung.
2. KEPALA SEKOLAH: Bertugas memimpin sekolah yang dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah (Wakasek) dan Tata Usaha Sekolah. Dalam aktivitas sehari-hari kepala sekolah berkoordinasi dengan direktur sebagai koordinator sekolah. Kepala sekolah bertanggungjawab kepada Direktur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung.
3. MANAJER AKADEMIK DAN KESISWAAN: Bertugas membantu direktur dan kepala sekolah dalam pengembangan bidang keunggulan akademis, kurikulum, dan Kesiswaan.
4. MANAJER ADMINISTRASI, KEUANGAN, DAN SARANA: Bertugas membantu direktur dan kepala sekolah dalam pengembangan bidang keunggulan administrasi, keuangan, dan sarana prasarana.
5. MANAJER SDM, LITBANG, DAN KERJASAMA: Bertugas membantu direktur dan kepala sekolah dalam pengembangan bidang keunggulan SDM, penelitian dan pengembangan, serta kerjasama.
6. WALI AMANAH KOMITE SEKOLAH TERPADU: Memiliki peran dan fungsi sebagai badan pendukung, pertimbangan, penghubung, dan pengawas dalam proses manajemen dan pelaksanaan proses belajar

mengajar di sekolah terpadu. Wali Amanah Komite Sekolah Terpadu terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris komite sekolah setiap jenjang sekolah ditambah kepala sekolah.

7. TATA USAHA SEKOLAH TERPADU Menangani administrasi umum yang dilaksanakan secara terpusat tetapi untuk administrasi yang bersifat khusus ditangani oleh masing-masing TU sekolah. TU Sekolah Terpadu dan TU sekolah menangani bidang database administrasi akademik, database administrasi kepegawaian, database administrasi kesiswaan, dan database administrasi umum.
8. PUSAT SUMBER BELAJAR Membantu guru mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menyediakan dan atau mengembangkan sumber dan media pembelajaran. PSB dipimpin satu ketua dan dibantu laboran yang sesuai dengan kebutuhan.
9. UNIT PELAKSANA TEKNIS Merupakan wadah layanan bagi warga sekolah terpadu dan masyarakat dalam rangka mempermudah, melengkapi, dan melayani pelaksanaan pendidikan sekolah terpadu.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pada penyelenggaraan satuan dan program PAUD di Kecamatan Tana Tidung dapat disimpulkan bahwa permasalahan PAUD meliputi tidak memiliki legalitas berupa NPSN, semua PAUD di Kabupaten Tana Tidung belum terakreditasi kecuali TK Negeri Pembina Tideng Pale, adanya PAUD yang tidak memiliki peserta didik dan mempunyai peserta didik berusia di atas 6 tahun, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi di bawah SMA serta tidak pernah mengikuti pelatihan dasar PAUD, semua PAUD tidak melakukan pengadministrasian terhadap pembiayaan yang dilakukan, dan ketidakpahaman PAUD tentang tingkat pencapaian perkembangan anak.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD, perlu penanganan Khusus, sedangkan untuk SMP dan SMA untuk itu perlu ditingkatkan atau paling tidak dipertahankan. Angka melanjutkan masih rendah lebih-lebih pada tingkat SMA, untuk itu perlu penanganan khusus, misalnya pengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah.

Penyebaran guru yang tidak merata, sehingga perlu kebijakan khusus dalam menyelesaikan permasalahan ini. Penjurusan di SMA perlu mempergunakan prosedur gabungan antara prestasi dan minat siswa sehingga akan dihasilkan lulusan yang bermutu. Status tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan mayoritas atau diatas 75% masih berstatus tenaga tidak tetap (honorar) sehingga perlu perhatian khusus agar sistem administrasi berjalan dengan baik. Jumlah guru yang sudah bersertifikasi kurang 12%, sehingga perlu perhatian khusus dari Dinas Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfred.Ricard. L & Patricia Carter. 2006.*Building the Future: Comprehensive Educational Master Planning Report 1995-2005*. University of Alabama & College Consortium.
- Ali. Mohamad. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Imperial Bakti Utama
- Anonim, 2008, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Depdiknas.
- Ace Suryadi. 2002. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan:Isu, Teoridan Aplikasi*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Cresswell,J.W. 1994, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*, London: SAGE Publication, International Educational and Professional.
- Davey. K. J. 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Praktek dan Relevansi bagi Dunia Ketiga*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Rencana Strategis pendidikan Nasional: Konferensi Nasional Revitalisasi Pendidikan*, Jakarta: Sesjen Depdiknas.
- Ibtisam Abu Duhou, 2003, *School Based Management (Manajemen berbasis Sekolah)*, Terjemahan: Noryamin Aini, Suparto & Abas AlJauhari,Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran
- Laporan Analisis Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi Kurikulum untuk Satuan Pendidikan Dasar dan menengah*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 2016-2021
- Sepandji, Kosasih Taruna, 2000, *Manajemen Pemerintahan Daerah: EraReformasi Menuju Pembangunan Otonomi Daerah*, Bandung: Penerbit Universal

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Yoyon Bahtiar Irianto, 2000, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Percontohan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Manajemen Pendidikan: Studi Deskriptif Analitik di Kabupaten Bandung”*, Tesis, Bandung: PPS UPI.